



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI . . .
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridho-Nya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Melalui LKPJ Bupati Serdang Bedagai ini diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang diwakili oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai memiliki bahan informasi secara lengkap dan utuh yang mencerminkan kinerja Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023. Berbagai prestasi dan kekurangan dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dan segala bentuk kemajuan dan keberhasilan yang telah diraih pada tahun 2023 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Bupati Serdang Bedagai selaku Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai beserta Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 20 (dua puluh) Dinas, 6 (enam) Badan, dan 17 (tujuh belas) Kecamatan, juga



menyadari benar akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dimaksud. Oleh sebab itu, segala kritik, saran/pendapat yang membangun akan kami terima dengan terbuka.

Untuk itu rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan di tahun yang akan datang. Disamping itu, perlu kami sampaikan bahwa realisasi keuangan pada LKPJ ini belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara.

Harapan kami kiranya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, dan akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Sei Rampah, Maret 2023
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 DASAR HUKUM	2
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	4
1.3 DATA UMUM DAERAH	7
1. DATA GEOGRAFIS WILAYAH	7
2. JUMLAH PENDUDUK	10
3. PERTUMBUHAN PENDUDUK	12
4. JUMLAH PNS	13
5. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN	14
6. REALISASI BELANJA DAERAH MENURUT JENIS BELANJA DAERAH	23
7. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN	40
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	44
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	50
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	50
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	552
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	559
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	585
4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	585
4.2 HAMBATAN / PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	585
BAB V PENUTUP	586

**DAFTAR GAMBAR**

		Halaman
Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai	9
Gambar 1.2	Grafik Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023	15
Gambar 1.3	Grafik Capaian Target Komponen PAD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023	18
Gambar 1.4	Grafik Capaian Target Hasil Pendapatan Transfer Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023	19
Gambar 1.5	Grafik Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023	25
Gambar 1.6	Grafik Persentase Capaian Komponen Belanja Operasi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (%)	30
Gambar 1.7	Grafik Capaian Komponen Belanja Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023	30
Gambar 1.8	Grafik Capaian Komponen Belanja Tidak Terduga Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023	31
Gambar 1.9	Grafik Capaian Komponen Belanja Transfer Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023	32
Gambar 1.10	Grafik Capaian Komponen Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023	41
Gambar 2.1	Grafik Capaian Komponen Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023	46
Gambar 2.2	Grafik Capaian Komponen Belanja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023	48



		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai	8
Tabel 1.2	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 – 2023	10
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	11
Tabel 1.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	12
Tabel 1.5	Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 – 2023	13
Tabel 1.6	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	13
Tabel 1.7	Perkembangan Jumlah PNS di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 – 2023	14
Tabel 1.8	Komposisi Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	15
Tabel 1.9	Perincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	16
Tabel 1.10	Perincian Pendapatan Transfer Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	18
Tabel 1.11	Perincian Pendapatan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	21
Tabel 1.12	Komposisi Beanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	24
Tabel 1.13	Perincian Belanja Operasi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	26
Tabel 1.14	Perincian Belanja Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	29
Tabel 1.15	Perincian Belanja Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	31
Tabel 1.16	Perincian Belanja Transfer Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	32



DAFTAR TABEL

Tabel 1.17	Perincian Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	33
Tabel 1.18	Perincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	41
Tabel 1.19	Perincian Penerimaan Pembiayaan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	43
Tabel 2.1	Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	45
Tabel 2.2	Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	47
Tabel 2.3	Pembiayaan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	49
Tabel 3.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	50
Tabel 3.1.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	129
Tabel 3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan	243
Tabel 3.1.4	Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan	277
Tabel 3.2	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	552
Tabel 3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2022	559



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dimaksudkan sebagai informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023, yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Serdang Bedagai untuk dibahas secara internal oleh DPRD. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.



1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023.
18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tanggal 15 November 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023.



1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2026 memiliki visi yang merupakan cita – cita yang ingin dicapai selama periode tahun 2021-2026 yaitu : **Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai Maju Terus, Mandiri, Sejahtera, Religius.**

Penjelasan dari makna yang terkandung dalam visi dapat diuraikan sebagai berikut:

Mewujudkan	yaitu	upaya yang dilakukan dalam membentuk sesuatu yang diharapkan atau dicita-citakan
Kabupaten Serdang Bedagai	yaitu	salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
Mandiri	yaitu	kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah, rumahtangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan kerjasama dengan pusat dan daerah lain yang sama-sama



		menguntungkan.
Sejahtera	yaitu	semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama dengan tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, nilai budaya ekonomi yang memadai.
Religius	yaitu	wujud sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kerukunan dalam kebhinekaan yang dibangun dalam semangat kebersamaan sesama masyarakat dan dengan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang benar-benar aman dan tenteram.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2026 tersebut perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta dukungan dari DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam melanjutkan 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi yaitu: Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Adapun misi yang dirancang dalam merealisasikan visi RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul, beriman, dan bertaqwa dengan pemnafaatan ilmu pengetahuan dan Teknologi (Iptek);
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;
3. Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, Peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya;
5. Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.



1.3 DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai secara geografis terletak pada posisi $03^{\circ} 01' 2,5''$ – $03^{\circ} 46' 33''$ Lintang Utara, $98^{\circ} 44' 22''$ – $99^{\circ} 19' 01''$ Bujur Timur, pada daerah bertopografi datar dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 0 – 500 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area keseluruhan seluas kurang lebih $8.789,38 \text{ km}^2$ (878.938 Ha) yang meliputi, daratan seluas kurang lebih $1.952,38 \text{ km}^2$ (195.238 Ha) dan lautan seluas kurang lebih 6.837 km^2 (683.700 Ha).

Secara administratif, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan dengan batas-batas wilayah administrasi kabupaten sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batubara dan Kabupaten Simalungun;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Ibukota Kabupaten Sedang Bedagai terletak di Kecamatan Sei Rampah yaitu Kota Sei Rampah. Bila dilihat dari luas wilayah per Kecamatan berdasarkan jumlah 17 (tujuh belas) kecamatan, maka dapat dilihat Kecamatan Sipispis mempunyai proporsi terluas $220,52 \text{ Km}^2$ (11,29 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai), sedangkan kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Silinda dengan luas $56,54 \text{ Km}^2$ (2,89 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai). Secara lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 1.1 dan Gambar 1.1** berikut ini :



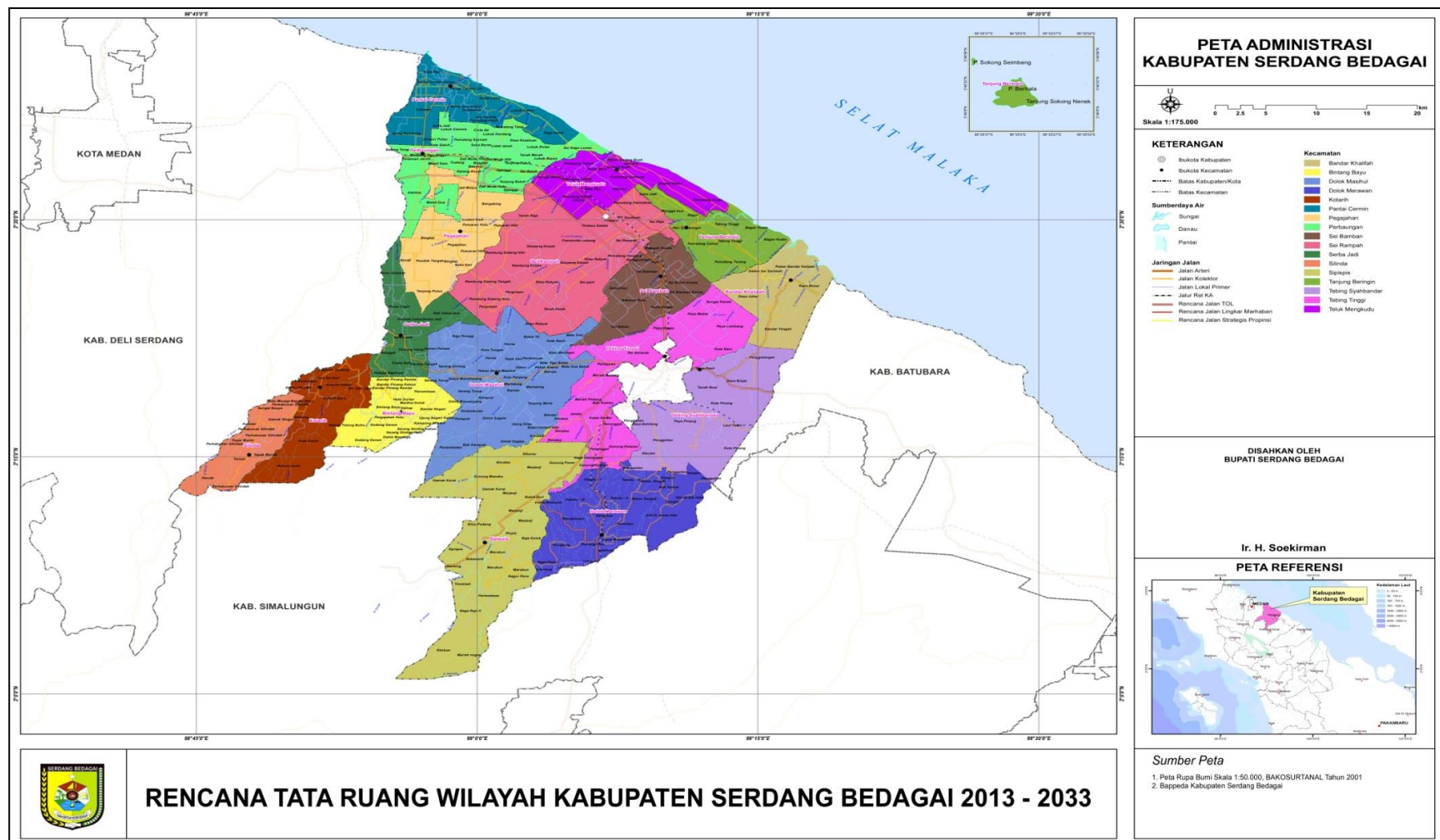
Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Serdang Bedagai

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km ²)
1.	Kotarih	11 Desa	83,67
2.	Silinda	9 Desa	56,54
3.	Bintang Bayu	19 Desa	66,83
4.	Dolok Masihul	27 Desa / 1 Kelurahan	194,40
5.	Serbajadi	10 Desa	67,47
6.	Sipispis	20 Desa	220,52
7.	Dolok Merawan	17 Desa	141,70
8.	Tebing Tinggi	14 Desa	147,49
9.	Tebing Syahbandar	10 Desa	142,85
10.	Bandar Khalipah	5 Desa	82,59
11.	Tanjung Beringin	8 Desa	71,94
12.	Sei Rampah	17 Desa	214,65
13.	Sei Bamban	10 Desa	82,01
14.	Teluk Mengkudu	12 Desa	76,54
15.	Perbaungan	24 Desa / 4 Kelurahan	118,63
16.	Pegajahan	12 Desa / 1 Kelurahan	99,36
17.	Pantai Cermin	12 Desa	85,20
Total		237 Desa / 6 Kelurahan	1.952,38

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai



BAB I



Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai



2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai pada akhir tahun 2023 berdasarkan hasil penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 685.485 jiwa terdiri dari laki-laki 343.803 jiwa dan perempuan 341.682 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022, jumlah penduduk tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 9.029 jiwa atau sebesar 1,33%.

Data perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2022 sampai 2023 menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada **Tabel 1.2**.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2022 – 2023

No	Tahun	Disdukcapil		
		Jumlah Penduduk	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2022	676.456	7.611	1,14
2	2023	685.485	9.029	1,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serdang Bedagai, 2023

Berdasarkan jumlah penduduk pada tiap kecamatan di tahun 2023, menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Perbaungan sebesar 116.506 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Kotarih yaitu 9.576 jiwa.

Gambaran mengenai jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan kecamatan secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 1.3** berikut ini.



Tabel 1.3
Komposisi Penduduk per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pantai Cermin	26.229	25.722
2.	Perbaungan	58.500	58.006
3.	Teluk Mengkudu	25.667	25.239
4.	Sei Rampah	37.728	37.333
5.	Tanjung Beringin	22.837	21.893
6.	Bandar Khalipah	13.327	13.415
7.	Dolok Merawan	9.592	9.555
8.	Sipispis	17.559	17.523
9.	Dolok Masihul	27.442	28.076
10.	Kotarih	4.821	4.755
11.	Silinda	5.082	5.037
12.	Serbajadi	11.086	11.132
13.	Tebing Tinggi	20.855	20.826
14.	Pegajahan	16.150	15.866
15.	Sei Bambi	23.389	23.893
16.	Tebing Syahbandar	16.919	16.873
17.	Bintang Bayu	6.620	6.538
	JUMLAH	343.803	341.682

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serdang Bedagai, 2023

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2023 didominasi oleh penduduk pada kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) yakni sebesar 67,99% dan sisanya adalah penduduk usia muda (< 15 tahun) dan usia lanjut (>65 tahun) sebesar 32,01%.



Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jumlah penduduk (jiwa)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	0 – 4	21.104	19.377
2.	5 – 9	33.109	30.874
3.	10 – 14	35.803	33.868
4.	15 – 19	28.053	27.232
5.	20 – 24	30.778	30.198
6.	25 – 29	27.111	25.296
7.	30 – 34	25.618	24.027
8.	35 – 39	25.654	24.819
9.	40 – 44	26.799	26.699
10.	45 – 49	21.010	21.349
11.	50 – 54	19.292	20.172
12.	55 – 59	15.949	17.609
13.	60 – 64	13.222	15.159
14.	65 – 69	9.689	10.805
15.	70 – 74	5.644	6.614
16.	75+	4.968	7.584
JUMLAH		343.803	341.682

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serdang Bedagai, 2023

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 4,36% sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 1.5** di bawah ini :



Tabel 1.5
Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Disdukcapil		
		Jumlah Penduduk	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2019	659.889	3.470	0,53
2	2020	664.550	4.661	0,71
3	2021	668.845	4.295	0,65
4	2022	676.456	7.611	1,14
5	2023	685.485	9.029	1,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serdang Bedagai, 2023

4. Jumlah PNS

Jumlah PNS di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2023 sebanyak 4.476 orang terdiri dari 1.382 orang laki-laki dan 3.094 orang perempuan. Adapun jumlah PNS berdasarkan pangkat dan golongan di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 1.6** di bawah ini.

Tabel 1.6
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan
di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 - 2023

Tahun	Jumlah Pegawai
Golongan Ia	0
Golongan Ib	0
Golongan Ic	1
Golongan Id	0
Golongan IIa	8
Golongan IIb	21
Golongan IIc	99
Golongan IId	335
Golongan IIIa	374
Golongan IIIb	578
Golongan IIIc	706
Golongan IIId	1.011
Golongan IVa	836



Tahun	Jumlah Pegawai
Golongan IVb	465
Golongan IVc	41
Golongan IVd	1
Golongan IVe	0

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

Sedangkan perkembangan jumlah PNS di Kabupaten Serdang Bedagai sejak tahun 2018 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.7 di bawah ini.

Tabel 1.7
Perkembangan Jumlah PNS di Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2018 – 2023

Tahun	Jumlah Pegawai
2018	5773
2019	5895
2020	5474
2021	5283
2022	4.834
2023	4.476

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target pendapatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang dalam APBD setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.746.668.802.718,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh enam milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.695.839.645.554,56 (satu triliun enam ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat koma lima puluh enam rupiah) atau mencapai sebesar 97,09% dari target yang telah ditetapkan. Perincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



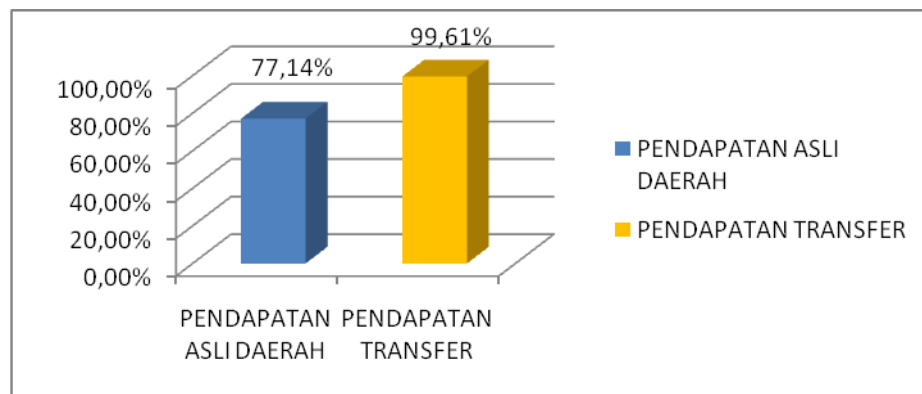
Tabel 1.8
Komposisi Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	195.840.274.591,00	151.079.923.854,56	77,14%
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.550.828.528.127,00	1.544.759.721.700,00	99,61%
JUMLAH		1.746.668.802.718,00	1.695.839.645.554,56	97,09%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

Dari Tabel 1.8 tersebut terlihat bahwa realisasi PAD di Tahun 2023 target yang direncanakan yaitu mencapai 77,14%. Untuk Dana Transfer realisasinya di Tahun 2023 mencapai 99,61% dari target yang direncanakan.

Gambar 1.2
Grafik Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat pusat.



Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self-supporting). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain PAD yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp195.840.274.591,00 (seratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dan dapat direalisasikan yaitu sebesar Rp151.079.923.854,56 (seratus lima puluh satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat koma lima puluh enam rupiah) atau kinerjanya mencapai 77,14% dari target yang direncanakan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian PAD Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.9 berikut ini.

Tabel 1.9
Perincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Pajak Daerah	126.621.649.604,00	98.400.622.710,50	77,71%
2	Retribusi Daerah	11.543.455.000,00	8.744.327.148,00	75,75%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.800.000.000,00	6.629.465.961,00	61,38%
4	Lain-lain PAD yang Sah	46.875.169.987,00	37.305.508.035,06	79,58%
	JUMLAH	195.840.274.591,00	151.079.923.854,56	77,14%

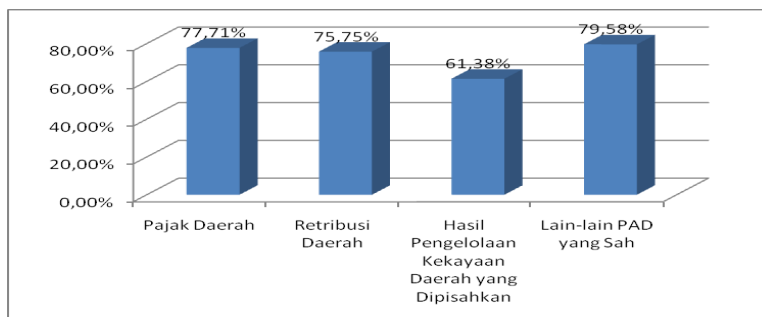
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023



Dari data Tabel tersebut diketahui bahwa dari Hasil Pajak Daerah dengan target sebesar Rp126.621.649.604,00 (seratus dua puluh enam milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah) terealisasi Rp98.400.622.710,50 (sembilan puluh delapan milyar empat ratus juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh rupiah) atau mencapai 77,71%, Hasil Retribusi Daerah dengan target Rp11.543.455.000,00 (sebelas milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp8.744.327.148,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) mencapai 75,75%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp6.629.465.961,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) mencapai 61,38%, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target Rp46.875.169.987,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) terealisasi sebesar Rp37.305.508.035,06 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta lima ratus delapan ribu tiga puluh lima koma nol enam rupiah) mencapai 77,58% dari target yang direncanakan.



Gambar 1.3
Grafik Capaian Target Komponen PAD
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Transfer ini terdiri atas : (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Tabel 1.10
Perincian Pendapatan Transfer Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.466.934.148.817,00	1.460.944.174.506,00	99,59%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.894.379.310,00	83.815.547.194,00	99,91%
	JUMLAH	1.550.828.528.127,00	1.544.759.721.700,00	99,61%

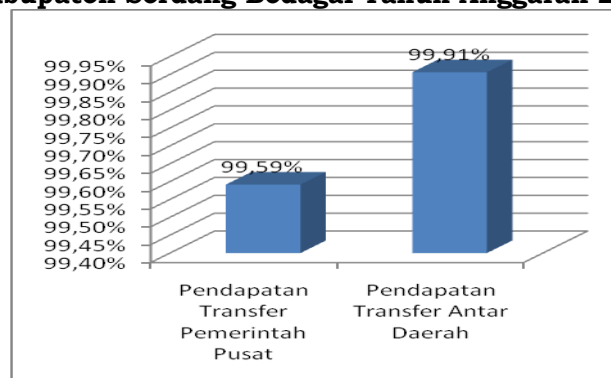
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023



Penerimaan dari Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.550.828.528.127,00 (satu triliun lima ratus lima puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.544.759.721.700,00 (satu triliun lima ratus empat puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau mencapai target sebesar 99,59%.

Adapun kinerja capaian penerimaan dari Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1.4
Grafik Capaian Target Hasil Pendapatan Transfer
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagihasilkan kepada Daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pos penerimaan terdiri atas: (1) Dana Perimbangan (2) Dana Insentif Daerah (DID); dan (3) Dana Desa.



- Pos penerimaan Dana Perimbangan terdiri atas: (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH); (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- Pos penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) terdiri atas : (1) Dana Insentif Daerah (DID).
- Pos penerimaan Dana desa terdiri atas : (1) Dana Desa.

Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.466.934.148.817,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.460.944.174.506,00 (satu triliun empat ratus enam puluh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus tujuh empat ribu lima ratus enam rupiah) atau mencapai 99,59% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI).

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp83.894.379.310,00 (delapan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp83.815.547.194,00 (delapan puluh tiga milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh empat



rupiah) atau mencapai 99,91% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI).

Berikut ini tabel perincian Pendapatan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 1.11
Perincian Pendapatan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
PENDAPATAN DAERAH	1.768.951.630.690,00	1.717.554.170.749,56	(51.397.459.940,44)	97,09
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31.021.750.000,00	32.668.874.089,00	1.647.124.089,00	105,31
KESEHATAN	30.880.000.000,00	32.522.617.339,00	1.642.617.339,00	105,32
Dinas Kesehatan	30.880.000.000,00	32.522.617.339,00	1.642.617.339,00	105,32
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	141.750.000,00	146.256.750,00	4.506.750,00	103,18
Satuan Polisi Pamong Praja	141.750.000,00	146.256.750,00	4.506.750,00	103,18
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.552.505.000,00	5.701.708.298,00	(1.850.796.702,00)	75,49
LINGKUNGAN HIDUP	865.750.000,00	661.080.000,00	(204.670.000,00)	76,36
Dinas Lingkungan Hidup	865.750.000,00	661.080.000,00	(204.670.000,00)	76,36
PERHUBUNGAN	605.500.000,00	590.705.000,00	(14.795.000,00)	97,56
Dinas Perhubungan	605.500.000,00	590.705.000,00	(14.795.000,00)	97,56
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	816.255.000,00	800.541.000,00	(15.714.000,00)	98,07
Dinas Komunikasi dan Informatika	816.255.000,00	800.541.000,00	(15.714.000,00)	98,07
PENANAMAN MODAL	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00	(563.213.702,00)	73,99
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00	(563.213.702,00)	73,99
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3.100.000.000,00	2.047.596.000,00	(1.052.404.000,00)	66,05
Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.100.000.000,00	2.047.596.000,00	(1.052.404.000,00)	66,05
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	969.200.000,00	967.119.000,00	(2.081.000,00)	99,79
KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.000.000,00	9.810.000,00	(20.190.000,00)	32,70
Dinas Perikanan	30.000.000,00	9.810.000,00	(20.190.000,00)	32,70
PERINDUSTRIAN	939.200.000,00	957.309.000,00	18.109.000,00	101,93
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	939.200.000,00	957.309.000,00	18.109.000,00	101,93
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.729.408.175.690,00	1.678.216.469.362,56	(51.191.706.327,44)	97,04
KEUANGAN	1.729.408.175.690,00	1.678.216.469.362,56	(51.191.706.327,44)	97,04
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.602.786.526.086,00	1.579.815.846.652,06	(22.970.679.433,94)	98,57
Badan Pendapatan Daerah	126.621.649.604,00	98.400.622.710,50	(28.221.026.893,50)	77,71

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023



c. Permasalahan/Hambatan dan Solusi

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi daerah, perlu diupayakan tersedianya data base wajib pajak/retribusi daerah guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi.
- 2) Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi perlu ditingkatkan guna efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan potensi dan penerimaan PAD.
- 4) Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah guna peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- 5) Perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak/retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, pemeriksaan pajak daerah, dan pemberian sanksi yang tegas atas wajib pajak yang menunggak pajak.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan penagihan aktif terhadap wajib pajak daerah yang menunggak pajak guna mengurangi jumlah piutang pajak dan menambah penerimaan pajak daerah.
- 7) Perlu adanya penambahan dan rekondisi aset-aset daerah yang disewakan dalam rangka upaya peningkatan realisasi penerimaan retribusi daerah.
- 8) Perlunya peningkatan pelaksanaan promosi pariwisata dan penyelenggaraan event wisata di Kabupaten Serdang Bedagai guna menarik wisatawan agar semakin banyak yang datang berkunjung.



- 9) Melaksanakan penambahan jumlah penyertaan modal (investasi) pada PT. Bank Sumut guna meningkatkan penerimaan bagi hasil deviden.
- 10) Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Pendapatan Transfer

Penerimaan Pendapatan Transfer, dalam hal ini Dana Alokasi Khusus, belum maksimal sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik lagi dengan instansi pemerintah pusat dan provinsi, dari sisi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam pelaksanaan pendistribusiannya, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik lagi guna diperolehnya pendapatan bagi hasil dari provinsi yang sesuai dengan potensi daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: (1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, (2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (3) Belanja Tidak Terduga, Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, (3) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.



Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.736.807.912.885,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan dapat direalisasikan Rp1.626.031.411.107,29 (satu triliun enam ratus dua puluh enam milyar tiga puluh satu juta empat ratus sebelas ribu seratus tujuh koma dua puluh sembilan rupiah) atau mencapai 93,62% (sebelum dilakukan audit BPK-RI) yang perinciannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

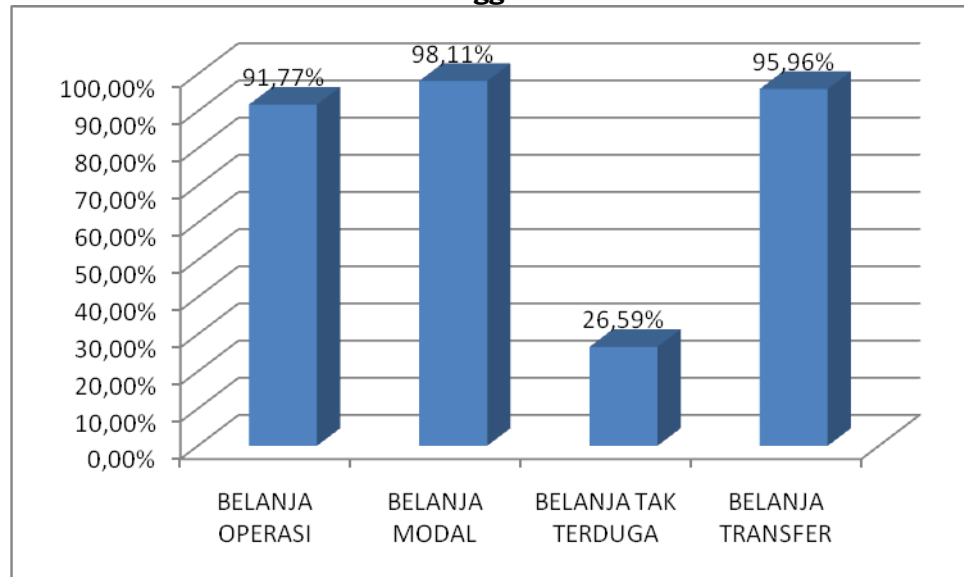
Tabel 1.12
Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun Anggaran 2023
(sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	1.109.937.028.216,00	1.018.555.673.755,49	91,77%
2	BELANJA MODAL	327.205.348.652,00	321.037.502.912,80	98,11%
3	BELANJA TAK TERDUGA	1.598.521.617,00	425.045.500,00	26,59%
4	BELANJA TRANSFER	298.067.014.400,00	286.013.188.939,00	95,96%
	JUMLAH	1.736.807.912.885,00	1.626.031.411.107,29	93,62%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023



Gambar 1.5
Grafik Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun Anggaran 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.108.758.855.735,00 (satu triliun seratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.053.165.227.998,25 (satu triliun lima puluh tiga miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau 94,99 % dengan rincian pada Tabel berikut ini.

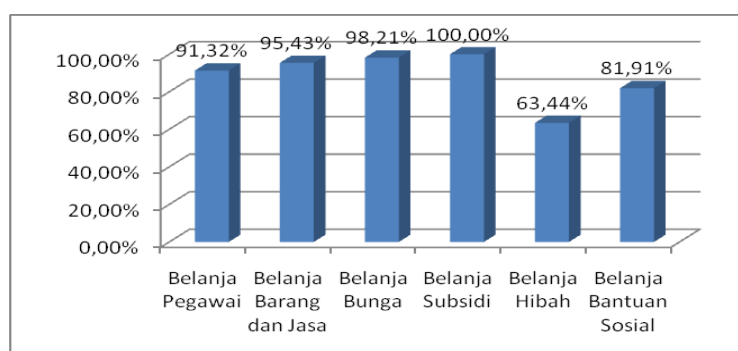


Tabel 1.13
Perincian Belanja Operasi Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	602.182.125.292,00	549.892.809.181,08	91,32%
2	Belanja Barang dan Jasa	449.591.142.877,00	429.028.746.677,41	95,43%
3	Belanja Bunga	7.448.350.000,00	7.315.166.694,00	98,21%
4	Belanja Subsidi	331.950.000,00	331.950.000,00	100,00%
5	Belanja Hibah	50.248.010.047,00	31.876.051.203,00	63,44%
6	Belanja Bantuan Sosial	135.450.000,00	110.950.000,00	81,91%
	JUMLAH	1.109.937.028.216,00	1.018.555.673.755,49	91,77%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

Gambar 1.6
Grafik Persentase Capaian Komponen Belanja Operasi
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp602.182.125.292,00 (enam ratus dua milyar seratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp549.892.809.181,08 (lima ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma delapan rupiah) atau 91,32%. Belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.



2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp449.591.142.877,00 (empat ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp429.028.746.677,41 (empat ratus dua puluh sembilan milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma empat puluh satu rupiah) atau 95,43%. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp7.448.350.000,00 (tujuh milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp7.315.166.694,00 (tujuh milyar tiga ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 98,21%. Belanja Bunga digunakan pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

4) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp331.950.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp331.950.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100,00%. Belanja subsidi di gunakan



untuk Bantuan kepada perusahaan/lembaga/masyarakat tertentu selaku penerima subsidi dengan tujuan agar harga produk atau jasa pelayanan umum masyarakat yang dihasilkan penerima belanja subsidi dapat terjangkau oleh masyarakat

5) Belanja Hibah

Belanja hibah pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp50.248.010.047,00 (lima puluh milyar dua ratus empat puluh delapan juta sepuluh ribu empat puluh tujuh rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp31.876.051.203,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) atau 63,44%. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp135.450.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp110.950.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 81,91%. Belanja bantuan sosial digunakan untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan baik yang terencana maupun yang tidak terencana.

**b. Belanja Modal**

Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp327.205.348.652,00 (tiga ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp321.037.502.912,80 (tiga ratus dua puluh satu milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus dua belas koma delapan puluh rupiah) atau 98,11%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam penjabaran APBD Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.14
Perincian Belanja Modal Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

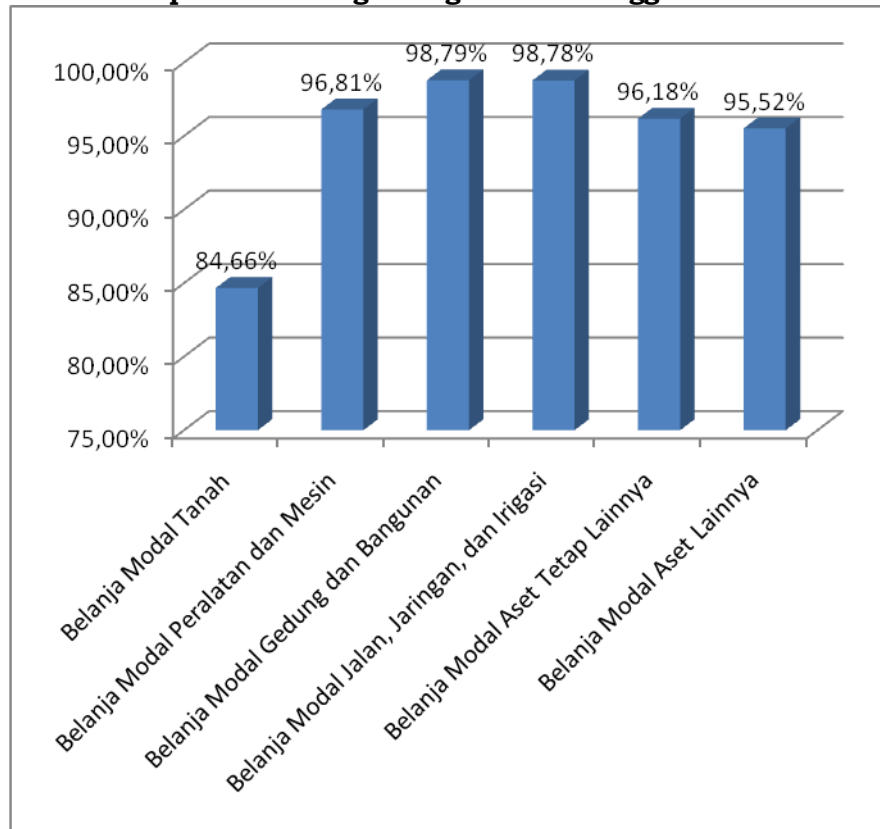
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	2.838.316.453,00	2.403.052.472,00	84,66%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.134.708.718,00	75.638.565.437,00	96,81%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.111.957.716,00	63.337.090.267,80	98,79%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	172.895.017.621,00	170.786.049.968,00	98,78%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.170.348.144,00	8.820.207.831,00	96,18%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	55.000.000,00	52.536.937,00	95,52%
	JUMLAH	327.205.348.652,00	321.037.502.912,80	98,11%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

Grafik berikut menggambarkan capaian rincian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023.



Gambar 1.7
Grafik Capaian Komponen Belanja Modal
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.598.521.617,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp425.045.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau 26,59%. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



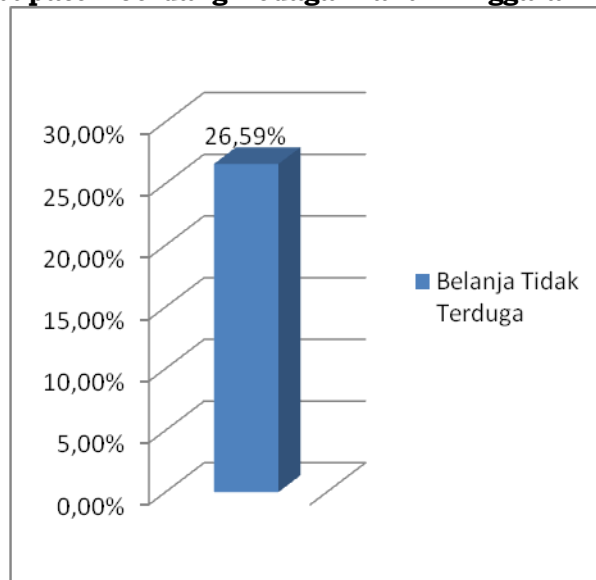
Tabel 1.15
Perincian Belanja Modal Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tidak Terduga	1.598.521.617,00	425.045.500,00	26,59%
	JUMLAH	1.598.521.617,00	425.045.500,00	26,59%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

Grafik berikut menggambarkan capaian rincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.8
Grafik Capaian Komponen Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer, merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp298.067.014.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta empat belas ribu empat ratus rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp286.013.188.939,00 (dua ratus



delapan puluh enam milyar tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 95,96%. Adapun perincian Belanja Transfer pada T.A. 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

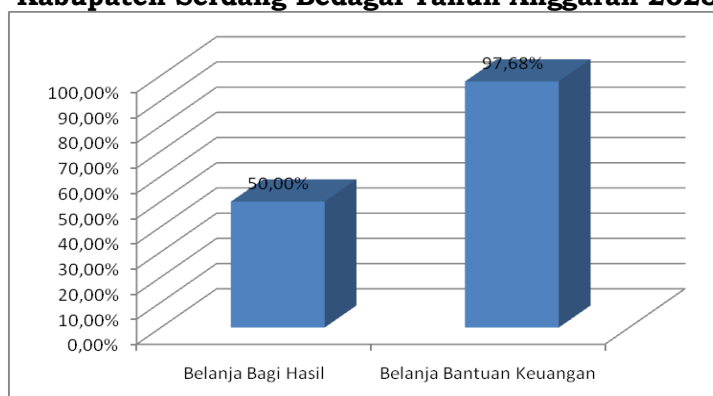
Tabel 1.16
Perincian Belanja Transfer Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil	10.781.322.000,00	5.390.661.104,00	50,00%
2	Belanja Bantuan Keuangan	287.285.692.400,00	280.622.527.835,00	97,68%
	JUMLAH	298.067.014.400,00	286.013.188.939,00	95,96%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

Grafik berikut menggambarkan capaian rincian Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.9
Grafik Capaian Komponen Belanja Transfer
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

Berikut ini tabel perincian Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.



Tabel 1.17
Perincian Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
BELANJA DAERAH	1.736.807.912.885,00	1.626.031.411.107,29	-110.776.501.777,71	93,62
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.005.220.224.976,00	955.027.414.040,41	-50.192.810.935,59	95,01
PENDIDIKAN	505.498.267.004,00	468.763.254.944,00	-36.735.012.060,00	92,73
Dinas Pendidikan	505.498.267.004,00	468.763.254.944,00	-36.735.012.060,00	92,73
BELANJA OPERASI	436.540.484.301,00	401.527.939.706,00	-35.012.544.595,00	91,98
Belanja Pegawai	317.195.368.038,00	283.508.230.924,00	-33.687.137.114,00	89,38
Belanja Barang dan Jasa	91.293.816.263,00	89.987.963.879,00	-1.305.852.384,00	98,57
Belanja Hibah	28.051.300.000,00	28.031.744.903,00	-19.555.097,00	99,93
BELANJA MODAL	68.957.782.703,00	67.235.315.238,00	-1.722.467.465,00	97,5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.590.711.013,00	25.394.269.419,00	-1.196.441.594,00	95,5
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.052.093.750,00	33.760.137.782,00	-291.955.968,00	99,14
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.314.977.940,00	8.080.908.037,00	-234.069.903,00	97,18
KESEHATAN	254.636.338.188,00	246.289.092.391,80	-8.347.245.796,20	96,72
Dinas Kesehatan	254.636.338.188,00	246.289.092.391,80	-8.347.245.796,20	96,72
BELANJA OPERASI	201.787.232.302,00	194.536.652.289,00	-7.250.580.013,00	96,41
Belanja Pegawai	95.905.740.536,00	93.860.162.877,00	-2.045.577.659,00	97,87
Belanja Barang dan Jasa	105.681.491.766,00	100.476.489.412,00	-5.205.002.354,00	95,07
Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0	100
BELANJA MODAL	52.849.105.886,00	51.752.440.102,80	-1.096.665.783,20	97,92
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.616.830.965,00	43.635.717.918,00	-981.113.047,00	97,8
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.482.340.000,00	7.367.246.784,80	-115.093.215,20	98,46
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	749.934.921,00	749.475.400,00	-459.521,00	99,94
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210.848.386.066,00	207.275.064.135,00	-3.573.321.931,00	98,31
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	210.848.386.066,00	207.275.064.135,00	-3.573.321.931,00	98,31
BELANJA OPERASI	37.450.886.913,00	36.377.823.772,00	-1.073.063.141,00	97,13
Belanja Pegawai	6.805.172.210,00	6.477.445.632,00	-327.726.578,00	95,18
Belanja Barang dan Jasa	30.645.714.703,00	29.900.378.140,00	-745.336.563,00	97,57
BELANJA MODAL	173.397.499.153,00	170.897.240.363,00	-2.500.258.790,00	98,56
Belanja Modal Tanah	1.974.064.453,00	1.653.430.472,00	-320.633.981,00	83,76
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.954.700,00	237.444.700,00	-510.000,00	99,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.218.689.500,00	5.120.487.500,00	-98.202.000,00	98,12
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.966.790.500,00	163.885.877.691,00	-2.080.912.809,00	98,75
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.550.707.604,00	16.824.309.621,61	-726.397.982,39	95,86
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.550.707.604,00	16.824.309.621,61	-726.397.982,39	95,86
BELANJA OPERASI	11.196.455.604,00	10.600.865.621,61	-595.589.982,39	94,68



BAB I

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai	3.398.645.010,00	3.135.964.642,00	-262.680.368,00	92,27
Belanja Barang dan Jasa	7.797.810.594,00	7.464.900.979,61	-332.909.614,39	95,73
BELANJA MODAL	6.354.252.000,00	6.223.444.000,00	-130.808.000,00	97,94
Belanja Modal Tanah	864.252.000,00	749.622.000,00	-114.630.000,00	86,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	398.980.000,00	-1.020.000,00	99,75
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.090.000.000,00	5.074.842.000,00	-15.158.000,00	99,7
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.948.658.779,00	11.547.914.878,00	-400.743.901,00	96,65
Satuan Polisi Pamong Praja	8.289.884.171,00	8.106.324.179,00	-183.559.992,00	97,79
BELANJA OPERASI	8.289.884.171,00	8.106.324.179,00	-183.559.992,00	97,79
Belanja Pegawai	2.846.289.615,00	2.741.835.631,00	-104.453.984,00	96,33
Belanja Barang dan Jasa	5.443.594.556,00	5.364.488.548,00	-79.106.008,00	98,55
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.658.774.608,00	3.441.590.699,00	-217.183.909,00	94,06
BELANJA OPERASI	3.310.774.608,00	3.100.450.699,00	-210.323.909,00	93,65
Belanja Pegawai	2.448.064.430,00	2.326.792.299,00	-121.272.131,00	95,05
Belanja Barang dan Jasa	862.710.178,00	773.658.400,00	-89.051.778,00	89,68
BELANJA MODAL	348.000.000,00	341.140.000,00	-6.860.000,00	98,03
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	348.000.000,00	341.140.000,00	-6.860.000,00	98,03
SOSIAL	4.737.867.335,00	4.327.778.070,00	-410.089.265,00	91,34
Dinas Sosial	4.737.867.335,00	4.327.778.070,00	-410.089.265,00	91,34
BELANJA OPERASI	4.737.867.335,00	4.327.778.070,00	-410.089.265,00	91,34
Belanja Pegawai	2.145.492.234,00	2.044.139.562,00	-101.352.672,00	95,28
Belanja Barang dan Jasa	2.592.375.101,00	2.283.638.508,00	-308.736.593,00	88,09
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	94.800.787.243,00	90.823.643.903,00	-3.977.143.340,00	95,8
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.567.754.507,00	17.220.767.694,00	-1.346.986.813,00	92,75
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.567.754.507,00	17.220.767.694,00	-1.346.986.813,00	92,75
BELANJA OPERASI	18.477.601.697,00	17.137.281.444,00	-1.340.320.253,00	92,75
Belanja Pegawai	6.603.935.414,00	6.358.803.416,00	-245.131.998,00	96,29
Belanja Barang dan Jasa	11.873.666.283,00	10.778.478.028,00	-1.095.188.255,00	90,78
BELANJA MODAL	90.152.810,00	83.486.250,00	-6.666.560,00	92,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.152.810,00	83.486.250,00	-6.666.560,00	92,61
PANGAN	4.813.358.614,00	4.637.235.815,00	-176.122.799,00	96,34
Dinas Ketahanan Pangan	4.813.358.614,00	4.637.235.815,00	-176.122.799,00	96,34
BELANJA OPERASI	4.593.358.614,00	4.417.974.815,00	-175.383.799,00	96,18
Belanja Pegawai	2.645.506.140,00	2.535.516.689,00	-109.989.451,00	95,84
Belanja Barang dan Jasa	1.947.852.474,00	1.882.458.126,00	-65.394.348,00	96,64
BELANJA MODAL	220.000.000,00	219.261.000,00	-739.000,00	99,66
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.000.000,00	219.261.000,00	-739.000,00	99,66



BAB I

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
LINGKUNGAN HIDUP	7.427.081.222,00	7.239.468.176,00	-187.613.046,00	97,47
Dinas Lingkungan Hidup	7.427.081.222,00	7.239.468.176,00	-187.613.046,00	97,47
BELANJA OPERASI	7.269.259.141,00	7.083.326.176,00	-185.932.965,00	97,44
Belanja Pegawai	2.879.639.442,00	2.756.324.685,00	-123.314.757,00	95,72
Belanja Barang dan Jasa	4.389.619.699,00	4.327.001.491,00	-62.618.208,00	98,57
BELANJA MODAL	157.822.081,00	156.142.000,00	-1.680.081,00	98,94
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.822.081,00	156.142.000,00	-1.680.081,00	98,94
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.321.276.786,00	6.990.988.532,00	-330.288.254,00	95,49
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.321.276.786,00	6.990.988.532,00	-330.288.254,00	95,49
BELANJA OPERASI	6.474.852.986,00	6.212.847.532,00	-262.005.454,00	95,95
Belanja Pegawai	4.157.198.236,00	3.940.873.956,00	-216.324.280,00	94,8
Belanja Barang dan Jasa	2.317.654.750,00	2.271.973.576,00	-45.681.174,00	98,03
BELANJA MODAL	846.423.800,00	778.141.000,00	-68.282.800,00	91,93
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	846.423.800,00	778.141.000,00	-68.282.800,00	91,93
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.015.176.169,00	6.852.860.837,00	-162.315.332,00	97,69
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.015.176.169,00	6.852.860.837,00	-162.315.332,00	97,69
BELANJA OPERASI	7.015.176.169,00	6.852.860.837,00	-162.315.332,00	97,69
Belanja Pegawai	5.722.860.366,00	5.568.786.204,00	-154.074.162,00	97,31
Belanja Barang dan Jasa	1.292.315.803,00	1.284.074.633,00	-8.241.170,00	99,36
PERHUBUNGAN	5.202.421.297,00	4.925.349.606,00	-277.071.691,00	94,67
Dinas Perhubungan	5.202.421.297,00	4.925.349.606,00	-277.071.691,00	94,67
BELANJA OPERASI	5.174.345.382,00	4.925.349.606,00	-248.995.776,00	95,19
Belanja Pegawai	2.702.034.636,00	2.577.403.742,00	-124.630.894,00	95,39
Belanja Barang dan Jasa	2.472.310.746,00	2.347.945.864,00	-124.364.882,00	94,97
BELANJA MODAL	28.075.915,00	0	-28.075.915,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.075.915,00	0	-28.075.915,00	0
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	7.108.684.974,00	6.829.928.269,00	-278.756.705,00	96,08
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.108.684.974,00	6.829.928.269,00	-278.756.705,00	96,08
BELANJA OPERASI	7.108.684.974,00	6.829.928.269,00	-278.756.705,00	96,08
Belanja Pegawai	2.402.969.327,00	2.271.514.587,00	-131.454.740,00	94,53
Belanja Barang dan Jasa	4.705.715.647,00	4.558.413.682,00	-147.301.965,00	96,87
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.434.736.294,00	3.253.085.843,00	-181.650.451,00	94,71
Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.434.736.294,00	3.253.085.843,00	-181.650.451,00	94,71
BELANJA OPERASI	3.434.736.294,00	3.253.085.843,00	-181.650.451,00	94,71
Belanja Pegawai	2.508.496.958,00	2.380.064.301,00	-128.432.657,00	94,88
Belanja Barang dan Jasa	926.239.336,00	873.021.542,00	-53.217.794,00	94,25
PENANAMAN MODAL	4.668.121.349,00	4.497.247.442,00	-170.873.907,00	96,34
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.668.121.349,00	4.497.247.442,00	-170.873.907,00	96,34



BAB I

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
BELANJA OPERASI	4.668.121.349,00	4.497.247.442,00	-170.873.907,00	96,34
Belanja Pegawai	2.904.818.981,00	2.766.191.093,00	-138.627.888,00	95,23
Belanja Barang dan Jasa	1.763.302.368,00	1.731.056.349,00	-32.246.019,00	98,17
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	22.008.010.111,00	21.343.212.528,00	-664.797.583,00	96,98
Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	22.008.010.111,00	21.343.212.528,00	-664.797.583,00	96,98
BELANJA OPERASI	9.004.583.785,00	8.576.858.027,00	-427.725.758,00	95,25
Belanja Pegawai	3.584.998.050,00	3.423.284.514,00	-161.713.536,00	95,49
Belanja Barang dan Jasa	3.864.585.735,00	3.613.573.513,00	-251.012.222,00	93,5
Belanja Hibah	1.555.000.000,00	1.540.000.000,00	-15.000.000,00	99,04
BELANJA MODAL	13.003.426.326,00	12.766.354.501,00	-237.071.825,00	98,18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.483.360,00	2.482.800,00	-1.000.560,00	71,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.999.942.966,00	12.763.871.701,00	-236.071.265,00	98,18
PERPUSTAKAAN	7.234.165.920,00	7.033.499.161,00	-200.666.759,00	97,23
Dinas Perpustakaan dan Arsip	7.234.165.920,00	7.033.499.161,00	-200.666.759,00	97,23
BELANJA OPERASI	4.240.064.484,00	4.068.205.067,00	-171.859.417,00	95,95
Belanja Pegawai	3.091.713.035,00	2.949.049.674,00	-142.663.361,00	95,39
Belanja Barang dan Jasa	1.148.351.449,00	1.119.155.393,00	-29.196.056,00	97,46
BELANJA MODAL	2.994.101.436,00	2.965.294.094,00	-28.807.342,00	99,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	893.589.732,00	880.852.800,00	-12.736.932,00	98,57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.465.141.500,00	1.465.141.500,00	0	100
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	635.370.204,00	619.299.794,00	-16.070.410,00	97,47
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65.337.096.167,00	52.980.764.239,00	-12.356.331.928,00	81,09
KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.651.901.495,00	11.214.185.568,00	-437.715.927,00	96,24
Dinas Perikanan	11.651.901.495,00	11.214.185.568,00	-437.715.927,00	96,24
BELANJA OPERASI	11.649.238.235,00	11.211.627.593,00	-437.610.642,00	96,24
Belanja Pegawai	2.887.913.241,00	2.763.553.211,00	-124.360.030,00	95,69
Belanja Barang dan Jasa	8.761.324.994,00	8.448.074.382,00	-313.250.612,00	96,42
BELANJA MODAL	2.663.260,00	2.557.975,00	-105.285,00	96,05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.663.260,00	2.557.975,00	-105.285,00	96,05
PERTANIAN	47.450.905.182,00	35.780.437.254,00	-11.670.467.928,00	75,41
Dinas Pertanian	47.450.905.182,00	35.780.437.254,00	-11.670.467.928,00	75,41
BELANJA OPERASI	44.191.937.237,00	32.602.660.329,00	-11.589.276.908,00	73,78
Belanja Pegawai	21.301.307.583,00	11.661.418.642,00	-9.639.888.941,00	54,75
Belanja Barang dan Jasa	22.890.629.654,00	20.941.241.687,00	-1.949.387.967,00	91,48
BELANJA MODAL	3.258.967.945,00	3.177.776.925,00	-81.191.020,00	97,51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	765.217.945,00	716.551.925,00	-48.666.020,00	93,64
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.493.750.000,00	2.461.225.000,00	-32.525.000,00	98,7
PERINDUSTRIAN	6.234.289.490,00	5.986.141.417,00	-248.148.073,00	96,02
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.234.289.490,00	5.986.141.417,00	-248.148.073,00	96,02



BAB I

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
BELANJA OPERASI	6.234.289.490,00	5.986.141.417,00	-248.148.073,00	96,02
Belanja Pegawai	3.360.051.999,00	3.229.323.603,00	-130.728.396,00	96,11
Belanja Barang dan Jasa	2.542.287.491,00	2.424.867.814,00	-117.419.677,00	95,38
Belanja Subsidi	331.950.000,00	331.950.000,00	0	100
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	148.503.893.841,00	143.557.215.125,80	-4.946.678.715,20	96,67
SEKRETARIAT DAERAH	86.497.926.200,00	85.138.603.770,00	-1.359.322.430,00	98,43
Sekretariat Daerah Kabupaten	86.497.926.200,00	85.138.603.770,00	-1.359.322.430,00	98,43
BELANJA OPERASI	83.461.392.750,00	82.277.484.120,00	-1.183.908.630,00	98,58
Belanja Pegawai	16.087.890.962,00	15.392.871.796,00	-695.019.166,00	95,68
Belanja Barang dan Jasa	66.178.051.788,00	65.713.662.324,00	-464.389.464,00	99,3
Belanja Hibah	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	0	100
Belanja Bantuan Sosial	135.450.000,00	110.950.000,00	-24.500.000,00	81,91
BELANJA MODAL	3.036.533.450,00	2.861.119.650,00	-175.413.800,00	94,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.816.533.450,00	2.741.119.650,00	-75.413.800,00	97,32
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.000.000,00	120.000.000,00	-100.000.000,00	54,55
SEKRETARIAT DPRD	62.005.967.641,00	58.418.611.355,80	-3.587.356.285,20	94,21
Sekretariat DPRD Kabupaten	62.005.967.641,00	58.418.611.355,80	-3.587.356.285,20	94,21
BELANJA OPERASI	61.732.304.841,00	58.146.403.355,80	-3.585.901.485,20	94,19
Belanja Pegawai	25.892.916.855,00	25.598.569.861,00	-294.346.994,00	98,86
Belanja Barang dan Jasa	35.839.387.986,00	32.547.833.494,80	-3.291.554.491,20	90,82
BELANJA MODAL	273.662.800,00	272.208.000,00	-1.454.800,00	99,47
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.662.800,00	272.208.000,00	-1.454.800,00	99,47
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	346.950.399.613,00	328.388.308.766,08	-18.562.090.846,92	94,65
PERENCANAAN	7.736.228.754,00	7.096.238.284,00	-639.990.470,00	91,73
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.736.228.754,00	7.096.238.284,00	-639.990.470,00	91,73
BELANJA OPERASI	7.736.228.754,00	7.096.238.284,00	-639.990.470,00	91,73
Belanja Pegawai	4.626.749.207,00	4.387.906.642,00	-238.842.565,00	94,84
Belanja Barang dan Jasa	3.109.479.547,00	2.708.331.642,00	-401.147.905,00	87,1
KEUANGAN	331.594.499.851,00	315.970.824.974,08	-15.623.674.876,92	95,29
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	321.466.116.354,00	306.646.976.951,08	-14.819.139.402,92	95,39
BELANJA OPERASI	21.530.575.937,00	19.945.085.575,08	-1.585.490.361,92	92,64
Belanja Pegawai	3.830.249.183,00	3.584.095.602,08	-246.153.580,92	93,57
Belanja Barang dan Jasa	10.251.976.754,00	9.045.823.279,00	-1.206.153.475,00	88,23
Belanja Bunga	7.448.350.000,00	7.315.166.694,00	-133.183.306,00	98,21
BELANJA MODAL	270.004.400,00	263.656.937,00	-6.347.463,00	97,65
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.004.400,00	211.120.000,00	-3.884.400,00	98,19
Belanja Modal Aset Lainnya	55.000.000,00	52.536.937,00	-2.463.063,00	95,52
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.598.521.617,00	425.045.500,00	-1.173.476.117,00	26,59
Belanja Tidak Terduga	1.598.521.617,00	425.045.500,00	-1.173.476.117,00	26,59



BAB I

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
BELANJA TRANSFER	298.067.014.400,00	286.013.188.939,00	-12.053.825.461,00	95,96
Belanja Bagi Hasil	10.781.322.000,00	5.390.661.104,00	-5.390.660.896,00	50
Belanja Bantuan Keuangan	287.285.692.400,00	280.622.527.835,00	-6.663.164.565,00	97,68
Badan Pendapatan Daerah	10.128.383.497,00	9.323.848.023,00	-804.535.474,00	92,06
BELANJA OPERASI	9.816.006.567,00	9.034.380.023,00	-781.626.544,00	92,04
Belanja Pegawai	5.272.386.065,00	4.872.450.519,00	-399.935.546,00	92,41
Belanja Barang dan Jasa	4.543.620.502,00	4.161.929.504,00	-381.690.998,00	91,6
BELANJA MODAL	312.376.930,00	289.468.000,00	-22.908.930,00	92,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	312.376.930,00	289.468.000,00	-22.908.930,00	92,67
KEPEGAWAIAN	7.619.671.008,00	5.321.245.508,00	-2.298.425.500,00	69,84
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.619.671.008,00	5.321.245.508,00	-2.298.425.500,00	69,84
BELANJA OPERASI	7.576.640.951,00	5.321.245.508,00	-2.255.395.443,00	70,23
Belanja Pegawai	3.789.736.437,00	3.584.468.577,00	-205.267.860,00	94,58
Belanja Barang dan Jasa	3.786.904.514,00	1.736.776.931,00	-2.050.127.583,00	45,86
BELANJA MODAL	43.030.057,00	0	-43.030.057,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.030.057,00	0	-43.030.057,00	0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.638.785.913,00	8.360.111.598,00	-278.674.315,00	96,77
INSPEKTORAT	8.638.785.913,00	8.360.111.598,00	-278.674.315,00	96,77
Inspektorat Daerah Kabupaten	8.638.785.913,00	8.360.111.598,00	-278.674.315,00	96,77
BELANJA OPERASI	8.638.785.913,00	8.360.111.598,00	-278.674.315,00	96,77
Belanja Pegawai	6.731.078.002,00	6.461.195.908,00	-269.882.094,00	95,99
Belanja Barang dan Jasa	1.907.707.911,00	1.898.915.690,00	-8.792.221,00	99,54
UNSUR KEWILAYAHAN	44.241.232.632,00	42.258.412.627,00	-1.982.820.005,00	95,52
KECAMATAN	44.241.232.632,00	42.258.412.627,00	-1.982.820.005,00	95,52
Kecamatan Tebing Tinggi	2.229.261.952,00	2.134.683.093,00	-94.578.859,00	95,76
BELANJA OPERASI	2.229.261.952,00	2.134.683.093,00	-94.578.859,00	95,76
Belanja Pegawai	1.902.277.622,00	1.809.982.923,00	-92.294.699,00	95,15
Belanja Barang dan Jasa	326.984.330,00	324.700.170,00	-2.284.160,00	99,3
Kecamatan Kotarih	2.193.517.377,00	2.094.888.550,00	-98.628.827,00	95,5
BELANJA OPERASI	2.193.517.377,00	2.094.888.550,00	-98.628.827,00	95,5
Belanja Pegawai	1.904.482.783,00	1.823.061.246,00	-81.421.537,00	95,72
Belanja Barang dan Jasa	289.034.594,00	271.827.304,00	-17.207.290,00	94,05
Kecamatan Dolok Masihul	3.201.750.921,00	3.042.437.840,00	-159.313.081,00	95,02
BELANJA OPERASI	3.061.751.721,00	2.902.438.640,00	-159.313.081,00	94,8
Belanja Pegawai	2.399.138.920,00	2.263.271.250,00	-135.867.670,00	94,34
Belanja Barang dan Jasa	662.612.801,00	639.167.390,00	-23.445.411,00	96,46
BELANJA MODAL	139.999.200,00	139.999.200,00	0	100
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	139.999.200,00	139.999.200,00	0	100
Kecamatan Sipispis	2.294.247.142,00	2.135.100.719,00	-159.146.423,00	93,06



BAB I

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
BELANJA OPERASI	2.294.247.142,00	2.135.100.719,00	-159.146.423,00	93,06
Belanja Pegawai	1.951.307.029,00	1.836.560.222,00	-114.746.807,00	94,12
Belanja Barang dan Jasa	342.940.113,00	298.540.497,00	-44.399.616,00	87,05
Kecamatan Perbaungan	7.304.087.744,00	7.063.643.117,00	-240.444.627,00	96,71
BELANJA OPERASI	6.697.186.744,00	6.465.623.440,00	-231.563.304,00	96,54
Belanja Pegawai	5.312.513.054,00	5.115.882.839,00	-196.630.215,00	96,3
Belanja Barang dan Jasa	1.384.673.690,00	1.349.740.601,00	-34.933.089,00	97,48
BELANJA MODAL	606.901.000,00	598.019.677,00	-8.881.323,00	98,54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.608.000,00	3.304.000,00	-3.304.000,00	50
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	600.293.000,00	594.715.677,00	-5.577.323,00	99,07
Kecamatan Pantai Cermin	2.176.516.905,00	2.123.247.292,00	-53.269.613,00	97,55
BELANJA OPERASI	2.171.678.905,00	2.118.409.292,00	-53.269.613,00	97,55
Belanja Pegawai	1.884.794.542,00	1.836.390.847,00	-48.403.695,00	97,43
Belanja Barang dan Jasa	286.884.363,00	282.018.445,00	-4.865.918,00	98,3
BELANJA MODAL	4.838.000,00	4.838.000,00	0	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.838.000,00	4.838.000,00	0	100
Kecamatan Bandar Khalifah	1.883.373.247,00	1.776.512.941,00	-106.860.306,00	94,33
BELANJA OPERASI	1.883.373.247,00	1.776.512.941,00	-106.860.306,00	94,33
Belanja Pegawai	1.598.495.230,00	1.510.621.165,00	-87.874.065,00	94,5
Belanja Barang dan Jasa	284.878.017,00	265.891.776,00	-18.986.241,00	93,34
Kecamatan Dolok Merawan	2.762.233.377,00	2.632.929.539,00	-129.303.838,00	95,32
BELANJA OPERASI	2.762.233.377,00	2.632.929.539,00	-129.303.838,00	95,32
Belanja Pegawai	2.442.401.464,00	2.354.983.986,00	-87.417.478,00	96,42
Belanja Barang dan Jasa	319.831.913,00	277.945.553,00	-41.886.360,00	86,9
Kecamatan Teluk Mengkudu	1.996.837.080,00	1.904.871.930,00	-91.965.150,00	95,39
BELANJA OPERASI	1.996.837.080,00	1.904.871.930,00	-91.965.150,00	95,39
Belanja Pegawai	1.651.147.085,00	1.577.334.755,00	-73.812.330,00	95,53
Belanja Barang dan Jasa	345.689.995,00	327.537.175,00	-18.152.820,00	94,75
Kecamatan Tanjung Beringin	2.213.582.299,00	2.135.513.013,00	-78.069.286,00	96,47
BELANJA OPERASI	2.213.582.299,00	2.135.513.013,00	-78.069.286,00	96,47
Belanja Pegawai	1.965.165.271,00	1.908.869.013,00	-56.296.258,00	97,14
Belanja Barang dan Jasa	248.417.028,00	226.644.000,00	-21.773.028,00	91,24
Kecamatan Sei Rampah	1.841.103.066,00	1.754.749.731,00	-86.353.335,00	95,31
BELANJA OPERASI	1.841.103.066,00	1.754.749.731,00	-86.353.335,00	95,31
Belanja Pegawai	1.454.787.641,00	1.372.207.437,00	-82.580.204,00	94,32
Belanja Barang dan Jasa	386.315.425,00	382.542.294,00	-3.773.131,00	99,02
Kecamatan Tebing Syahbandar	1.975.198.830,00	1.888.952.926,00	-86.245.904,00	95,63
BELANJA OPERASI	1.975.198.830,00	1.888.952.926,00	-86.245.904,00	95,63
Belanja Pegawai	1.641.924.837,00	1.564.305.934,00	-77.618.903,00	95,27
Belanja Barang dan Jasa	333.273.993,00	324.646.992,00	-8.627.001,00	97,41
Kecamatan Sei Baman	2.131.546.653,00	2.007.977.350,00	-123.569.303,00	94,2



Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
BELANJA OPERASI	2.131.546.653,00	2.007.977.350,00	-123.569.303,00	94,2
Belanja Pegawai	1.792.277.371,00	1.693.143.298,00	-99.134.073,00	94,47
Belanja Barang dan Jasa	339.269.282,00	314.834.052,00	-24.435.230,00	92,8
Kecamatan Pegajahan	3.508.503.733,00	3.377.310.540,00	-131.193.193,00	96,26
BELANJA OPERASI	3.508.503.733,00	3.377.310.540,00	-131.193.193,00	96,26
Belanja Pegawai	2.855.562.286,00	2.730.383.320,00	-125.178.966,00	95,62
Belanja Barang dan Jasa	652.941.447,00	646.927.220,00	-6.014.227,00	99,08
Kecamatan Serbajadi	2.194.411.962,00	2.090.100.727,00	-104.311.235,00	95,25
BELANJA OPERASI	2.194.411.962,00	2.090.100.727,00	-104.311.235,00	95,25
Belanja Pegawai	1.881.774.670,00	1.810.652.033,00	-71.122.637,00	96,22
Belanja Barang dan Jasa	312.637.292,00	279.448.694,00	-33.188.598,00	89,38
Kecamatan Bintang Bayu	2.508.407.443,00	2.365.238.004,00	-143.169.439,00	94,29
BELANJA OPERASI	2.508.407.443,00	2.365.238.004,00	-143.169.439,00	94,29
Belanja Pegawai	2.242.374.335,00	2.122.082.457,00	-120.291.878,00	94,64
Belanja Barang dan Jasa	266.033.108,00	243.155.547,00	-22.877.561,00	91,4
Kecamatan Silinda	1.826.652.901,00	1.730.255.315,00	-96.397.586,00	94,72
BELANJA OPERASI	1.826.652.901,00	1.730.255.315,00	-96.397.586,00	94,72
Belanja Pegawai	1.460.758.342,00	1.387.849.235,00	-72.909.107,00	95,01
Belanja Barang dan Jasa	365.894.559,00	342.406.080,00	-23.488.479,00	93,58
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	23.115.492.500,00	4.635.540.808,00	-18.479.951.692,00	20,05
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23.115.492.500,00	4.635.540.808,00	-18.479.951.692,00	20,05
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.115.492.500,00	4.635.540.808,00	-18.479.951.692,00	20,05
BELANJA OPERASI	23.105.763.000,00	4.625.940.808,00	-18.479.822.192,00	20,02
Belanja Pegawai	2.111.720.618,00	2.016.988.432,00	-94.732.186,00	95,51
Belanja Barang dan Jasa	1.612.332.335,00	1.564.646.076,00	-47.686.259,00	97,04
Belanja Hibah	19.381.710.047,00	1.044.306.300,00	-18.337.403.747,00	5,39
BELANJA MODAL	9.729.500,00	9.600.000,00	-129.500,00	98,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.729.500,00	9.600.000,00	-129.500,00	98,67

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

7. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan, secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut : (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, (2) Perimaan Pinjaman Daerah.



Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.721.956.723,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan dapat direalisasikan Rp4.721.956.723,11 (empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma sebelas rupiah) atau mencapai 100,00% (sebelum dilakukan audit BPK-RI) yang perinciannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

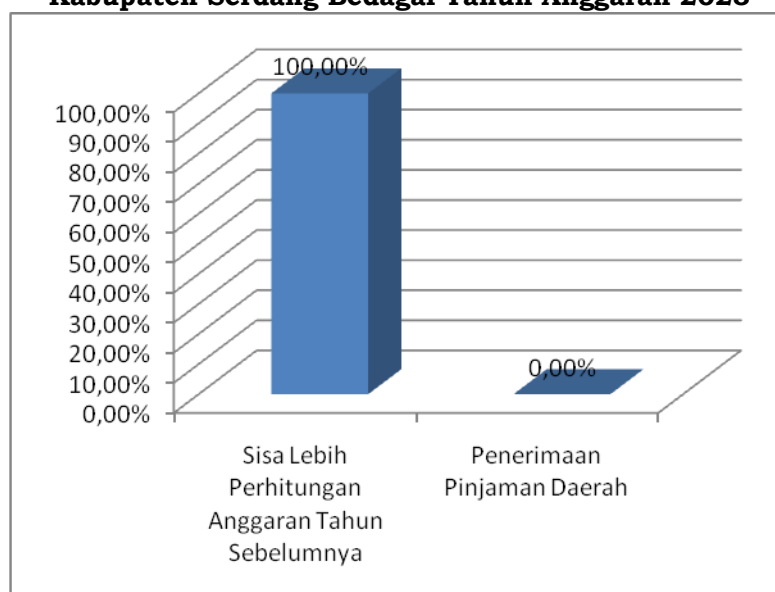
Tabel 1.18
Perincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.721.956.723,00	4.721.956.723,11	100,00%
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	#DIV/0!
	JUMLAH	4.721.956.723,00	4.721.956.723,11	100,00%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023

Grafik berikut menggambarkan capaian rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.10
Grafik Capaian Komponen Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023



a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, dianggarkan sebesar Rp4.721.956.723,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp4.721.956.723,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) atau 100,00%.

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas, Dianggarkan sebesar Rp0,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

c. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, Dianggarkan sebesar Rp36.865.674.528,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp36.865.674.528,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan rupiah) atau 100,00%.

**d. Pembiayaan Netto**

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Dianggarkan defisit sebesar Rp32.143.717.805,00 (tiga puluh dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp32.143.717.805,00 (tiga puluh dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima rupiah) atau 0,00%

e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

SiLPA (dengan i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, dan dapat terealisasi sebesar Rp59.379.041.837,38 (lima puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma tiga delapan rupiah).

Tabel 1.19
Perincian Penerimaan Pembiayaan Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PEMBIAYAAN DAERAH	41.587.631.251,00	41.587.631.251,11	100,00%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.721.956.723,00	4.721.956.723,11	100,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.721.956.723,00	4.721.956.723,11	100,00%
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.865.674.528,00	36.865.674.528,00	100,00%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.865.674.528,00	36.865.674.528,00	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO	(32.143.717.805,00)	(32.143.717.805,00)	0
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	59.379.041.837,38	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Serdang Bedagai, 2023



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun 2023, perekonomian Indonesia melanjutkan arah pemulihan seiring pandemic Covid-19 yang sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang sudah menjangkau populasi di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari bayang-bayang krisis dan menjalankan proses normalisasi secara bertahap.

Selain pemulihan ekonomi, hal yang perlu dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengonsumsi barang ataupun jasa.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, maka dana transfer pusat ke daerah mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan Pendapatan secara Nasional. Sehingga Pemerintah Daerah perlu membuat kebijakan dalam tahap penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah



- 2) Pendapatan Transfer bersumber dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat,
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari :
 - a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

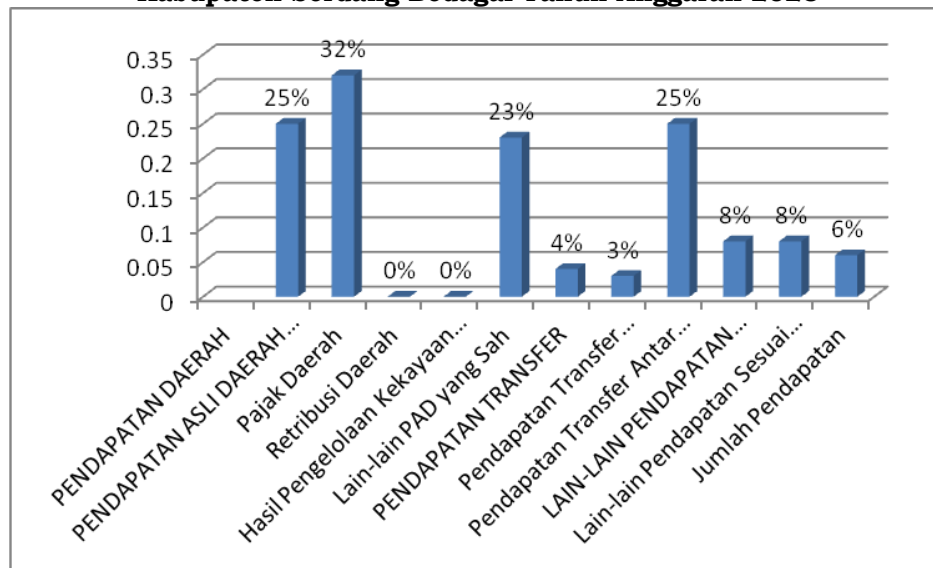
Dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 pendapatan daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang semula sebesar Rp1.674.842.938.494,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) mengalami perubahan menjadi Rp1.768.951.630.690,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau mengalami penambahan 6.00%. Rincian lebih lanjut mengenai pendapatan daerah di uraikan sebagai berikut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156,613,220,000	195,840,274,591	39,227,054,591	25%
Pajak Daerah	96,269,765,000	126,621,649,604	30,351,884,604	32%
Retribusi Daerah	11,543,455,000	11,543,455,000	-	0%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,800,000,000	10,800,000,000	-	0%
Lain-lain PAD yang Sah	38,000,000,000	46,875,169,987	8,875,169,987	23%
PENDAPATAN TRANSFER	1,497,660,902,494	1,550,828,528,127	53,167,625,633	4%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,430,460,610,000	1,466,934,148,817	36,473,538,817	3%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	67,200,292,494	83,894,379,310	16,694,086,816	25%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20,568,816,000	22,282,827,972	1,714,011,972	8%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20,568,816,000	22,282,827,972	1,714,011,972	8%
Jumlah Pendapatan	1,674,842,938,494	1,768,951,630,690	94,108,692,196	6%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Serdang Bedagai 2023

Gambar 2.1
Grafik Capaian Komponen Pendapatan
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Serdang Bedagai 2023

Belanja Daerah mempunyai peran ril dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah menjadi komponen yang cukup berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas.

Setelah Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, maka dilakukan perubahan signifikan terhadap kebijakan Belanja Daerah. Perkiraan penurunan Pendapatan Daerah akibat melemahnya perekonomian menyebabkan fokus belanja daerah lebih diarahkan Dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 belanja daerah lebih diarahkan kepada Penanganan Urusan Kesehatan sebagai akibat penyebarang virus Covid-19 dan penyelamatan perekonomian. Belanja Kabupaten Serdang Bedagai yang semula sebesar Rp1.677.977.263.966,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) mengalami perubahan menjadi Rp1.736.807.912.885,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus dua



belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) atau mencapai 4,00%. Rincian lebih lanjut mengenai belanja daerah di uraikan sebagai berikut dalam tabel.

Tabel 2.2
Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

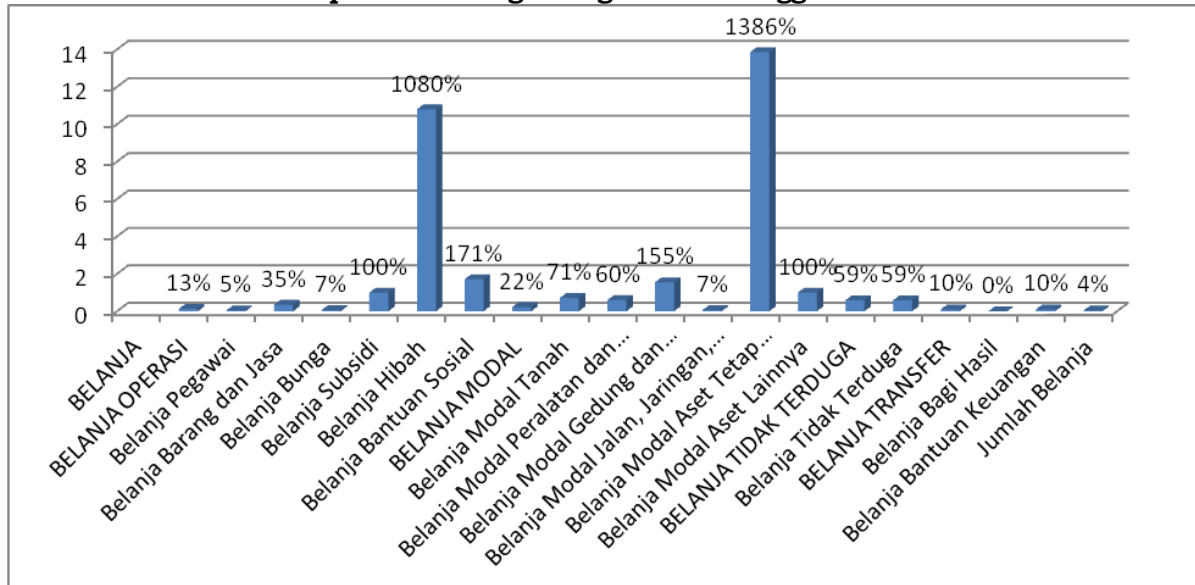
Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
BELANJA				
BELANJA OPERASI	982,438,405,190	1,109,937,028,216	127,498,623,026	13%
Belanja Pegawai	635,874,510,432	602,182,125,292	(33,692,385,140)	5%
Belanja Barang dan Jasa	334,254,588,458	449,591,142,877	115,336,554,419	35%
Belanja Bunga	8,000,000,000	7,448,350,000	(551,650,000)	7%
Belanja Subsidi	-	331,950,000	331,950,000	100%
Belanja Hibah	4,259,306,300	50,248,010,047	45,988,703,747	1080%
Belanja Bantuan Sosial	50,000,000	135,450,000	85,450,000	171%
BELANJA MODAL	419,808,509,359	327,205,348,652	(92,603,160,707)	22%
Belanja Modal Tanah	9,745,870,000	2,838,316,453	(6,907,553,547)	71%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197,708,665,933	78,134,708,718	(119,573,957,215)	60%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,183,780,446	64,111,957,716	38,928,177,270	155%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	186,553,033,500	172,895,017,621	(13,658,015,879)	7%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	617,159,480	9,170,348,144	8,553,188,664	1386%
Belanja Modal Aset Lainnya	-	55,000,000	55,000,000	100%
BELANJA TIDAK TERDUGA	3,864,731,217	1,598,521,617	(2,266,209,600)	59%
Belanja Tidak Terduga	3,864,731,217	1,598,521,617	(2,266,209,600)	59%
BELANJA TRANSFER	271,865,618,200	298,067,014,400	26,201,396,200	10%
Belanja Bagi Hasil	10,781,322,000	10,781,322,000	-	0%
Belanja Bantuan Keuangan	261,084,296,200	287,285,692,400	26,201,396,200	10%
Jumlah Belanja	1,677,977,263,966	1,736,807,912,885	58,830,648,919	4%
Total Surplus(Defisit)	(3.134.325.472)	32.143.717.805	35.278.043,277	-1126%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Serdang Bedagai 2023



Grafik berikut menggambarkan capaian rincian Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar 2.2
Grafik Capaian Komponen Belanja
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Serdang Bedagai 2023

Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) menjadi sebesar Rp4.721.956.723,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Pengeluaran Pembiayaan, Alokasi Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh Tempo Rp36.865.674.528,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).



Tabel 2.3
Pembiayaan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40,000,000,000	4,721,956,723	(35,278,043,277)	88%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40,000,000,000	4,721,956,723	(35,278,043,277)	88%
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	0%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40,000,000,000	4,721,956,723	(35,278,043,277)	88%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36,865,674,528	36,865,674,528	-	0%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36,865,674,528	36,865,674,528	-	0%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36,865,674,528	36,865,674,528	-	0%
Pembiayaan Netto	3,134,325,472	(32,143,717,805)	(35,278,043,277)	1126%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	0%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Serdang Bedagai 2023



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.1.1

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1. Dinas Pendidikan					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Pendidikan	Poin	0.6477	0.6461	99.75
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.74	8.85	101.26
3	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	12.83	12.64	98.52
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	APK PAUD Usia 5-6 tahun	%	71	70	98.59
3	APS PAUD 5-6 Tahun	%	100	71.37	71.37
4	Proporsi PAUD Terakreditasi minimal B	%	12.92	17.75	137.38
5	APK SD/MI Sederajat	%	113.3	105.28	92.92
6	APK SMP/MTs Sederajat	%	105	109.94	104.7
7	APM SD/MI/ Sederajat	%	99.4	92.94	93.5



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
8	APM SMP/MTs/Sederajat	%	85.8	77.06	89.81
9	APS Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	%	100	98.36	98.36
10	Nilai Asesmen Kompetensi Literasi SD	%	52.64	67.28	127.81
11	Nilai Asesmen Kompetensi Numerasi SD	%	39.52	61.72	156.17
12	Nilai Survei Karakter Siswa SD	%	50	58.74	117.48
13	Nilai Asesmen Kopetensi Literasi SMP	%	61.05	64.26	105.26
14	Nilai Asesmen Kopetensi Nurmerasi SMP	%	60.47	60.36	99.82
15	Nilai Survei Karakter Siswa SMP	%	50	53.7	107.4
16	Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	77	26.3	34.16
17	Persentase sekolah yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	100
18	Persentase Pendidik yang bersertifikat	%	51	47.51	93.16
19	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat kepala sekolah	%	54	33	61.11
20	Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D4	%	83	48.65	58.61
21	Ratio Pengawas dan penilik PAUD	%	3.2	1.85	57.81
22	Persentase rekomendasi perizinan pendidikan yang dikeluarkan	%	0	0	100
23	Persentase Bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan	%	0	0	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PENDIDIKAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.0.00 .0.00.01. 0000	DINAS PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB		
				1.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB		
				1.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	2600	2600		
				1.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB		
				1.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1		
				1.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
					Output: Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Paket	1	1			
				1.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
					Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12			
				1.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
					Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	4			
				1.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
					Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Dokumen	12	12			
				1.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
					Output: Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	80			
				1.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					Output: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB			
				1.01.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
						Output: Terselenggarannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	24	24			
					1.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB			
					1.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12			
					1.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	13	13			
					1.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	12			
					1.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12			
					1.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					1.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa						
						Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	2			
					1.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	5			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.0.00 .0.00.01. 0000	DINAS PENDIDIKAN		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
						Outcome: Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.74	8.85			
						Outcome: APK PAUD Usia 5-6 Tahun	%	71	70			
						Outcome: APK SD/MI Sederajat	%	113.3	105.28			
						Outcome: Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang	%	77	75			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
						Outcome: Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	35	55.34			
						Outcome: Persentase alokasi anggaran belanja modal untuk pembiayaan sarana prasarana pendidikan	%	8	14			
						Outcome: Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (Sekolah Mantab)	%	30	34			
						Outcome: Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%	50	52.8			
						Outcome: APM SD/MI/Sederajat	%	99.4	92.94			
						Outcome: APM SMP/MTs/Sederajat	%	85.8	77.06			
						Outcome: Persentase Pendidik yang bersertifikat	%	51	47			
					1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
						Output: APK SD/MI Sederajat	%	113.3	105.28			
						Output: APM SD/MI Sederajat	%	99.4	92.94			
						Output: Persentase siswa dengan nilai Asesmen	%	35	55.34			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
						Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum						
						Output: Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%	50	52.8			
						Output: Persentase alokasi anggaran belanja modal untuk pembiayaan sarana prasarana pendidikan	%	8	14			
						Output: Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (Sekolah Mantab)	%	30	34			
					1.01.02.2.. 01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						
						Output: Terlaksananya Pembangunan Laboraturium Sekolah	Ruang	31	31			
					1.01.02.2.0 1.02	Penambahan Ruang Kelas Baru						
						Output: Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	12	12			
					1.01.02.2.0 1.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Output: Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	9	9			
					1.01.02.2.0 1.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
						Output: Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	18	18			
					1.01.02.2.0 1.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						
						Output: Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	6	6			
					1.01.02.2.0 1.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Output: Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	31	31			
					1.01.02.2.0 1.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas						
						Output: Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang	58	58			
					1.01.02.2.0 1.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Output: Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	4	4			
					1.01.02.2.0 1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						
						Output: Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1	1			
					1.01.02.2.0 1.12	Rehabilitasi Sedan/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
						Output: Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
				1.01.02.2.0 1.14						
				1.01.02.2.0 1.21						
				1.01.02.2.0 1.22						
				1.01.02.2.0 1.24						
				1.01.02.2.0 1.26						
				1.01.02.2.0 1.28						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
				dan Manajemen Sekolah	an					
				1.01.02.2.0 1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
					Output: Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidik an	600	600		
				1.01.02.2.0 1.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
					Output: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar	Orang	333	333		
				1.01.02.2.0 1.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
					Output: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan	Orang	100	100		
				1.01.02.2.0 2.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah					
					Output: Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	3	3		
				1.01.02.2.0 2.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					
					Output: Jumlah Personil Peserta Didik yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2284	2284		
				1.01.02.2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pertama						
						Output: APK SMP/MTs Sederajat	%	97.4	109.94			
						Output: APM SMP/MTs Sederajat	%	85.8	77.06			
						Output: Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	35	55.34			
						Output: Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%	50	52.8			
						Output: Persentase alokasi anggaran belanja modal untuk pembiayaan sarana prasarana pendidikan	%	8	14			
						Output: Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (Sekolah Mantab)	%	30	34			
					1.01.02.2.0 2.02	Penambahan Ruang Kelas Baru						
						Output: Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	14	14			
					1.01.02.2.0 2.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						
						Output: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
				1.01.02.2.0 2.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						
					Output: Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	7	7			
				1.01.02.2.0 2.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						
					Output: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	1			
				1.01.02.2.0 2.06	Pembangunan Laboratorium						
					Output: Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah	Ruang	6	6			
				1.01.02.2.0 2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
					Output: Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	22	22			
				1.01.02.2.0 2.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						
					Output: Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	20	20			
				1.01.02.2.0 2.25	Pengadaan Mebel Sekolah						
					Output: Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	14	14			
				1.01.02.2.0 2.35	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa						
					Output: Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	4	4			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
					1.01.02.2.0 2.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
						Output: Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidik an	42	42			
					1.01.02.2.0 2.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						
						Output: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	30	30			
					1.01.02.2.0 2.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
						Output: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	84	84			
					1.01.02.2.0 2.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						
						Output: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	42	42			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					1.01.02.2.0 2.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						
						Output: Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	93	93			
					1.01.02.2.0 2.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1			
					1.01.02.2.0 2.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						
						Output: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan	Orang	350	350			
					1.01.02.2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
						Output: APK PAUD Usia 5-6 Tahun	%	71	70			
					1.01.02.2.0 3.02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD						
						Output: Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	5	5			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
					1.01.02.2.0 3.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						
						Output: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1			
					1.01.02.2.0 3.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						
						Output: Jumlah Personil Peserta Didik yang Menerima Biaya Personel Peserta Didik	Peserta Didik	1000	1000			
					1.01.02.2.0 3.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD						
						Output: Terlaksananya Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidik an	10	10			
					1.01.02.2.0 3.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						
						Output: Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidik an	347	347			
					1.01.02.2.0 3.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD						
						Output: Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidik an	400	400			
					1.01.02.2.0 3.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						
						Output: Jumlah peserta bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas	Dokumen	1	1			



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2. Dinas Kesehatan					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Kesehatan	Poin	0.768	0.82	106.77
2	Umur Harapan Hidup(UHH)	tahun	69.92	73.11	104.56
3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin	3.9	3.58	91.79
4	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin	81	93.67	115.64
5	Angka Kematian Ibu (AKI)	100000 KH	55	87	63.22
6	Angka Kematian Bayi(AKB)	1000 KH	2	3	150
7	Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	MADYA	Madya	100
8	Akreditasi Puskesmas	Predikat	MADYA	Paripurna	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	74.1	74.1
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	80.4	80.4
3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	84.2	84.2
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	99.1	99.1
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	%	100	71	71
7	Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	%	100	91.9	91.9
8	Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	107	107
9	Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Militus	%	100	115	115



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
10	Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	%	100	67.7	67.7
11	Cakupan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100	55.8	55.8
12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100	81.45	81.45
13	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi sesuai Standar	%	10	14.9	149
14	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Aktif	%	25	15.24	60.96
15	Persentase Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	40	40	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KESEHATAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	A	A		
				1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	2	2		
				1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
					Output: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1		
				1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
					Output: Laporan Capaian Kinerja yang berkualitas	Dokumen	1	1		
				1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	0		
				1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	laporan	12	12	
				1.02.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	
				1.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
						Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	
				1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
						Output: persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	100	84	
				1.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	
				1.02.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	
				1.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				1.02.01.2.06.05						
				1.02.01.2.06.06						
				1.02.01.2.06.09						
				1.02.01.2.08						
				1.02.01.2.08.01						
				1.02.01.2.08.02						
				1.02.01.2.08.04						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				1.02.01.2. 09	Umum Kantor yang disediakan					
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Output: persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	100	85		
				1.02.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa					
					Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1		
				1.02.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at					
					Output: Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7		
				1.02.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
					Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1		
				1.02.02.2. 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					1.02.02.2. 01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
						Output: Jumlah prasarana kesehatan yang disediakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan	Unit	3	3		
					1.02.02.2. 01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
						Output: Jumlah jenis alat kesehatan yang disediakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan	jenis	5	5		
					1.02.02.2. 01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai					
						Output: Persentase bahan habis pakai yang disediakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan	%	100	100		
					1.02.02.2. 01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
						Output: Persentase alat kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan	%	25	25		
					1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
					1.02.02.2. 02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					
						Output: Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	%	70	70		
					1.02.02.2. 02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian					



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin					
					Output: Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	%	100	100		
				1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Pusk					
					Output: Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas	20	20		
				1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
					Output: Persentase jenis layanan UKM dan UKP yang tersedia di Puskesmas yang memenuhi pelayanan sesuai standart	%	30	70		
				1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
					Output: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	600	600		
				1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
					Output: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	600	64		
				1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	250	0	
				1.02.02.2.02.04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				
						Output: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	350	350	
				1.02.02.2.02.05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
						Output: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	600	600	
				1.02.02.2.02.06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
						Output: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	650	203	
				1.02.02.2.02.07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				
						Output: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	550	550	
				1.02.02.2.02.08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
						Output: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	250	250	
				1.02.02.2.02.09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	250	250			
					1.02.02.2. 02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
						Output: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	25	25			
					1.02.02.2. 02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
						Output: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	150	0			
					1.02.02.2. 02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						
						Output: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	150	150			
					1.02.02.2. 02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	%	100	7			
					1.02.02.2. 02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	%	2,4	1			
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
				Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1			
				1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
				Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1			
				1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						
				Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1			
				1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
				Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	0			
				1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						
				Output: Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	dokumen	1	0			
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
				Output: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				1.02.02.2.02.26						
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan	dokumen	12	8		
				1.02.02.2.02.33						
					Operasional Pelayanan Puskesmas					
					Output: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	20	20		
				1.02.02.2.02.38						
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					
					Output: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	1		
				1.02.02.2.03						
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					
					Output: Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan	puskesmas	20	20		
				1.02.02.2.03.01						
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					
					Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	dokumen	1	1		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
					Outcome: Persentase Tenaga Kesehatan sesuai standart	Orang	132	75		
				1.02.03.2.03						
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi					



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)						
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, u						
				Output: Persentase industri rumah tangga yang memiliki izin produksi rumah tangga	%	85	85			
				1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah						
				Output: Jumlah Dokumentasi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen	1	1			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
				Outcome: persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat bidang masyarakat	%	45	45			
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Output: jumlah kecamatan sehat	kecamatan	9	9			
				1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						
				Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	9	9			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupat						
				Output: Jumlah UKBM yang terlibat dalam peningkatan pelayanan kesehatan	%	55	96			
				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat						
				Output: Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	UKBM	100	53			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	RSUD SULTAN SULAIMAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Outcome: Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal	Predikat	A	A			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Output: Persentase Manajemen Administrasi	%	100	104			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Umum dan Kepegawaian yang Terkelola dengan baik						
				1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
					Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	%	100	50		
				1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					
					Output: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang BLUD	0	0	34		
				1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
					Output: Terlaksananya Pelayanan & Penunjang BLUD	Unit Kerja	1	1		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	RSUD SULTAN SULAIMAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
					Outcome: Persentase upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terpenuhi	%	100	85		
				1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
					Output: Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	50	98		
				1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit					
					Output: Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	gedung	2	2		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				1.02.02.2.01.07						
				1.02.02.2.01.07						
				1.02.02.2.01.08						
				1.02.02.2.01.08						
				1.02.02.2.01.13						
				1.02.02.2.01.13						
				1.02.02.2.01.14						
				1.02.02.2.01.14						
				1.02.02.2.01.16						
				1.02.02.2.01.16						
				1.02.02.2.01.20						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Terpeliharanya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Lainnya	unit	32	26			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0	RSUD SULTAN SULAIMAN		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
						Outcome: Jumlah SDM kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	132	75			
					1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Data yang dibutuhkan	%	65	57			
					1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	40	40			



BAB III

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Poin	0.71	0.69	97.18
2	Persentase infrastruktur bina marga dalam kondisi baik	%	58.2	54.07	92.9
3	Persentase infrastruktur sumber daya air dalam kondisi baik	%	80	83.76	104.7
4	Persentase ketataan terhadap tata ruang	%	77	87.96	114.23
5	Persentase rumah tangga memperoleh kebutuhan pokok keciptakaryaan	%	74.03	52.77	71.28
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	80	83.76	104.7
3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum perpipaan	%	15.55	5.86	37.68
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	73.74	70.79	96
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	79.83	79.59	99.7
6	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	%	36	17.25	47.92
7	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi standar teknis	%	77	77.32	100.42
8	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisin Mantap	%	60	64.61	107.68
9	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	62	45.27	73.02
10	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	84	90.62	107.88



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00. 0.00.01.0 000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai saki peragkat daerah	Predikat	BB	BB		
				1.03.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Terlaksananya Penyusunan dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	15	15		
				1.03.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	8		
				1.03.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
					Output: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	laporan	6	6		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
					1.03.01.2 .01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
					Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	1			
					1.03.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
					Output: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tahun	1	1			
					1.03.01.2 .02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	58	60			
					1.03.01.2 .05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
					Output: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tahun	1	1			
					1.03.01.2 .05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
					Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	orang	188	188			
					1.03.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
					Output: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun	1	1			
					1.03.01.2 .06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1			
					1.03.01.2 .06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
					Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2			
					1.03.01.2 .06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
					Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2			
					1.03.01.2 .06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
					Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2			
					1.03.01.2 .06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
					Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1			
					1.03.01.2 .07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					1.03.01.2 .07.05 Pengadaan Mebel						
					Output: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1	1			
					1.03.01.2 .07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	7	7			
					1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	1	1			
					1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	2			
					1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	7	7			
					1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1			
					1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tahun	1	1			
					1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	19	19			
					1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						
						Output: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	6	6			
					1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	9			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
						Outcome: Persentase Jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	80	83.76			
					1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupate						
						Output: Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	bendungan	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
				1.03.02.2 .01.05 Pembangunan Bendungan						
				Output: Jumlah Bendungan yang Dibangun	bendungan	1	1			
				1.03.02.2 .02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di						
				Output: Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	meter	11100	9640			
				1.03.02.2 .02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						
				Output: Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	dokumen	9	3			
				1.03.02.2 .02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						
				Output: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	meter	1700	453.5			
				1.03.02.2 .02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						
				Output: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	meter	6200	8765			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						
						Output: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	meter	1200	421			
					1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						
						Output: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	meter	2000	47317			
3	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
						Outcome: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	73,74	70.79			
						Outcome: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum perpipaan	%	5.86	5.86			
					1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	unit	7	7			
					1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	liter/detik	10	24			
					1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan						
						Output: Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	unit	7	7			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
						Outcome: Persentaserumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	79,83	79.59			
					1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						
					1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman						
						Output: Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	rumah tangga	350	350			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		TATA RUANG									
						Outcome: Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	36	17.25			
					1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabu						
						Output: Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	tahun	1	1			
					1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						
						Output: Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	dokumen	5	3			
					1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						
						Output: Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	meter	345	2172			
					1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan						
						Output: Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	meter	110	349			
					1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	meter	193	943			
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
						Outcome: Persentase bangunan daerah dalam kondisi baik	%	78	77.32			
					1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan						
						Output: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	tahun	1	1			
					1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenag						
						Output: Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta	dokumen	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Implementasi SIMBG						
				1.03.08.2 .01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						
				Output: Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4	3			
				1.03.08.2 .01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						
				Output: Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	unit	5	6			
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00. 0.00.01.0 000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
				Outcome: Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	60	64.61			
				Outcome: Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	62	45.27			
				1.03.10.2 .01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	meter	43100	64898			
					1.03.10.2 .01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Pen						
					Output: Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	dokumen	6	6			
					1.03.10.2 .01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan						
					Output: Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2	3000	5869			
					1.03.10.2 .01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan						
					Output: Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	dokumen	2	1			
					1.03.10.2 .01.05 Pembangunan Jalan						
					Output: Panjang Jalan yang Dibangun	meter	23600	34269			
					1.03.10.2 .01.08 Rekonstruksi Jalan						
					Output: Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	meter	16900	31360			
					1.03.10.2 .01.09 Rehabilitasi Jalan						
					Output: Panjang Jalan yang Direhabilitasi	meter	1000	425			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan						
						Output: Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	meter	1600	5571			
					1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan						
						Output: Panjang Jembatan yang Dibangun	meter	42	32			
					1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan						
						Output: Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	meter	45	91			
					1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan						
						Output: Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	meter	30	32			
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
						Outcome: Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	84	90.62			
					1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						
						Output: Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	dokumen	2	2			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota						
					Output: Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	2	2			
					1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						
					Output: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	2	2			
					1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota						
					Output: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	2	2			
					1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						
					Output: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	tahun	1	1			
					1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						
					Output: Jumlah Dokumen Koordinasi dan	dokumen	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	poin	52.05	53.54	102.86
2	Indeks rumah layak huni	Poin	53.44	58.56	109.58
3	Indeks permukiman layak huni	Poin	50.66	48.52	95.78
4	Persentase Pengelolaan Pertanahan Yang Baik	100	100	100	100
5	Persentase Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	100	100	100	100
6	Persentase Mediasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Yang Dilaksanakan	%	100	100	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	100
2	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	%	100	100	100
3	Persentase Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	%	100	100	100
4	Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani	%	0.55	0.65	118.18
5	Persentase PSU Perumahan dengan kondisi baik	%	71	71	100
6	Indeks PSU Permukiman dengan Kondisi baik	Poin	67.66	67.55	99.84
7	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	%	0.76	13.35	1756.58
8	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	%	12.99	20.88	160.74
9	Persentase Penyediaan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	%	100	100	100
10	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan melalui Mediasi	%	100	100	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.2.10.0 .00.02.000 0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	A		
				1.04.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun	1	1		
				1.04.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bu lan	25	25		
				1.04.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	1	1		
				1.04.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				1.04.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1		
				1.04.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
					Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1		
				1.04.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
					Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1		
				1.04.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
					Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1		
				1.04.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
					Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket	1	1		
				1.04.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Output: Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	1		
				1.04.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	
				1.04.01.2 .08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Laporan	12	12	
				1.04.01.2 .09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
						Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Tahun	1	1	
				1.04.01.2 .09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa				
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	3	3	
				1.04.01.2 .09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
						Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	
				1.04.01.2 .09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
						Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	27	27	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.2.10.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
						Outcome: Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	%	0,56	0,65			
						Outcome: Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	%	12,99	20,88			
					1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
						Output: Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 Ha	dokumen	1	1			
					1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh						
						Output: Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	dokumen	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.2.10.0 .00.02.000 0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
						Outcome: Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi Baik	%	71	71			
						Outcome: Indeks PSU Permukiman dalam Kondisi Baik	%	67,66	67			
					1.04.05.2 .01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						
						Output: Jumlah Penyelenggaraan PSU Perumahan	%	100	100			
					1.04.05.2 .01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						
						Output: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	30	30			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2. Satuan Polisi Pamong Praja					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	0.9	0.975	108.33
2	Persentase kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	90	95	105.56
3	Persentase pelayanan pemadam kebakaran dan non Kebakaran	%	100	100	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	%	100	100	100
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	85	90	105.88
4	Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran	%	100	100	100
5	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	%	20	20	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan non kebakaran	%	100	100	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00 .0.00.01. 0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB		
				1.05.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100		
				1.05.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	1	1		
				1.05.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0		
				1.05.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	%	100	100		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						yang disediakan				
				1.05.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bul an	20	20		
				1.05.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1		
				1.05.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Cakupan Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	%	100	100		
				1.05.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		
				1.05.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		
				1.05.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
					Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						yang Disediakan						
					1.05.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Penyediaan Bahan Logistik selama setahun	Paket	1	0			
					1.05.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1			
					1.05.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5			
					1.05.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	5			
					1.05.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	%	100	100			
					1.05.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1			
					1.05.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1			
					1.05.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12			
					1.05.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100			
					1.05.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1			
					1.05.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan						



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					1.05.02.2 .01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	%	100	100			
					1.05.02.2 .01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan						
						Output: Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	30	30			
					1.05.02.2 .01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pene						
						Output: Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	3	3			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					1.05.02.2 .01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						
						Output: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1			
					1.05.02.2 .02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						
						Output: Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	85	90			
					1.05.02.2 .02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	1	1			
					1.05.02.2 .02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12			
					1.05.02.2 .02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						
						Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	2	2			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00 .0.00.01. 0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
						Outcome: Persentase pelayanan pemadam kebakaran	%	100	100			
						Outcome: Persentase pelayanan non kebakaran	%	100	100			
						Outcome: Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	%	20	20			
					1.05.04.2 .01	Pencegahan, Pengendalian,						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebaka						
						Output: Persentase Penanganan Bahaya Kebakaran	%	100	100			
					1.05.04.2 .01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12			
					1.05.04.2 .01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	1	1			
					1.05.04.2 .02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						
						Output: Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi yang dilaksanakan	%	100	100			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					1.05.04.2 .02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						
						Output: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	1			
					1.05.04.2 .04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						
						Output: Persentase Pembentukan Relawan di desa/ Kelurahan	%	20	20			
					1.05.04.2 .04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						
						Output: Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	48	48			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
3. Dinas Sosial					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Persentase PMKS yang ditangani	%	10.9	10.9	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	A	100
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	%	19.93	19.93	100
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100
4	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100
5	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100
6	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100
7	Bantuan social ekonomi produktif bagi fakir miskin	KPM	10	10	100
8	Jumlah korban bencana alam dan bencana social yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Jiwa	400	0	0



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS SOSIAL										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.0.00.0 .00.01.000 0	DINAS SOSIAL		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
						Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	A	
					1.06.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Output: Jumlah Administrasi Keuangan yang Tersedia	Dokumen	2	2	
					1.06.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	16	16	
					1.06.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	
					1.06.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
						Output: Jumlah Administrasi Umum yang Tersedia	Dokumen	7	7	
					1.06.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					1.06.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dsedikan	Paket	1	1			
					1.06.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dsedikan	Paket	1	1			
					1.06.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dsedikan	Paket	1	1			
					1.06.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dsedikan	Paket	1	1			
					1.06.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang- undangan yang Dsedikan	Dokumen	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					1.06.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1			
					1.06.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Dokumen	1	1			
					1.06.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1			
					1.06.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Jumlah Dokumen Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia	Dokumen	2	2			
					1.06.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						
					1.06.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	4			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.0.00.0 .00.01.000 0	DINAS SOSIAL		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
						Outcome: Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan	%	19.93	19.93			
					1.06.02.2. 03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuannya	%	19.93	19.93			
					1.06.02.2. 03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Orang yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	69	69			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota						
					1.06.02.2. 03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	17	16			
					1.06.02.2. 03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupate						
						Output: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga	2	2			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.0.00.0 .00.01.000 0	DINAS SOSIAL		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
						Outcome: Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti.	%	10.9	10.9			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					1.06.04.2. 01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, s						
						Output: Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	10.9	10.9			
					1.06.04.2. 01.01	Penyediaan Permakanan						
						Output: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standart Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	1700	1700			
					1.06.04.2. 01.03	Penyediaan Alat Bantu						
						Output: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	10	10			
					1.06.04.2. 02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100			
					1.06.04.2. 02.03	Penyediaan Permakanan						
						Output: jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabuoatan/kota	orang	4600	4600			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.0.00.0 .00.01.000 0	DINAS SOSIAL		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
						Outcome: Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdata dalam DTKS	%	81	81			
					1.06.05.2. 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola Cakupan Kabupaten/ Kota	Keluarga	75233	75233			
					1.06.05.2. 02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan	Keluarga	75233	75233			



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota						
					1.06.06.2. 01.02	Penyediaan Sandang						
						Output: Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota yang	orang	235	0			



3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.1.2
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1. Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Jumlah koperasi yang mempunyai sertifikat nomor induk koperasi(SNIK)	koperasi	7	27	385.71
2	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	usaha mikro	20	32	160
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	69.75	67.59	96.9
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	koperasi	2	4	200
2	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	koperasi	2	4	200
3	Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	koperasi	6	38	633.33
4	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi	orang	6	75	1250
5	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	koperasi	3	70	2333.33
6	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitas pelatihan	usaha mikro	45	67	148.89
7	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	usaha mikro	350	400	114.29
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	0



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
9	Persentase tenaga kerja bersertifikat	%	20	7.9	39.5
10	Jumlah Tenaga kerja yang terlatih	orang	112	303	270.54
11	Jumlah tenaga kerja yang bekerja	orang	296.683	293.574	98.95
12	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	70	70	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.17.2.07 .3.32.16. 0000	DINAS KETENAGAKER JAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai saki perangkat daerah	predikat	BB	BB		
				2.07.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah administrasi keuangan yang tersedia	laporan	1	1		
				2.07.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	19	16		
				2.07.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	1	1		
				2.07.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah administrasi umum yang tersedia	paket	1	1		
				2.07.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	dokumen	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						perundang-undangan yang disediakan						
					2.07.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	1	1			
					2.07.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang pemerintahdaerah yang tersedia	dokumen	1	1			
					2.07.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	paket	1	1			
					2.07.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Output: Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah laporan penyediaan	laporan	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				
				2.07.01. 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
						Output: Jumlah dokumen jasa pemeliharaan disediakan barang milik daerah yang tersedia	dokumen	1	1	
				2.07.01. 2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at				
						Output: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	1	1	
				2.07.01. 2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
						Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	25	15	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.17.2.07 .3.32.16. 0000	DINAS KETENAGAKER JAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
						Outcome: Jumlah tenaga kerja yang bekerja	orang	1500	1103	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				2.07.04. 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					
					Output: terselenggaranya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	kegiatan	1	1		
				2.07.04. 2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					
					Output: Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui online (karir hub)	orang	500	1103		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.17.2.07 .3.32.16. 0000	DINAS KETENAGAKER JAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
					Outcome: Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur skala upah dan terdaftar pesertaBPJS ketenagakerjaan)	persen	70	0		
				2.07.05. 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan d					
					Output: Terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan	lembaga	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan						
					2.07.05. 2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah LKS tripartit yang dibina	lembaga	1	1			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2.07 .3.32.16. 0000	DINAS KETENAGAKER JAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
						Outcome: Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	koperasi	0	25			
					2.17.05. 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K						
						Output: Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	orang	25	25			
					2.17.05. 2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Kompetensi SDM Koperasi						
						Output: Jumlah SDM koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian	orang	25	25			
					2.17.05. 2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah pelaku usaha mikro yang memahami pengetahuan usaha mikro	usaha mikro	45	30			
					2.17.05. 2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro						
						Output: Jumlah usaha mikro yang diberi pemahaman pelatihan	usaha mikro	45	30			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Persentase desa layak anak yang terbentuk	%	20.16	18.93	93.9
2	Cakupan Keluarga Sejahtera	%	45	38	84.44
3	Penurunan Total Fertility Rate (FTR)	nilai	2.77	2.39	115.9
4	Cakupan Peserta KB Aktif	%	76	78.83	103.72
5	Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	72	100	138.89
6	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Poin	66.05	65.98	99.89
7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	4.55	4.37	96.04
8	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	37	36.96	99.89
9	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0.0032	0.0035	91.43
10	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0.0112	0.0147	76.19
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%	0.5	0.49	98
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100
3	Jumlah Wirausaha Baru Pada Desa Prima dalam peningkatan ekonomi keluarga	Jenis	1	2	200
4	Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersedia	%	1	1	100
5	Persentase Terpenuhinya 5 (Lima) klaster Hak Anak	%	67	67	100



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan layanan komprehensi	%	100	100	100
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	100
8	Tersedianya dokumen kependudukan	dokumen	1	1	100
9	Jumlah kesertaan berKB	Akseptor	92000	73014	79.36
10	Jumlah Keluarga Sejahtera	keluarga	30000	21558	71.86



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14 .0.00.02. 0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
					Outcome: Persentase ARG Pada Belanja APBD	%	0.5	0.49		
				2.08.02. 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					
					Output: Jumlah Kegiatan OPD yang responsif gender	Kegiatan	42	40		
				2.08.02. 2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG					
					Output: Persentase OPD yang menerapkan Gender Budget Statement (GBS) dalam penganggaran	Perangkat Daerah	46	46		
				2.08.02. 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Kemasyarakatan Kew						
						Output: Persentase perempuan yang aktif dalam organisasi Dharma Wanita	%	55	50			
					2.08.02. 2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						
						Output: Persentase peserta yang memahami seminar tentang partisipasi perempuan dalam bidang politik, wawasan kebangsaan bagi kaum perempuan	Dokumen	1	1			
					2.08.02. 2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan						
						Output: Persentase Peserta yang memahami seminar politik bagi perempuan parlemen	Organisasi	1	1			
					2.08.02. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
						Output: Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	55	50			
					2.08.02. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupat						
						Output: Persentase peserta yang memahami seminar tentang peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Orang	200	200			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14 .0.00.02. 0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
						Outcome: Jumlah Wira Usaha Baru Pada desa Prima dalam peningkatan ekonomi keluarga	Jenis	1	1			
					2.08.04. 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Ka						
						Output: Persentase Perempuan yang aktif mendukung jenis usaha industri rumahan di desa prima yang sudah terbentuk	%	15	15			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					2.08.04. 2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						
						Output: Persentase Desa Prima Yang Aktif	Dokumen	1	1			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14 .0.00.02. 0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
						Outcome: Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100			
					2.08.07. 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Menurunnya persentase korban kekerasan terhadap anak	%	30	30			
					2.08.07. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						
						Output: Persentase peserta yang memahami	Dokumen	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						regulasi tentang pola asuh anak dan remaja						
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14 .0.00.02. 0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
						Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A			
					2.14.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	9	9			
					2.14.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Output: Tersedianya Laporan LKPJ dan LPPD Perangkat Daerah, Laporan Kinerja	Laporan	6	6			
					2.14.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
						Output: Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					2.14.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Output: Terpenuhi gaji dan tunjangan ASN	Orang	63	63		
					2.14.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Output: Tersedianya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	Dokumen	1	1		
					2.14.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
						Output: Persentase Operasional Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	%	100	100		
					2.14.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Output: Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Paket	1	1		
					2.14.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
						Output: Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia	Paket	1	1		
					2.14.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Output: Terpenuhi makanan dan minuman tamu	Paket	1	1		
					2.14.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
						Output: Jumlah jenis barang cetakan dan	Paket	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						penggandaan yang tersedia						
					2.14.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah kunjungan/perjalanan dinas kedalam dan luar daerah	Laporan	1	1			
					2.14.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
						Output: Persentase sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	%	100	100			
					2.14.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Output: Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia	Unit	21	21			
					2.14.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase operasional jasa penunjang kantor yang tersedia	%	100	100			
					2.14.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Tersedianya upah tenaga kerja kontrak	Laporan	1	1			
					2.14.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100			
					2.14.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa						
						Output: Terpenuhinya belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional jabatan	Unit	1	1			
					2.14.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Terpenuhinya belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	3	3			
					2.14.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah jenis peralatan kantor yang diperbaiki	Unit	4	4			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14 .0.00.02. 0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			ANAK									
						Outcome: Tersedianya Dokumen Kependudukan	Dokumen	1	1			
					2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Dokumen Profil Kependudukan	Dokumen	1	1			
					2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						
						Output: Persentase Pemahaman Peserta tentang Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPBPK	Laporan	1	1			
					2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						
						Output: Tersedianya dokumen pencatatan dan pelaporan program KKBPBPK	Dokumen	1	1			
					2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						
						Output: Tersedianya Dokumen Laporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Laporan	1	1			
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
						Outcome: Jumlah kesertaan ber KB	akseptor	92000	73014			
					2.14.03. 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Ke						
						Output: Bertambahnya Media KIE	jenis	5	5			
					2.14.03. 2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						
						Output: Dokumen Komitmen Pelaksanaan Program KKBPK	Organisasi	1	1			
					2.14.03. 2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						
						Output: Terpenuhnya Operasional Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	1			
					2.14.03. 2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						
						Output: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	1			
					2.14.03. 2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK						
						Output: Terpenuhinya operasional di balai penyuluhan KKBPK	Laporan	1	1			
					2.14.03. 2.01.08	Pengendalian Program KKBPK						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	1			
					2.14.03. 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						
						Output: Persentase PKB/PLKB Terlatih	%	65	60			
					2.14.03. 2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Persentase Kader IMP yang Memahami Program Bangga Kencana	Organisasi	1	1			
					2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						
						Output: Terpenuhinya Operasional Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Orang	243	243			
					2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	75	70			
					2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						
						Output: Terpenuhinya Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan	Laporan	1	1			
					2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						
						Output: Jumlah akseptor yang menggunakan MKJP	Orang	3341	3262			
					2.14.03. 2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						
						Output: Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	Unit	29	29			
					2.14.03. 2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1			
					2.14.03. 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
						Output: Dokumen Komitmen Pemberian Dukungan Peningkatan Kampung KB	Dokumen	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					2.14.03. 2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	1			
					2.14.03. 2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB						
						Output: Bertambahnya Peningkatan Klasifikasi Kampung KB dari Dasar Menjadi Mandiri	Kampung KB	26	26			
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14 .0.00.02. 0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
						Outcome: Jumlah Keluarga Sehat	Keluarga	30000	21558			
					2.14.04. 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
						Output: Persentase Kelompok Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	55	60			
					2.14.04. 2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						
						Output: Tersedianya Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Unit	20	20			
					2.14.04. 2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluar						
						Output: Terpenuhinya Operasional Bagi Pengelola dan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orang	5784	5784			
					2.14.04. 2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua He						
						Output: Persentase peserta yang memahami materi pelatihan	Laporan	1	1			



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
3. Dinas Ketahanan Pangan					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87.5	90.7	103.66
2	Persentase Desa rentan atau rawan pangan yang ditangani	%	6.25	6.25	100
3	Persentase pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan berdasarkan data sampel	%	90	76.47	84.97
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase ketersediaan pangan	%	100	100	100
3	Ketersediaan Pangan Utama (Energi dan Protein)	kcal/kap/hr dan gr/kap/hr	3110 dan 80.05	3105 dan 80.00	99.84
4	Penurunan jumlah Desa rentan atau Rawan Pangan	desa	1	1	100
5	Persentase sayuran dan jajanan dan pengolahan pangan bebas zat berbahaya	%	90	76.47	84.97



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KETAHANAN PANGAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.3.27 .0.00.01. 0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB		
				2.09.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Gaji, tunjangan dan pengadaan jasa yang dibayarkan	tahun	1	1		
				2.09.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	20	20		
				2.09.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	6	6		
				2.09.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Penyediaan jasa dan barang pakai habis kantor	tahun	1	1		
				2.09.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	8	8		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					2.09.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	10			
					2.09.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	6	6			
					2.09.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	8	8			
					2.09.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang diadakan	Paket	8	8			
					2.09.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	100	100			
					2.09.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Penyediaan jasa administrasi dan pelayanan kantor	tahun	1	1			
					2.09.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan	Laporan	12	12			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				2.09.01. 2.09	umum kantor yang disediakan					
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Output: Pemeliharaan barang, kendaraan dinas dan peralatan kantor	tahun	1	1		
				2.09.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa					
					Output: Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1		
				2.09.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
					Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	8		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.3.27 .0.00.01. 0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
					Outcome: Persentase ketersediaan pangan	%	100	100		
				2.09.02. 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten					
					Output: Sarana pendukung lumbung padi	lokasi	3	3		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					2.09.02. 2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan						
						Output: Jumlah lumbung pangan yang tersedia	Unit	3	3			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.3.27 .0.00.01. 0000	DINAS KETAHANAN PANGAN		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
						Outcome: Ketersediaan pangan utama (Energi)	kkal/kap /hari	3110	3105			
						Outcome: Ketersediaan pangan utama (Protein)	gr/kap/h ari	80.05	80			
					2.09.03. 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						
						Output: Rekomendasi kebijakan pangan dan gizi	Dokumen	1	1			
					2.09.03. 2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						
						Output: Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Dokumen	2	2			
					2.09.03. 2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
						Output: Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	2	2			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.3.27 .0.00.01. 0000	DINAS KETAHANAN PANGAN		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Outcome: Penurunan jumlah desa rentan atau rawan pangan	Desa	8	8			
					2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
						Output: Tertanganinya daerah rentan rawan pangan	Desa	8	8			
					2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencak						
						Output: Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	2			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.3.27 .0.00.01. 0000	DINAS KETAHANAN PANGAN		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
						Outcome: Persentase sayuran dan jajanan dan pengolahan pangan bebas zat berbahaya	%	80	80			
					2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Persentase peningkatan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	%	90	80			
					2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/ Kota yang dibina	Dokumen	1	1			



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Persentase Pengelolaan Pertanahan Yang Baik	100	100	100	100
2	Persentase Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	100	100	100	100
3	Persentase Mediasi Sengketa dan Konflik Pertanahan Yang Dilaksanakan	%	100	100	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Persentase Penyediaan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	%	100	100	100
2	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan melalui Mediasi	%	100	100	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.04.2.1 0.0.00.0 2.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
					Outcome: Persentase Penyediaan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	%	100	100		
				2.10.05. 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabu					
					Output: Luas Tanah untuk Pembangunan yang Diganti Rugi	Ha	0.51	0.51		
				2.10.05. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan					
					Output: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah/Kota	dokumen	2	2		



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
5. Dinas Lingkungan Hidup					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	61.14	57.17	93.51
2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin/Predikat	3.90 (B)	NIHIL	0
3	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin/Predikat	81.00 (B)	NIHIL	0
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Dokumen Perencanaan Pengelolaan LH	Dokumen	2	3	150
3	Indeks Kualitas air	poin	58.99	50	84.76
4	Indeks Kualitas Udara	poin	83.5	81.52	97.63
5	Indeks Tutupan Lahan	%	0	0	100
6	Persentase Pelaku usaha/kegiatan yang memiliki TPS limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan data hasil monitoring	%	54	100	185.19
7	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO yang diterbitkan	%	0	0	100
8	Persentase Lembaga Pendidikan kewenangan kabupaten yang mendapat predikat adiwiyata	%	20	16.03	80.15
9	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan	Penghargaan	0	0	100
10	Persentase Penanganan pengaduan lingkungan hidup yang selesai ditangani	%	0	0	100
11	Persentase timbulan sampah di wilayah kab/kota yang ditangani	%	15	14.19	94.6



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0. 00.0.00 .01.000 0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
						Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	0	
					2.11.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						Output: Tersusunya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	9	9	
					2.11.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	
					2.11.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Output: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1	
					2.11.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	22	20	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					2.11.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	3			
					2.11.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100			
					2.11.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.11.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.11.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.11.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	1	1			



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						
						Output: Tersedianya Dokumen KLHS	Dokumen	2	1			
					2.11.02.2. 02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						
						Output: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	3			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0. 00.0.00 .01.000 0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Menurunnya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Upaya yang perlu di lakukan untuk meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah : 1. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimba ngkan alokasi beban pencemar 2. Meningkatkan pengawasan terhadap	Pada dasarnya suatu usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan Pengujian limbah cair dan kualitas udara wajib ke laboratorium yang terakreditasi. Sertifikat hasil peggujian dari laboratorium terakreditasi tersebut sebagai salah satu dasar apakah perusahaan patuh terhadap ketentuan terkait pembuangan limbah cair ke media lingkungan.



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											usaha dan atau kegiatan dalam hal pembuangan air limbah ke badan Sungai. 3. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air 4. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah	Untuk saat ini laboratorium lingkungan kita belum memiliki legalitas untuk melakukan pengujian dimaksud karena belum terakreditasi. Untuk pengujian kualitas udara di pabrik / kawasan industri (udara ambient, emisi boiler, emisi genset) belum dapat dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai karena belum terakreditasi dan belum memiliki peralatan yang sesuai dengan SNI.
						Outcome: Indeks Kualitas Air	Poin	58.99	50			
						Outcome: Indeks Kualitas Udara	Poin	83.5	81.52			
					2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu	%	100	50			
						Output: Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu	%	100	100			
					2.11.03.2. 01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhad						
						Output: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	1			
					2.11.03.2. 01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Laboratorium Lingkungan Hidup Belum Terakreditasi	Pemenuhan Persyaratan untuk Proses Akreditasi	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya untuk meningkatkan kelas Laboratorium Lingkungan dari Klaster menjadi Laboratorium yang terakreditasi, dan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sudah mendaftarkannya ke Komite Akreditasi



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												Nasional (KAN), dan telah melakukan persiapan pemenuhan kelengkapan berkas persyaratan yang diperlukan.
						Output: Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1			
					2.11.03.2. 02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
						Output: Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	%	100	100			
					2.11.03.2. 02.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah						
						Output: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH						
						Outcome: Persentase Pelaku usaha/kegiatan yang memiliki TPS limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan data hasil monitoring	%	54	100			
					2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						
						Output: Jumlah TPS Limbah B3 yang dimonitoring dan dievaluasi	TPS LB3	20	31			
					2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan semen						
						Output: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	20	31			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Outcome: Persentase Lembaga Pendidikan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Predikat Adiwiyata	%	20	16.03			
					2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan						
						Output: Terlaksananya Pembinaan Terhadap Calon Sekolah Adiwiyata	%	100	100			
					2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemas						
						Output: Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	1	1			
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Persentase penanganan sampah masih belum rendah, karena Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai wilayah yang	Pemenuhan SDM dan sarana prasarana pengelolaan persampahan serta menyusun dokumen Perencanaan	1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah membuat langkah-langkah strategis dalam upaya mengantisipasi



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										luas terdiri dari 17 Kecamatan, sedangkan jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan penanganan sampah masih 7 Kecamatan	Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) guna mengetahui jumlah SDM dan sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk penanganan pengelolaan sampah	timbunan sampah di TPA dengan melakukan penataan timbunan sampah agar tidak berserakan di TPA, sehingga daya tampung TPA akan lebih optimal. 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan penataan terhadap objek retribusi persampahan dengan menempatkan Koordinator Pengumpul Retribusi ke setiap wilayah kecamatan yang sampahnya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Untuk PPNS di Dinas Lingkungan Hidup belum ada Pejabatnya.



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Outcome: Persentase Volume Timbunan Sampah di Wilayah Kab/Kota yang Ditangani	%	15	14.19			
					2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						
						Output: Cakupan Wilayah Penanganan Pengelolaan Persampahan	Kecamatan	7	8			
					2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan						
						Output: Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	17000	17745.8			
					2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya objek sasaran dari kegiatan/sub kegiatan dimaksud, dimana di Kabupaten Serdang Bedagai untuk saat ini belum ada pengelolaan sampah yang		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										diselenggarakan oleh Pihak Swasta dan juga belum ada Pihak Swasta yang mengajukan izin usaha untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Serdang Bedagai.		
						Output: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Dokumen	1	0			
					2.11.11.2. 03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah						
						Output: Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	1	0			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin/ Predikat	3.9	3.77	96.67
2	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin/ Predikat	81	94.24	116.35
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	100
2	Persentase kepemilikan KTP-El	%	97	99.95	103.04
3	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	99.96	99.96
4	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	%	50	42.86	85.72
5	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	%	98	92.88	94.78
6	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100
7	Persentase kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	60.63	60.63
8	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	%	100	69.28	69.28
9	Jumlah Perangkat Daerah yang telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	dokumen	6	6	100
10	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	dokumen	2	2	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.0. 00.0.00 .01.000 0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
						Outcome: Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat	BB	A	
					2.12.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Output: Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Satuan	42	42	
					2.12.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	30	30	
					2.12.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Output: Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	dokumen	12	12	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						ASN						
					2.12.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Satuan	12	12			
					2.12.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	7	7			
					2.12.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	7	7			
					2.12.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	10	3			
					2.12.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	7	7			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					2.12.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
						Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	5		
					2.12.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					
						Output: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1000	2000		
					2.12.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	30	30		
					2.12.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
						Output: Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Satuan	8	8		
					2.12.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Output: Jumlah unit peralatan dan mesin	Paket	8	8		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						lainnya yang disediakan						
					2.12.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12			
					2.12.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	4			
					2.12.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1			
					2.12.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	2			
					2.12.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terlaksananya	Satuan	132	144			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah						
					2.12.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa						
						Output: Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1			
					2.12.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	2			
					2.12.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	108	108			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	2.12.0. 00.0.00 .01.000 0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
						Outcome: Persentase kepemilikan KTP-El	%	97	99			
						Outcome: Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100			
						Outcome: Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	50	42.79			
					2.12.02.2. 01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
						Output: Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	Bulan	12	12			
					2.12.02.2. 01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
						Output: Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.0. 00.0.00 .01.000 0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
						Outcome: Persentase kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	%	98,00	91			
						Outcome: Persentase kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100			
						Outcome: Persentase kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	58			
						Outcome: Persentase kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	%	100	68			
					2.12.03.2. 02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						
						Output: Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil	Bulan	12	12			
					2.12.03.2. 02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait P						
						Output: Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Laporan	50	50			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Persentase Lembaga ekonomi desa aktif	%	30	30	100
2	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	64	64	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase desa yang tertata dengan baik	%	62	62	100
3	Jumlah Kerjasama desa yang terbentuk	kawasan kerjasama perdesaan	4	4	100
4	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dibina Kompetensinya	%	15	15	100
5	Persentase desa yang dibina system Pelayanan administrasi desa sesuai standard	%	62	62	100
6	Persentase lembaga kemasyarakatan desa(LKMD/LPM dan PKK) yang aktif	%	64	64	100
7	Persentase lembaga kemasyarakatan desa(LKMD/LPM dan PKK) yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif	%	30	30	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00 .0.00.01. 0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai Sakip	Predikat	BB	BB		
				2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	%	100	97		
				2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100		
				2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	%	100	97		
				2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	99		
				2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.13.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.13.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.13.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1			
					2.13.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.13.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1			
					2.13.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
					2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1			
					2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1			
					2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	96			
					2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	4			
					2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	19	5			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						
						Outcome: Kawasan Kerjasama antar desa	Kawasan	4	4			
					2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						
						Output: Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	Desa	4	4			
					2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						
						Output: Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4			
					2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	10	10			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				Kurangnya Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya bidang Pemerintahan Desa akan melakukan Sosialisasi, Fasilitasi, Pendampingan serta monitoring terhadap Permasalahan yang ada di Desa. Baik terkait Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa maupun Pelatihan Aparatur Desa. Dengan adanya Pelatihan Aparatur Desa diharapkan seluruh perangkat Desa	Dalam rangka menyikapi tentang pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa, diminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk lebih intens melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam penggantian/pemberhentian perangkat desa serta melakukan pelatihan penyusunan sistem keuangan desa



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
											memiliki pemahaman yang sama terhadap Peraturan2 yang berlaku yang berlaku. Dengan adanya pendamping an diharapkan dapat menyelesaikan dan mengurangi permasalahan di Desa.	
						Outcome: Persentase aparaturn pemerintahan desa yang dibina kompetensinya	%	69	69			
					2.13.04. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						
						Output: Jumlah desa yang memperoleh Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintahan Desa	Desa	237	237			
					2.13.04. 2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	237	237			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.00.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
						Outcome: Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKMD/LPM dan PKK) yang aktif	%	64	64			
					2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingk						
						Output: lembaga kemasyarakatan desa (LKMD/LPM dan PKK) yang aktif	%	64	64			
					2.13.05.2.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat						
						Output: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Lembaga	237	237			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya						
					2.13.05. 2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
8. Dinas Perhubungan					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi.	poin	100	100	100
2	Persentase Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas.	%	35	30	85.71
3	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.	smp/jam	0.3	0.3	100
4	Persentase Ketersediaan Terminal Tipe C Yang Dikelola Dengan Baik.	%	40	35	87.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	predikat	BB	BB	100
2	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala.	%	100	100	100
3	Terlaksananya Pelayananan Parkir di Tepi Jalan Umum.	%	100	100	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERHUBUNGAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00 .0.00.01. 0000	DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	predikat	BB	BB		
				2.15.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	laporan	24	21		
				2.15.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN.	laporan	12	12		
				2.15.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah Laporan Penerimaan Honorarium Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	laporan	12	12		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				ASN.						
				2.15.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Paket	1	3		
				2.15.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	0		
				2.15.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2		
				2.15.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
					Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	2		
				2.15.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Peraturan Perundang- undangan						
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Paket	3	3			
					2.15.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	2			
					2.15.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
						Output: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	unit	0	0			
					2.15.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	3	3			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					2.15.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	2	3			
					2.15.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lembar	300	300			
					2.15.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang	729	729			
					2.15.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara/Direhabi litasi	unit	10	14			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					2.15.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00 .0.00.01. 0000	DINAS PERHUBUNGAN		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
						Outcome: Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik sektor Transportasi	Persentase	100	100			
						Outcome: Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Persentase	0.3	0			
					2.15.02.2 .05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
						Output: Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	buah	12	10			
					2.15.02.2 .05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	lembar	2100	2100			
					2.15.02.2 .05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
						Output: Jumlah sarana dan prasarana Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	paket	2	2			
					2.15.02.2 .06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
					2.15.02.2 .06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	laporan	1	0			
					2.15.02.2 .08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah laporan audit dan inpeksi keselamatan LLAJ di Jalan	laporan	1	1			
					2.15.02.2 .08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						
						Output: Jumlah laporan inpeksi, audit dan pemantauan Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Paket	3	3			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
9. Dinas Komunikasi dan Informatika					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	nilai/predikat	C	C	100
2	Indeks Domain Kebijakan SPBE	nilai	1.9	2.9	152.63
3	Indeks Domain Manajemen SPBE	nilai	1.5	1	66.67
4	Indeks Tata Kelola SPBE	nilai	1.8	1.6	88.89
5	Indeks Layanan SPBE	nilai	3.2	3.62	113.13
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase meningkatnya layanan dan akses informasi bagi masyarakat	%	100	100	100
3	Persentase penyebaran informasi pembangunan melalui media massa dan pemangku kepentingan	%	100	100	100
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominformasi	%	100	100	100
5	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	25	25	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.20 .2.21.04. 0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB		
				2.16.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dan benar	%	100	100		
				2.16.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Pembayaran TPP sering terlambat dikarenakan keterbatasan kas daerah	Melakukan koordinasi ke BPKA terkait keterlambatan tersebut	
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	18	18		
				2.16.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Terjadi refocussing terkait honor pengelola keuangan	Memaksimalka n anggaran yang ada	
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
					2.16.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
					2.16.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Keterbatasan anggaran sehingga perbaikan instalasi listrik tidak dapat dilaksanakan	Memaksimalka n anggaran yang ada	
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.16.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Ada pergeseran Anggaran Kas sehingga pengadaannya dimundurkan	Memaksimalka n sisa ATK tahun 2023	
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.16.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Ada pergeseran Anggaran Kas sehingga pengadaannya dimundurkan	Memaksimalka n sisa alat kebersihan tahun 2023	
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Tangga yang Disediakan						
					2.16.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Anggaran terlalu kecil sehingga tidak semua rapat bisa di berikan makan dan minum	Memaksimalka n anggaran yang ada	
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.16.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Anggaran di refocussing sehingga tidak semua kegiatan bisa dibuatkan baliho	Memaksimalka n anggaran yang ada	
						Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.16.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Anggaran di refocussing sehingga sehingga 3 bulan terakhir langganan surat kabar di hentikan	Melakukan penyebaran informasi melalui media sosial milik Dinas Kominfo	
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					2.16.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Anggaran di refocussin sehingga tidak semua perjalanan dinas bisa dibayarkan	Memaksimalka n anggaran yang ada	
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1			
					2.16.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
					2.16.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jaringan internet beberapa kali mengalami putus jaringan	melakukan komunikasi dengan pihak provider akan gangguan segera di atasi	
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1			
					2.16.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Pembayaran honor sering terlambat disebabkan terlambatkan SPD nya dikeluarkan	Melakukan komunikasi ke BPKA terkait penerbitan SPD	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1			
					2.16.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terpeliharanya barang-barang milik daerah	%	100	100			
					2.16.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa				Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas kurang, sehingga ada beberapa pemeliharaan yang seharusnya dilakukan tidak jadi dilakukan	Memaksimalka n anggaran yang ada	
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3			
					2.16.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Anggaran pemeliharaan sangat terbatas, sehingga ada beberapa peralatan yang	Memaksimalka n anggaran yang ada	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
										tidak dapat dilakukan pemeliharaan		
						Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.20 .2.21.04. 0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
						Outcome: Persentase konten Informasi pembangunan yang didesiminasikan melalui berbagai saluran media	%	100	100			
					2.16.02. 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Kurangnya minat masyarakat dalam mengakses informasi pembangunan	Mempromosika n konten informasi melalui media sosial	Memohon anggaran pengadaaan videotron sebagai media komunikasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat
						Output: Meningkatnya jumlah desiminasi informasi pembangunan yang berkualitas	%	100	100			
					2.16.02. 2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				Keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan	Memaksimalka n sumber daya manusia yang ada dan	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
										dalam mengelola konten informasi yang terkini dan menarik bagi masyarakat	menggunakan aplikasi-aplikasi tidak berbayar	
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1			
					2.16.02. 2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				Konten yang disebarkan melalui media komunikasi publik yang ada kurang bervariasi	Meningkatkan variasi konten informasi pembangunan yang akan disebarkan melalui media komunikasi publik	
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1			
					2.16.02. 2.01.07	Layanan Hubungan Media				Banyaknya media massa yang ingin bermitra dengan pemerintah daerah namun ketersediaan anggaran terbatas	Melakukan verifikasi dan klasifikasi media yang memenuhi kriteria regulasi yang berlaku	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	1	1			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				minimnya SDM dan Anggaran untuk menunjang terealisasinya kegiatan di Bidang E-Goverment	Memaksimalkan SDM dan Anggaran yang ada agar kegiatan dapat berjalan	
						Outcome: persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	%	100	100			
					2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemeri				tidak bs login ke portal domain go.id sehingga menyebabkan kominfo tidak bisa memanajemen kedua domain tsb	terus berkoordinasi dengan pihak kementerian agar kendala-kendala yang dihadapi dapat terselesaikan	
						Output: Jumlah Domain dan Sub domain yang dikelola	Domain	2	2			
					2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				keterbatasan anggaran dalam mengelola infrastruktur jaringan	memaksimalkan anggaran yang tersedia	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	1			
					2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				keterbatasan anggaran dalam mengelola infrastruktur jaringan	memaksimalka n anggaran yang ada	
					2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				Kurangnya koordinasi antar OPD ke Dinas Kominfo terkait pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Surat Edaran Bupati Nomor 18.24/480/406 3/2023 perihal pemberitahuan ke seluruh OPD terkait salah satunya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	
						Output: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1	1			
					2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				kurangnya kualitas SDM Bidang TIK dan kualitas data belum terstandarisasi dan belum bs dibagi pakai	meningkatkan Bimbingan atau Diklat TIK	
						Output: Jumlah Layanan Publik yang	Layanan	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah						
					2.16.03. 2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				Kurangnya kualitas SDM dan Anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan SDM TI	Memaksimalka n SDM yang ada dan memaksimalka n anggaran yang tersedia	
						Output: jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
10. Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Jumlah koperasi yang mempunyai sertifikat nomor induk koperasi(SNIK)	koperasi	7	27	385.71
2	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	usaha mikro	20	32	160
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	69.75	67.59	96.9
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	koperasi	2	4	200
2	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	koperasi	2	4	200
3	Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	koperasi	6	38	633.33
4	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi	orang	6	75	1250
5	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	koperasi	3	70	2333.33
6	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitas pelatihan	usaha mikro	45	67	148.89
7	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	usaha mikro	350	400	114.29
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	100
9	Persentase tenaga kerja bersertifikat	%	20	7.9	39.5
10	Jumlah Tenaga kerja yang terlatih	orang	112	303	270.54
11	Jumlah tenaga kerja yang bekerja	orang	296.683	293.574	98.95
12	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	70	70	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.17.2. 07.3.32 .16.000 0	DINAS KETENAGA KERJAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai saki perangkat daerah	predikat	BB	BB		
				2.07.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah administrasi keuangan yang tersedia	laporan	1	1		
				2.07.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	19	16		
				2.07.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	1	1		
				2.07.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah administrasi umum yang tersedia	paket	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					2.07.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah dokumen bahan bacaan	dokumen	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						
					2.07.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	1	1			
					2.07.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang pemerintahdaerah yang tersedia	dokumen	1	1			
					2.07.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	paket	1	1			
					2.07.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Output: Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	paket	1	1			
					2.07.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1	1			



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				2.07.04.2 .03.02						
					orang	500	1103			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.17.2. 07.3.32 .16.000 0	DINAS KETENAGAK ERJAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	2.07.05						
				2.07.05.2 .02						
				2.07.05.2 .02.04						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				
						Output: Jumlah LKS tripartit yang dibina	lembaga	1	1	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2. 07.3.32 .16.000 0	DINAS KETENAGAK ERJAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
						Outcome: Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	koperasi	7	25	
				2.17.05.2 .01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K				
						Output: Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	orang	25	25	
				2.17.05.2 .01.01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
						Output: Jumlah SDM koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian	orang	25	25	
				2.17.05.2 .03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam				



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah pelaku usaha mikro yang memahami pengetahuan usaha mikro	usaha mikro	45	30			
					2.17.05.2 .03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro						
						Output: Jumlah usaha mikro yang diberi pemahaman pelatihan	usaha mikro	45	30			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
11. Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Budaya					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Persentase pemuda yang memperoleh medali di even olahraga tingkat daerah/nasional/internasional	%	6%	6.5	108.33
2	Persentase sekolah pendidikan dasar yang melaksanakan kegiatan kepramukaan secara aktif	%	0	0	100
3	Tingkat Partisipasi paskibraka kabupaten	level	0	0	100
4	Persentase peran aktif pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	70	71.82	102.6
5	Jumlah pemuda yang partisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri	Orang	30	40	133.33
6	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	1.83	1.36	74.32
7	Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara	Orang	40	50	125
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda	%	15	15	100
3	Persentase Peningkatan Jumlah Prestasi Olahraga	%	20	31.4	157
4	Jumlah sekolah yang melaksanakan kegiatan kepramukaan secara rutin	sekolah	0	0	100
5	Persentase sekolah yang melaksanakan kegiatan kepramukaan secara rutin	%	82	82.3	100.37
6	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Terkelola	%	20	20	100
7	Persentase Kelompok Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	%	15	15	100
8	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilakukan Pembinaan	Sejarah	1	1	100
9	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar Budaya	1	2	200



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
10	Persentase Kenaikan Jumlah Pengunjung Museum	%	10	14.45	144.5
11	Persentase Destinasi Wisata yang Sesuai Standard	%	20	29	145
12	Persentase Objek Wisata yang Dipromosikan	%	60	60	100
13	Persentase Kegiatan Ekonomi Kreatif yang Terlaksana	%	100	100	100
14	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat Kepariwisataaan yang Mendapat Pelatihan	%	80	90.91	113.64



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.22.2.1 9.3.26.0 4.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Melakukan Dialog Kinerja setiap hari rabu, untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Data capaian kinerja yang masih sulit diperoleh tepat waktu	Melakukan Dialog Kinerja setiap hari rabu (mingguan), evaluasi bulanan dan Triwulan, untuk mendapatkan data akurat dan memaksimalka n pencapaian target kinerja
						Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	
					2.19.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Output: Persentase Pencapaian Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	
					2.19.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	29	29	
					2.19.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	1	1	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
					2.19.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Persentase Pencapaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100			
					2.19.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.19.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.19.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.19.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.19.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1			
					2.19.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1			
					2.19.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Output: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1			
					2.19.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1			
					2.19.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase pencapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100			
					2.19.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					2.19.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1			
					2.19.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	7	7			
					2.19.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1			
					2.19.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	6	6			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
					2.19.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.22.2.1 9.3.26.0 4.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
						Outcome: Persentase Peningkatan Jumlah Prestasi Olahraga	%	20	31.4			
					2.19.03.2 .01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah						
						Output: Persentase pencapaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100			
					2.19.03.2 .01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	4	4			
					2.19.03.2 .02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100			
					2.19.03.2 .02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1			
					2.19.03.2 .03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
						Output: Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan	%	100	100			



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					2.19.04.2 .01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						
						Output: Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	100	100			
					2.19.04.2 .01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	1	1			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.2.1 9.3.26.0 4.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
						Outcome: Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Terkelola	%	20	20			
					2.22.02.2 .02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional	%	100	100			
					2.22.02.2 .02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	3	3			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.2.1 9.3.26.0 4.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						
						Outcome: Persentase Kenaikan Jumlah Pengunjung Museum	%	10	12.83			
					2.22.06.2 .01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah kunjungan museum	Orang	200	224			
					2.22.06.2 .01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						
						Output: Jumlah Sarana dan Prasaran Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
12. Dinas Perpustakaan dan Arsip					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	poin	7.1	4.154	58.51
2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin/Predikat	3.9	0	0
3	Indeks pengawasan Kearsipan	Poin/Predikat	45	33.41	74.24
4	Persentase OPD yang menerapkan arsip daerah secara baku	%	33.33	30.43	91.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Jumlah koleksi naskah kuno yang ditemukan	buah	1	2	200
3	Arsip yang sudah di Tahun N di Depo Arsip Daerah	berkas	120	158	131.67
4	OPD yang Memiliki Perbub JRA	Perbub	1	0	0
5	Persentase pemustaka / pengunjung perpustakaan	%	13.33	13.43	100.75
6	Persentase perpustakaan berstandar nasional	%	2.67	2.67	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB		
				2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Persentase Pencapaian administrasi Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip	%	100	100		
				2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12		
				2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12		
				2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Persentase PencapaianAdministra si umum Dinas Perpustakaan dan Arsip	%	100	100			
					2.23.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan yang tersedia	Bulan	12	12			
					2.23.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12			
					2.23.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bulan	12	12			
					2.23.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12			
					2.23.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Bulan	12	12			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Penggandaan yang Disediakan						
					2.23.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan	12	12			
					2.23.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12			
					2.23.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	3			
					2.23.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12			
					2.23.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12			
					2.23.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12			
					2.23.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase Pencapaian jasa penunjang urusan Dinas Perpustakaan dan Arsip	%	100	100			
					2.23.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	12			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					2.23.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	12			
					2.23.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bulan	12	12			
					2.23.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12	12			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.2. 24.0.00 .02.000 0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
						Outcome: Persentase pemustaka	%	13,33	13			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						/pengunjung perpustakaan						
						Outcome: Persentase perpustakaan berstandar nasional	%	2,67	2			
					2.23.02. 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Persentase Perpustakaan yang dibina	%	0	0			
					2.23.02. 2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						
						Output: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Paket	1	1			
					2.23.02. 2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Perpustak aan	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya						
					2.23.02. 2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan						
						Output: Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perpusta kaan	1	10			
					2.23.02. 2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka						
						Output: Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Eksam plar	1200	0			
					2.23.02. 2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						
					2.23.02. 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					2.23.02. 2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.23.2. 24.0.00 .02.000 0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
						Outcome: Arsip yang sudah diolah di tahun n di depo arsip daerah secara baku	Arsip	120	158			
					2.24.02. 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Arsip Dinamis yang sudah diolah	0	0	0			
					2.24.02. 2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						



3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Tabel 3.1.3
Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1. Dinas Perikanan					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	%	0	0	100
2	Produksi perikanan	ton	63689	66666	104.67
3	Produksi produk olahan perikanan	ton	1947	1975	101.44
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Produksi Perikanan Tangkap	ton	26918	29875	110.99
3	Produksi Perikanan Budidaya	ton	36771	36791	100.05
4	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	75	81.66	108.88
5	Jumlah jenis produk olahan hasil perikanan	jenis	53	53	100
6	Jumlah jenis produk olahan yang memiliki izin layak konsumsi	jenis/unit	11	11	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERIKANAN										
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB		
				3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Cakupan pelayanan administrasi keuangan	%	100	96		
				3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN perangkat daerah	Orang/Bulan	22	22		
				3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		
				3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	82		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					3.25.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					3.25.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2			
					3.25.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2			
					3.25.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	0			
					3.25.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1			
					3.25.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	9			
					3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	236	235			
					3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
						Output: Jumlah Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Unit	11	11			
					3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						
						Output: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	11	11			
					3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100			
					3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12	12			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
					3.25.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12			
					3.25.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemeritah daerah dalam kondisi baik	%	85	84			
					3.25.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1			
					3.25.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2			
					3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	17			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
						Outcome: Produksi Perikanan Tangkap	Ton	26918	29875			
					3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Persentase Kelompok Perikanan Tangkap yang diberdayakan	%	8,85	26			
					3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						
						Output: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	400	400			
					3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Unit	156	156			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00 .0.00.01. 0000	DINAS PERIKANAN		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
						Outcome: Volume produk olahan hasil perikanan	Ton	1947	1975			
					3.25.06.2. 03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
						Output: Jumlah bahan baku yang tersedia dan tersalur untuk industri pengolahan ikan (Ton)	Ton	3894	3954			
					3.25.06.2. 03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	2	2			



BAB III



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN										
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.22.2.19.3.26.04.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Perda Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2022 tentang RIPPARKAB	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Masih belum optimalnya pengembangan dan penataan destinasi wisata	Optimalisasi pengembangan pariwisata melalui Perda Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2022 tentang RIPPARKAB
						Outcome: Persentase Destinasi Wisata yang Sesuai Standard	%	20	25	
					3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
						Output: Persentase Tercapainya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	%	100	100	
					3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabu				
						Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	Unit	1	1	

253



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Kawasan Strategis Pariwisata Ka						
						Output: Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	Kegiatan	5	5			
					3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.22.2.19.3.26.04.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
						Outcome: Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat Kepariwisata yang Mendapat Pelatihan	%	80	80			
					3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
						Output: Persentase Terlaksananya Peningkatan	%	100	100			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
					3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						
						Output: Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	120	120			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2. Dinas Pertanian					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Nilai PDRB sektor pertanian	milyarRp	11.032,381	15.998,0163	141,
2	Produksi Padi	ton	354397	337066	95.11
3	Produksi Ubi Kayu	ton	671339	710255	105.8
4	Produksi Kelapa Sawit	ton	143232.64	143477.34	100.17
5	Produksi Cabe Merah	ton	459	1694	369.06
6	Produksi Bawang Merah	ton	263	587.79	223.49
7	Produksi Padi Organik	ton	200	373	186.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	100
2	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan - Alat mesin pertanian	-	0.27	0.47	174.07
3	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan - Pupuk	-	1	0.69	69
4	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan - Pestisida	-	1	1	100
5	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan - Benih/Bibit	-	1	0.08	8
6	Presentase Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	85	80	94.12
7	Luas Sawah Baru	Ha	150	103	68.67
8	Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani	%	25	31.2	124.8
9	Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas	kel	50	60	120



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERTANIAN										
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat	BB	A		
				3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	lap	1	1		
				3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	OB	1960	1957		
				3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	12	12		
				3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	lap	1	1		
				3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	org	1	1			
					3.27.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	lap	1	1			
					3.27.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	4			
					3.27.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	4			
					3.27.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	4	4			
					3.27.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	4	4			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					3.27.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
						Output: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dok	1900	1900		
					3.27.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lap	4	4		
					3.27.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
						Output: Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	lap	1	1		
					3.27.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Output: Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	14	14		
					3.27.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
						Output: Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	lap	1	1		
					3.27.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	lap	12	12			
					3.27.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	lap	12	12			
					3.27.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lap	1	1			
					3.27.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa						
						Output: Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2	2			
					3.27.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	10	10			
					3.27.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlahgedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	3	3			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00	.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Sarana pertanian belum sepenuhnya terpenuhi sesuai kebutuhan petani	Mengupayakan penyediaan sarana pertanian dari berbagai sumber anggaran (APBD Provinsi Sumatera Utara, /APBN dll) serta mendorong kemandirian petani dalam memenuhi sarana pertanian	
						Outcome: Rasio ketersediaan alat mesin pertanian terhadap kebutuhan	-	0.27	0.47			
						Outcome: Rasio ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan	-	1	0.69			
						Outcome: Rasio ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan	-	1	1			
						Outcome: Rasio ketersediaan benih terhadap kebutuhan	-	1	0.08			
					3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						
						Output: Jumlah laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	lap	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lok						
						Output: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lok	lap	4	4			
					3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						
						Output: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	lap	4	4			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.00.00.01.0000	DINAS PERTANIAN		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Prasarana pertanian belum sepenuhnya terpenuhi sesuai kebutuhan petani, Database kebutuhan dan kondisi prasarana belum tersedia, Masih kurangnya kesadaran petani untuk memelihara infrastruktur pertanian yang	Mengupayakan penyediaan prasarana pertanian dari berbagai sumber anggaran, Menyusun database kebutuhan dan kondisi prasarana secara bertahap, Meningkatkan peran petani dan kelembagaan petani secara partisipatif dalam memelihara	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
										sudah dibangun dengan baik	infrastruktur pertanian serta mendorong partisipasi masyarakat petani secara swadaya dalam memenuhi prasarana pertanian	
						Outcome: Persentase prasarana dalam kondisi baik	%	85	80			
						Outcome: Luas sawah baru	ha	150	103			
					3.27.03.2 .01	Pengembangan Prasarana Pertanian						
						Output: Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian	dok	1	1			
					3.27.03.2 .01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B d						
						Output: Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	dok	1	1			
					3.27.03.2 .02	Pembangunan Prasarana Pertanian						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	unit	71	70			
					3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						
						Output: Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	46	45			
					3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						
						Output: Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	21	21			
					3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						
						Output: Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	4	4			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				Luasnya wilayah pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai dengan berbagai macam tipikologi	Peningkatkan perlindungan tanaman dengan sistem pengendalian terpadu, Pemberian bantuan sarana produksi bagi lahan pertanian	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
										lahan dan komoditas pertanian yang diusahakan sehingga jenis OPT juga beragam	yang mengalami serangan OPT dan bencana pertanian, Meningkatkan sosialisasi manfaat AUP	
						Outcome: Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	25	31.2			
					3.27.05.2 .01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	lap	1	1			
					3.27.05.2 .01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						
						Output: Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	ha	1000	1548			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00 .0.00.01. 0000	DINAS PERTANIAN		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				Jumlah penyuluh pertanian yang belum mencukupi untuk seluruh	Mengoptimalkan partisipasi penyuluh swadaya serta petani milenial untuk	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
										wilayah Kabupaten Serdang Bedagai serta masih belum meratanya kualitas penyuluh dihadapkan dengan kemajuan teknologi informasi dan teknologi pertanian	peningkatan adopsi teknologi pertanian	
						Outcome: Jumlah kelompok tani yang naik kelas	kel	50	60			
					3.27.07.2 .01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						
						Output: Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian	lap	1	1			
					3.27.07.2 .01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						
						Output: Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	6	6			
					3.27.07.2 .01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						
						Output: Jumlah kelembagaan petani di	unit	50	60			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya						
					3.27.07.2 .01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						
						Output: Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	unit	6	10			



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	5.511.94	5.878.69	106.66
2	Persentase Jumlah Pasar Sehat	%	30.77	36	117
3	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Pasar	3	3	100
4	Informasi harga pangan strategis	%	100	100	100
5	Persentase Jumlah Produk Lokal yang Dipasarkan ke Luar daerah	%	87.04	69.77	80.16
6	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	8	6.7	83.75
7	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Milyar Rupiah	6.377.16	6.832.41	107.14
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100	100
3	Persentase cakupan wilayah yang terlindungi dan tertib niaga	%	97	88.23	90.96
4	Persentase Produk Lokal Yang Dipasarkan Pada Pasar modern dan marketplace	%	3.7	1.46	39.46
5	Jumlah dokumen dan evaluasi RPIK yang disusun	Dokumen	1	1	100
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan industri yang memiliki ijin usaha industri (IUI) dan ijin perluasan usaha industri (IPUI)	%	40	33.33	83.33
7	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Industri	12	14	116.67



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.31.3.3 0.0.00.0 2.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB		
				3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SAKIP dengan Baik	%	100	94		
				3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	324	324		
				3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1		
				3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SAKIP dengan Baik	%	100	69		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					3.30.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					3.30.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3			
					3.30.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2			
					3.30.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2			
					3.30.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1			
					3.30.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	28	28			
					3.30.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2			
					3.30.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SAKIP dengan Baik	%	100	97			
					3.30.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1			
					3.30.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1			
					3.30.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1			
					3.30.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SAKIP dengan Baik	%	100	77			
					3.30.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2			
					3.30.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	33	33			
					3.30.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.31.3.3 0.0.00.0 2.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
						Outcome: Persentase Pasar Sehat	%	30,77	35			
					3.30.03.2 .01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
						Output: Jumlah pasar yang dibangun/ difasilitasi/ direhabilitasi	Unit	1	3			
					3.30.03.2 .01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						
						Output: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	3			
					3.30.03.2 .01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
						Output: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	26	26			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.31.3.3 0.0.00.0 2.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						
						Outcome: Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
					3.30.04.2 .02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						
						Output: Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok yang Beredar di Kabupaten Serdang Bedagai	Kali	2	2			
					3.30.04.2 .02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	2	2			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.31.3.3 0.0.00.0 2.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
						Outcome: Persentase Jumlah dan Jenis Produk IKM yang Dipasarkan ke Luar Daerah	%	87,04	69			
					3.30.05.2 .01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan ya						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Output: Terlaksananya promosi dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kali	2	2			
					3.30.05.2 .01.02	Pameran Dagang Nasional						
						Output: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	Pelaku Usaha	4	4			
					3.30.05.2 .01.03	Pameran Dagang Lokal						
						Output: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	6	6			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.31.3.3 0.0.00.0 2.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
						Outcome: Persentase cakupan wilayah yang terlindungi dan tertib niaga	%	97	88			
					3.30.06.2 .01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						
						Output: Persentase UTP yang Dilayani	%	89	99			
					3.30.06.2 .01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						
						Output: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat	Unit	4	4			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
						Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang						
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.3.3 0.0.00.0 2.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
						Outcome: Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	8	6			
					3.31.02.2 .01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
						Output: Terfasilitasinya Pelaku IKM pada Sektor Industri Pengolahan	IKM	3	3			
					3.31.02.2 .01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1			



3.1.4 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan

Tabel 3.1.4

Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Litbang					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Nilai Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP	Nilai (Predikat)	24	23.21	96.71
2	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	61.7	61.00	98.87
3	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100
4	Persentase Hasil Kajian Dan Penelitian Yang Dijadikan Kebijakan Daerah	%	100	100	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	100
2	Persentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Tercapai	%	83.20	91.3	109.74
3	Persentase Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Yang Tercapai	%	83.20	87.7	105.41
4	Terwujudnya Konsistensi Antara Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD (N-1) Dengan Permasalahan/Isu Strategis Pada RKPD (N+1)	%	100	100	100
5	Terwujudnya Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Permasalahan/Isu Strategis Pada RKPD (N+1)	%	100	100	100
6	Terwujudnya Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Daerah Dalam RKPD (N+1) Dengan Program Prioritas Daerah	%	100	100	100



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
7	Terwujudnya Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Dalam RKPD (N+1) Dengan Pagu Anggaran	%	100	100	100
8	Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & LITBANG										
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	PERENCANAAN	5.01.5.05 .0.00.02. 0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & LITBANG	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A		
				5.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Keluaran : Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	2	2		
				5.01.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34	34		
				5.01.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
					Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	8	8			
					5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6			
					5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3			
					5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2			
					5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6			
					5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120			
					5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
					5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	15			
					5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Keluaran : Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Laporan	3	3			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pemerintahan Daerah yang Dipelihara						
					5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1			
					5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12			
					5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	34			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1			
2	PERENCANAAN	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & LITBANG		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
						Outcome: 1. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD (N-1) dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD (N+1) 2. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/ isu strategis pada RKPD (N+1) 3. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD (N+1) dengan program prioritas daerah 4.	%	100	100			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD (N+1) dengan pagu anggaran						
					5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						
						Output: Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Dokumen	4	4			
					5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik						
						Output: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2			
					5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						
						Output: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	6	6			
					5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	19	19			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)	Dokumen	5	5			
					5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
						Output: Keluaran : Jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring pembangunan daerah	Laporan	1	1			
					5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	3			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3	PERENCANAAN	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & LITBANG		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
						Outcome: 1. Persentase indikator kinerja utama perangkat daerah yang tercapai 2. Persentase indikator kinerja kunci peranagkat daerah yang tercapai	%	83.20	80			
					5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
						Output: Keluaran : Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	16	16			
					5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
						Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen	50	50			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
					5.01.03.2. 01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
						Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	25	25			
					5.01.03.2. 01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJM						
						Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	Dokumen	26	26			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
					5.01.03.2. 01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
						Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	9	9			
					5.01.03.2. 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						
						Output: Keluaran : Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	7	7			
					5.01.03.2. 02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
						Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	4			
					5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	4	4			
					5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
						Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam	Perangkat Daerah	3	3			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA						
					5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						
						Output: Keluaran : Jumlah laporan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	6	6			
					5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
						Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	4	4			
					5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	Laporan	4	4			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur						
					5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
						Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2	2			
					5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	2			
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & LITBANG		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
						Outcome: Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian Dalam	%	100	70			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Perencanaan Pembangunan Daerah						
					5.05.02.2. 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						
						Output: Keluaran : Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan	Laporan	2	2			
					5.05.02.2. 01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Re						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1	0			
					5.05.02.2. 01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	1			
					5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						
						Output: Keluaran : Jumlah inovasi yang dihasilkan	Inovasi	40	20			
					5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Ketepatan Pengesahan APBD	jadwal	Jadwal	Tepat Waktu	100
2	Ketepatan Penyusunan Laporan Keuangan	jadwal	Jadwal	Tepat Waktu	100
3	Persentase Kesesuaian Database Terkait Total Nilai BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Daerah	%	100	100	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun anggaran berbasis kinerja	%	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	100	100	100
4	Persentase Penatausahaan BMD sesuai aturan	%	100	100	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	KEUANGAN	5.02.0.00 .0.00.02. 0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	PREDIKAT	BB	BB		
				5.02.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Presentase Rekomendasi Hasil Monev yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		
				5.02.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	13		
				5.02.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
					Output: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	13	13		
				5.02.01.2 .01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10	10			
					5.02.01.2 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
						Output: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2			
					5.02.01.2 .01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
						Output: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2			
					5.02.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13			
					5.02.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13	13			
				5.02.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Output: Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100			
				5.02.01.2 .02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
				Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan	12	12			
				5.02.01.2 .02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
				Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12			
				5.02.01.2 .02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
				Output: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12			
				5.02.01.2 .02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Output: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	3			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
					Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	3	3		
				5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100		
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1		
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah Pake Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1		
				5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1			
				5.02.01.2 .06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
				Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1			
				5.02.01.2 .06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
				Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1			
				5.02.01.2 .06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
				Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	10	10			
				5.02.01.2 .06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12			
				5.02.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Output: Sarana Pendukung Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100			
				5.02.01.2 .08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12			
				5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12			
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Output: Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100			
				5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						
				Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2			
				5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
				Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	5	5			



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					
					Output: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	2	2		
				5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
					Output: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	2	2		
				5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					
					Output: Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	4	4		
				5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					
					Output: Jumlah RKA-SKPD Perubahan APBD yang diverifikasi	Dokumen	2	2		
				5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					
					Output: Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	47	47		
				5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					
					Output: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	47	47		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabar						
						Output: Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	6	6			
					5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang						
						Output: Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	3	3			
					5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						
						Output: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	3	4			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					
					Output: Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan ke SKPD	SKPD	47	27		
				5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					
					Output: Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah ke SKPD	SKPD	47	47		
				5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	2	1		
				5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					
					Output: Tertib Administrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persen	100	100		
				5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	10	10		
				5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen dan SKPD	12 dan 47	9			
					5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	10	10			
					5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank d						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	10	9			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas						
						Output: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	12			
					5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan In						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Dokumen	12	12			

307



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	10	10			
					5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab						
						Output: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10			
					5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	OPD	47	0			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3	KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
						Outcome: Presentase Penatausahaan BMD sesuai Aturan dan Presentase Perangkat Daerah yang Menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat Waktu	Persen	100	100			
					5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
						Output: Kesesuaian Database Terkait Total Nilai BMD dengan Aktiva tetap di Neraca	Persen	100	100			
					5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga						
						Output: Jumlah Penyusunan Standar Harga	Dokumen	130	130			
					5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						
						Output: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	10	10			
					5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	50	50			
					5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	50	50			
					5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	5	5			
					5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1			
					5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Dae						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	13	9			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	10	10			
					5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	10	10			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
3. Badan Pendapatan Daerah					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Persentase realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	10.33	12.74	123.33
2	IKM pelayanan pajak daerah	poin	85	87.94	103.46
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	100
2	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	100	102.22	102.22



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BADAN PENDAPATAN DAERAH										
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.00.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	A		
				5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	124.73		
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		
				5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
					Output: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2		
				5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Persentase Tertib Adminitrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	92.02		
				5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn	Orang/Bulan	12	12		
				5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		
				5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	%	100	133.83		
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	24		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				5.02.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3600	3500		
				5.02.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
					Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yng Disediakan	Paket	500	499		
				5.02.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
					Output: Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Paket	300	299		
				5.02.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
					Output: Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	200	190		
				5.02.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
					Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	300	0		
				5.02.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	49			
					5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
						Output: Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	%	93	101.93			
					5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	9			
					5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang	%	100	202.73			
					5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	250	249			
					5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Laporan	12	13			
					5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase Barang Milik daerah Dalam Kondisi Baik	%	95	87.86			
					5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1			
					5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Peralatan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinanya	Unit	8	7			



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	11			
					5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2000	1900			
					5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	100000	90000			
					5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah						
						Output: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	2250	2250			
					5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah						
						Output: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	227	220			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				5.02.04.2 .01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					
					Output: Jumlah Layana Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	3	0		
				5.02.04.2 .01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					
					Output: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	12		
				5.02.04.2 .01.11	Penagihan Pajak Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen SSPD	250	248		
				5.02.04.2 .01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	25	25		
				5.02.04.2 .01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	15	15		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	100	95			
					5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	11	11			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Sistem Merit	Poin	230	263.5	114.57
2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin/Predikat	2.1	3.24	154.29
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	100
2	Persentase penanganan kasus disiplin ASN	%	100	100	100
3	Rasio pegawai fungsional(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23.84	26.04	109.23
4	Persentase pejabat struktural yang memiliki Diklat PIM	%	14.5	11.75	81.03
5	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76.5	86.49	113.06
6	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100
7	Persentase PNS Pelaksana yang memiliki sertifikat Diklat teknis	%	81	89.16	110.07



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A		
				5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100		
				5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4		
				5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3		
				5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Persentase Tersedianya	%	100	100		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
					5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	27	27			
					5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	11			
					5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100			
					5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2			
					5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2			
					5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
					5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3			
					5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Dokumen	20	20			
					5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	140			
					5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100			
					5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
					5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
						Output: Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0		
					5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		
					5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
						Output: Persentase Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		
					5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1		
					5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7			
					5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30			
2	KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
						Outcome: Persentase Penanganan Kasus Disiplin	%	100	100			
						Outcome: Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	23,84%	26.04			
					5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
						Output: Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang Direncanakan	%	100	100			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
					5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
						Output: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	7	7			
					5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	2	0			
					5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	0			
					5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						
						Output: Persentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	%	100	100			
					5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN						
						Output: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hasil Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	6	6			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
					5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					
						Output: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	2		
					5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN					
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	2	2		
					5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN					
						Output: Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	%	100	50		
					5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center					
						Output: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	1		
					5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					
						Output: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	1	0		
					5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
						Output: Persentase Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	100	100		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
					5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12	12			
					5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						
					Output: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	10	10			
					5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						
					Output: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	100	64			
					5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN						
					Output: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	10	10			
					5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						
					Output: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	0			
					5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
					Output: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	1	1			
3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03.5.04.000.01.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
					Outcome: Persentase Pejabat Struktural yang Memiliki Sertifikat Diklat PIM	%	14,50%	11.75			
					Outcome: Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76,5	86.49			
					Outcome: Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100			
					Outcome: Persentase PNS Pelaksana yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis	%	81	89.16			
					5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis						
					Output: Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100	50			
					5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Umum, Inti, dan Pilihan bagi						
						Output: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1	0			
					5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Pen						
						Output: Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	18	3			
					5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
						Output: Persentase Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	100	50			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
					5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	40	0			
					5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional						
						Output: Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	2	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
5. Inspektorat					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Internal Audit Capability Model (Kapabilitas APIP)	nilai	3.00	3.00	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengawasan	orang	7	7	100
3	Pengawasan internal berbasis resiko	laporan	7	7	100
4	Pengawasan internal reguler	laporan	90	90	100
5	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	20	20	100
6	Persentase tindak lanjut pengawasan eksternal	%	80	73.28	91.6
7	Persentase tindak lanjut pengawasan internal	%	80	81	101.25
8	Tindak lanjut rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu	%	80	83	103.75



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INSPEKTORAT										
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
1	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.0 0.0.00.0 1.0000	INSPEKTORAT		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
						Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	
					6.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						Output: Persentase kinerja perencanaan perangkat daerah	%	100	100	
					6.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	48	48	
					6.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Output: Persentase kinerja keuangan	%	100	96	
					6.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	46	46	
					6.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	5	
					6.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					Output: Persentase kompetensi ASN	%	100	98		
				6.01.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
					Output: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	3		
				6.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Persentase kelengkapan administrasi ASN	%	100	100		
				6.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	16	16		
				6.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	59	59		
				6.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
					Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	11	11		
				6.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
					Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	9	9		
				6.01.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					Output: Tersedianya Bahan/Material	Paket	27	27		
				6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
					Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6		
				6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Output: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	95		
				6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
					Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6		
				6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Output: Jumlah Persentase penunjang pemerintahan daerah yang dirawat	%	100	100		
				6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					
					Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				6.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
					Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	21		
2	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00 .0.00.01. 0000	INSPEKTORAT	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
					Outcome: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Ditindaklanjuti	%	85	100		
				6.01.02. 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
					Output: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Ditindaklanjuti	%	73	73		
				6.01.02. 2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					
					Output: Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	7	7		
				6.01.02. 2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					
					Output: Jumlah Laporan hasil Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	47	47		
				6.01.02. 2.01.03	Reviu Laporan Kinerja					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Reviu laporan Kinerja	Laporan	1	1		
				6.01.02. 2.01.04	Reviu Laporan Keuangan					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Reviu laporan Keuangan	Laporan	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				6.01.02. 2.01.05	Pengawasan Desa					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	17	17		
				6.01.02. 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Laporan	1	1		
				6.01.02. 2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	1		
3	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00 .0.00.01. 0000	INSPEKTORAT	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
					Outcome: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Ditindaklanjuti	%	100	99		
				6.01.03. 2.02	Pendampingan dan Asistensi					
					Output: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Ditindaklanjuti	%	100	99		
				6.01.03. 2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					
					Output: Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	3	3		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					6.01.03. 2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						
						Output: Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	5	5			
					6.01.03. 2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						
						Output: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	1	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
6. Sekretariat Daerah					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	68	56.76	83.47
2	Nilai SAKIP	Nilai	BB	B	0
3	Nilai LPPD Perangkat Daerah	Nilai	2.65	2.50	94.34
4	Nilai Kematangan Organisasi	nilai	40	33.19	82.98
5	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	nilai	86	84.36	98.09
6	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Predikat	Cukup	cukup	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	A	100
2	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	95	95
3	Persentase Capaian Kinerja program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100
4	Nilai Kematangan Organisasi	Nilai	43	40	93.02
5	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	nilai	86	86.20	100.23



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SEKRETARIAT DAERAH										
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: 1. Nilai SAKIP 2. Nilai Kematangan Organisasi 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	100		
				4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100		
				4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN	2	2		
				4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
					Output: Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DOKUMEN	2	2		
				4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DOKUMEN	2	2			
					4.01.01.2 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
						Output: Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DOKUMEN	1	1			
					4.01.01.2 .01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
						Output: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DOKUMEN	1	1			
					4.01.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAPORAN	1	1			
					4.01.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAPORAN	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Persentase Administrasi Keuangan	%	100	100		
				4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORANG	200	200		
				4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DOKUMEN	1	1		
				4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
					Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LAPORAN	1	1		
				4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					
					Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	LAPORAN	1	1		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
					Output: Jumlah Laporan Prognosis	LAPORAN	1	1		
				4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
					Output: Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100		
				4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
					Output: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAKET	4	4		
				4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan	%	100	100		
				4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	PAKET	1	1		
				4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	1	1		
				4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	12	12		
				4.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
					Output: Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	12	12		
				4.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
					Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	3	3		
				4.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
					Output: Persentase pengadaan barang milik daerah	%	100	100		
				4.01.01.2 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
					Output: Persentase Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	100	100		
				4.01.01.2 .07.05	Pengadaan Mebel					
					Output: Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	PAKET	1	1		
				4.01.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
					Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	UNIT	1	1		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100			
					4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LAPORAN	12	12			
					4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	LAPORAN	12	12			
					4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LAPORAN	12	12			
					4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	LAPORAN	12	12			
					4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Persentase BMD yang dipelihara	%	100	100			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					4.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	UNIT	4	4			
					4.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	UNIT	25	25			
					4.01.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	UNIT	50	50			
					4.01.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	LAPORAN	1	1			
					4.01.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	LAPORAN	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
					Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					
				4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
					Output: Jumlah Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	%	100	100		
				4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
					Output: Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ORANG	2	2		
				4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
					Output: Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ORANG	2	2		
				4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
					Output: Pesentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Pimpinan	%	100	100		
				4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	BULAN	12	12	
				4.01.01.2.12.02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				
						Output: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	BULAN	12	12	
				4.01.01.2.12.03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				
						Output: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	BULAN	12	12	
				4.01.01.2.13		Penataan Organisasi				
						Output: Persentase Fasilitasi penataan organisasi	%	100	100	
				4.01.01.2.13.01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
						Output: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	DOKUMEN	2	2	
				4.01.01.2.13.02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
						Output: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	LAPORAN	1	1	



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					
					Output: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	DOKUMEN	2	2		
				4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	LAPORAN	1	0		
				4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	DOKUMEN	1	0		
				4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					
					Output: Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100		
				4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	LAPORAN	5	5		
				4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	LAPORAN	2	2		
				4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	LAPORAN	5	5			
2	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
						Outcome: Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100			
					4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						
						Output: Persentase fasilitasi tata pemerintahan	%	100	100			
					4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	DOKUMEN	2	2			
					4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	DOKUMEN	2	2			
					4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						
						Output: Jumlah Dokumentasi Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	DOKUMEN	2	2			
					4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						
						Output: Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100			
					4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelaan Bina Mental Spiritual	DOKUMEN	20	20		
				4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	DOKUMEN	25	25		
				4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi UrusanKepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	DOKUMEN	20	20		
				4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					
					Output: Persentase	%	100	100		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Fasilitasi Hukum						
				4.01.02.2 .03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						
				Output: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	PRODUK	815	815			
				4.01.02.2 .03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum						
				Output: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	KASUS	70	70			
				4.01.02.2 .03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						
				Output: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	PRODUK	450	450			
				4.01.02.2 .04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah						
				Output: Persentase Fasilitasi Kerjasama	%	100	100			
				4.01.02.2 .04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						
				Output: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri	DOKUMEN	5	5			
				4.01.02.2 .04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						
				Output: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja sama Dalam Luar Negeri	DOKUMEN	2	2			
				4.01.02.2 .04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						
				Output: Jumlah laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	LAPORAN	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
					Outcome: Persentase capaian kinerja program perekonomian dan pembangunan	%	100	100		
				4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
					Output: Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian	%	100	100		
				4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					
					Output: Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan	DOKUMEN	5	5		
				4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	LAPORAN	2	2		
				4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	DOKUMEN	2	2		
				4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
					Output: Persentase Fasilitasi administrasi pembangunan	%	100	100		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	DOKUMEN	15	15		
				4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	LAPORAN	2	2		
				4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	LAPORAN	2	2		
				4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
					Output: Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	%	100	100		
				4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	DOKUMEN	50	50		
				4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	DOKUMEN	55	55		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4.01.03.2 .03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					
					Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	ORANG	150	150		
				4.01.03.2 .04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					
					Output: Persentase Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	100		
				4.01.03.2 .04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan,	DOKUMEN	5	5		
				4.01.03.2 .04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber	DOKUMEN	12	12		
				4.01.03.2 .04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	DOKUMEN	17	17		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.						



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
7. Sekretariat DPRD					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD Kab. Serdang Bedagai	poin	80	95	118.75
2	Persentase Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran ke Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100
3	Persentase Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	%	100	100	100
4	Persentase tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD	%	100	100	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase capaian program dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPRD	%	100	100	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SEKRETARIAT DPRD										
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	SEKRETARIAT DPRD	4.02.0.00 .0.00.01. 0000	SEKRETARIAT DPRD		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
						Outcome: Persentase capaian program dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPRD	%	100	100	
					4.02.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						Output: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen evaluasi kinerja opd yang terselesaikan tepat waktu	%	100	100	
					4.02.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Output: Jumlah dokumen perencanaan yang disusun renstra, renja dan P-renja	Dokumen	2	2	
					4.02.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
						Output: Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun	Dokumen	1	1	



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
					Output: Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD yang disusun	Dokumen	1	1		
				4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
					Output: Jumlah DPA yang	Dokumen	1	1		
				4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
					Output: Jumlah DPA Perubahan tersusun	Dokumen	1	1		
				4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
					Output: Jumlah dokumen SAKIP	Set	1	1		
				4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Persentase capaian kegiatan penyediaan administrasi keuangan opd	%	100	100		
				4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1		
				4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Output: Pembayaran honorarium PPTK, PPK, PPBJ, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
					Output: Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
					Output: Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun	Dokumen	1	1		
				4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
					Output: Persentase capaian kegiatan penyediaan administrasi administrasi kepegawaian opd	%	100	100		
				4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
					Output: Jumlah Pakaian khusushari-hari tertentu	Stel	45	45		
				4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Output: Jumlah Pakaian dinas dan atribut DPRD	Orang	45	45		
				4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
					Output: Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	Orang	28	28		
				4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Persentase capaian kegiatan penyediaan administrasi umum opd	%	100	100		
				4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: /internet dan jaringannya	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah penyediaan atk, peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
					Output: Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	item	3	3		
				4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
					Output: Jumlah ketersediaan logistik kebutuhan kantor	Bulan	12	12		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
					Output: Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
					Output: Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan buku peraturan per UU	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material					
					Output: jumlah ketersediaan bahan material, plakat dan cenderamata	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu					
					Output: Jumlah fasilitas tamu- tamu dinas	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
					Output: Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Output: Jumlah ketersediaan peralatan yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik	Item	3	3		
				4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
					Output: Persentase capaian kegiatan pengadaan barang milik daerah pada opd	%	100	100		
				4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					
					Output: Jumlah Ketersediaan mebel kebutuhan kantor	Set	2	2		
				4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
					Output: Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	Unit	4	4		
				4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
					Output: Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	Paket	2	2		
				4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
					Output: Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Paket	2	2		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Output: Persentase penyediaan jasa penunjang pada opd yang terfasilitasi	%	100	100		
				4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
					Output: Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
					Output: Jumlah pembayaran rekening telepon, faksimili, dan tersedianya jasa pengelolaan web/internet	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
					Output: Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor, ketersediaan alat bahan pembersih dan Jumlah kendaraan jabatan dan operasional yang diasuransikan	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada opd	%	100	100			
					4.02.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						
						Output: jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	Kendaraan	5	5			
					4.02.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Kendaraan	12	12			
					4.02.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Komputer/PC/notebook dan printer yang dipelihara	Unit	85	85			
					4.02.01.2 .09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
						Output: jumlah aset tetap lainnya (genset) yang terpelihara	Unit	1	1			
					4.02.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Output: Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung/bangunan kantor	Paket	4	4		
				4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
					Output: Jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor ; AC, dll	Unit	50	50		
				4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
					Output: Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor	Item	2	2		
				4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
					Output: Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang difasilitasi	%	100	100		
				4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					
					Output: Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan DPRD	Tahun	1	1		
				4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Orang	45	45		
				4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					
					Output: Jumlah penerima manfaat medical check up	Orang	45	45		
				4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD					
					Output: Persentase layanan administrasi DPRD yang difasilitasi	%	100	100		
				4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD					
					Output: Jumlah fasilitasi kegiatan fraksi	Bulan	12	12		
				4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					
					Output: Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Bulan	12	12		
2	SEKRETARIAT DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
					Outcome: Persentase capaian program dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPRD	%	100	100		
				4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
					Output: Persentase pembahasan dan penyusunan peraturan	%	100	100		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4.02.02.2.01.01	daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi					
					Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					
					Output: Jumlah program pembentukan perda yang ditetapkan	Dokumen	1	1		
				4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					
					Output: jumlah ranperda yang dibahas dan ditetapkan	perda	12	12		
				4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					
					Output: Jumlah peraturan/perda /produ khukum/regulasi yg dikaji	tahun	1	0		
				4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik					
					Output: Jumlah naskah akademik yang disusun	Naskah	1	1		
				4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran					
					Output: Persentase fasilitasi rapat terkait pembahasan kebijakan anggaran	%	100	100		
				4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS					
					Output: jumlah pembahasan KUA PPAS	kegiatan	1	1		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
				Output: jumlah pembahasan KUPA dan PPAS perubahan	kegiatan	1	1			
				4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD						
				Output: jumlah pembahasan APBD	kegiatan	1	1			
				4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan						
				Output: jumlah pembahasan APBD perubahan	kegiatan	1	1			
				4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester						
				Output: Jumlah pembahasan laporan semester dan prognosis	kegiatan	1	0			
				4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						
				Output: jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD	kegiatan	1	1			
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						
				Output: Persentase fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					
						Output: jumlah pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	kegiatan	12	12		
					4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					
						Output: jumlah pengawasan bidang Infrastruktur	kegiatan	12	12		
					4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					
						Output: jumlah pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	kegiatan	12	12		
					4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					
						Output: jumlah pengawasan bidang perekonomian	kegiatan	12	12		
					4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					
						Output: jumlah pengawasan bidang sumber daya alam	kegiatan	12	12		
					4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: jumlah pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan	kegiatan	12	12			
				4.02.02.2 .03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran						
				Output: jumlah pengawasan bidang penggunaan anggaran	kegiatan	12	12			
				4.02.02.2 .03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						
				Output: Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Pembahasan LKPJ	dokumen	4	4			
				4.02.02.2 .04 Peningkatan Kapasitas DPRD						
				Output: Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	%	100	100			
				4.02.02.2 .04.02 Pendalaman Tugas DPRD						
				Output: jumlah pelaksanaan bimtek/workshop	kegiatan	6	6			
				4.02.02.2 .04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan						
				Output: Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	bulan	12	12			
				4.02.02.2 .04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Output: jumlah kelompok pakar/ tim ahli	orang	7	7		
				4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					
					Output: jumlah tenaga ahli fraksi	orang	8	8		
				4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					
					Output: Jumlah pelaksanaan kegiatan silaturahmi/halal bihalal	kegiatan	1	1		
				4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD					
					Output: Jumlah penyusunan program kerja (renja) DPRD	kegiatan	1	1		
				4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
					Output: Persentase terserap dan terhimpunnya aspirasi masyarakat	%	100	100		
				4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah					
					Output: jumlah pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah	kegiatan	12	12		
				4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD					
					Output: Jumlah Dokumen Pokir tersusun	set	1	1		
				4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: jumlah kegiatan reses	masa persidangan	3	3	
				4.02.02.2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
						Output: Persentase fasilitasi kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	%	100	0	
				4.02.02.2.06.02		Pengawasan Kode Etik DPRD				
						Output: jumlah pengawasan kode etik DPRD	kegiatan	12	0	
				4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				
						Output: Persentase fasilitasi tugas DPRD	%	100	100	
				4.02.02.2.08.01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				
						Output: Jumlah koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	kali	21	21	
				4.02.02.2.08.02		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				
						Output: Jumlah laporan kinerja yang disusun	dokumen	1	1	
				4.02.02.2.08.03		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				
						Output: Jumlah rapat badan musyawarah	kali	12	12	
				4.02.02.2.08.04		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah pimpinan DPRD yang difasilitasi pelaksanaan tugasnya	orang	4	4			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Angka konflik SARA	angka	0	0	100
2	Persentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100	100
3	Persentase penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual untuk siswa sekolah menengah	%	10.25	10.32	100.68
4	Cakupan pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	15	14.28	95.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	75	74.99	99.99
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar yang dibina dan terverifikasi	%	10	10.53	105.3
4	Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	70	44.63	63.76
5	Persentase penanganan informasi potensi konflik	%	100	100	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.0.00 .0.00.01. 0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkat kan Nilai SAKIP OPD	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan Kegiatan (Efisiensi Anggaran) - Kurangnya Sumberdaya Manusia yang ada di Badan Kesbangpol - Minimnya peralatan Kerja seperti komputer/Laptop dan sarana prasarana untuk bekerja	-Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia - Menggunakan Peralatan kerja seadanya - penyusunan dokumen SAKIP tepat waktu	-
						Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB			
					8.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
						Output: Tersajinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1			
					8.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	17	17			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
					8.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	10	10		
					8.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
						Output: Tersajinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1		
					8.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		
					8.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		
					8.01.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1			
					8.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2			
					8.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3			
					8.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	15			
					8.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	510	510			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
					8.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					8.01.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1			
					8.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1			
					8.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12			
					8.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	9			
					8.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
						Output: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1			
					8.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2			
					8.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1			
					8.01.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
						Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6			
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.0.00 .0.00.01. 0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan kesekolah sekolah/masyarakat	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				Menurunnya pemahaman dan aktualisasi terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Mewujudkan persatuan, rasa nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan bermasyarakat yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku serta memberi pemahaman dan dasar-dasar mengenai bangsa Indonesia.	Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai sudah melaksanakan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembaharuan kebangsaan bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan ke-sekolah-sekolah
						Outcome: Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Tahun	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
					8.01.02.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
						Output: Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tahun	1	1			
					8.01.02.2 .01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1000	1000			
3	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.0.00 .0.00.01. 0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Bupati Serdang Bedagai telah menaikkan Bantuan	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN				Pelaksanaan pendidikan politik belum maksimal dikarenakan banyaknya efisiensi anggaran	Meningkatkan fungsi partai politik di daerah dalam melaksanakan pendidikan	Anggaran bantuan keuangan Partai Politik saat ini sudah



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
				keuangan parpol untuk tahun 2024, dimaksudkan untuk menunjang kegiatan parpol untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten		MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGE				di 2023	politik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan keuangan partai politik di daerah, meningkatkan kualitas administrasi partai politik di daerah dan meningkatkan tata kelola partai politik di daerah.	dianggarkan kenaikannya untuk tahun 2024 yang sebelumnya 3.100/suara menjadi 4.500/suara Dan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik tersebut juga sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
						Outcome: Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilu	Tahun	1	1			
					8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politi						
						Output: Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,	Tahun	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
						Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
					8.01.03.2 .01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, P						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	10	10			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
4	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.0.00 .0.00.01. 0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Melakukan Koordinasi pemantauan serta verifikasi keberadaan Ormas	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				Efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	Akan terus mengusulkan program dan kegiatan ini agar mendapat anggaran APBD di tahun berikutnya	-
						Outcome: Persentase Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar yang dibina dan terverifikasi	Tahun	1	1			
					8.01.04.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi						
						Output: Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tahun	1	1			
					8.01.04.2 .01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Laporan	1	1			
5	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.0.00.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	sosialisasi P4GN ke sekolah-sekolah sebagai salah satu cara untuk menuntaskan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				Efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	Akan terus mengusulkan program dan kegiatan ini agar mendapat anggaran APBD di tahun berikutnya	-
						Outcome: Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Tahun	1	1			
					8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tahun	1	1			
					8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalag						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	10	10			
6	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Melakukan Deteksi Dini	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN				1. Masalah mengenai Tanah di desa paya mabar oleh kelompok Serikat Tani Suka Damai	Melakukan Rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan instansi terkait serta	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah membentuk



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
				Penanganan Konflik sosial, melalui Rapat-rapat koordinasi dengan instansiinterk ait melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota (FORKOPIM DA), Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM). Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM), dan lain-lain.		FASILITASI PENANGANAN KONFLIK				terhadap lahan seluas 151 ha di afdiling III 2. Sekelompok Tani Rakyat Menggugat Perampasan Tanah (RAMPAH) Kabupaten Sedrang Bedagai memninta kepada Bupati Sergai agar mencabut surat rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Soeloeng Laoet. 3. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok 80 kecamatan tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai mengenai masalah soal HGU PT. DMK seluas 499,2 hektar yang telah berakhir pada tanggal 31 desember 1997 dengan berbudi daya tambak udang yang berubah fungsi menjadi kebun kelapa sawit sebelum berakhir HGU 4. Sengketa Tanah HGU yang	pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) yang di fasilitasi oleh Badan Kesatuan bangsa dan politik yang susunan keanggotaan nya terdiri dari tokoh masyarakat, agama dan pemuda yang bertugas dalam mendeteksi dini dan cegah dini dalam hal penanganan konflik sosial yang akan dan terjadi diwilayah masing-masing serta pemerintah juga telah membentuk dan melaksanaka n kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
										dipakai oleh PT. Bridgestone seluas 273, 91 hektare yang sudah lama berakhir dan agar Bupati Serdang Bedagai untuk tidak memperpanjang HGU PT. Bridgestone tutur wendy hutabarat 5. Aksi damai oleh Aliansi Muslim Peduli Ulama yang di koordinis oleh Firman Hanafi mengenai adantya postingan beberapa waktu lalau yang di anggap melece		Keagamaan Masyarakat (PAKEM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota (FORKOPIM DA)
						Outcome: Persentase penanganan informasi potensi konflik	Tahun	1	1			
					8.01.06.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik So						
						Output: Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan	Tahun	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
						Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						
					8.01.06.2 .01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Ten						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150	150			
					8.01.06.2 .01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Ketahanan Daerah(IKD)terhadap Bencana	Poin	0.50	0.51	102
2	Tingkat waktu darurat(Response Time Rate) Kejadian Bencana	Jam	2	2	100
3	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan tanggap darurat bencana	%	100	100	100
4	Persentase rumah yang mendapat bantuan stimulan	%	100	100	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase Masyarakat Terdampak Bencana Yang Diselamatkan	%	100	100	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.05.1.04.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
					Outcome: ;Persentase rumah masyarakat yang diperbaiki akibat bencana alam (sesuai laporan kejadian bencana	%	59	59		
				1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
					Output: Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota	tahun	1	1		
				1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					
					Output: Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terehabilitasi	unit	23	1		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	1.05.1.04.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMAS ALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
	MASYARAKAT											
						Outcome: Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat	BB	BB			
					1.05.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
						Output: Persentase Administrasi Keuangan yang terpenuhi	%	100	50			
					1.05.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	20	20			
					1.05.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	tahun	1	0			
					1.05.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	1	1			
					1.05.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diisediakan	paket	1	1			
					1.05.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMAS ALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang diisediakan	paket	1	1			
					1.05.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diisediakan	dokumen	1	1			
					1.05.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	20	20			
					1.05.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	tahun	1	1			
					1.05.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12			
					1.05.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: persentase barang yang terpelihara	%	100	100			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at					
					Output: jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	5	5		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.1.04.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
					Outcome: Persentase masyarakat terdampak bencana yang diselamatkan	%	100	100		
				1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
					Output: Terlaksananya pencegahn dan kesiapsiagaan terhadap bencana	tahun	1	1		
				1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					
					Output: jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	orang	150	150		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMAS ALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					1.05.03. 2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
						Output: jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara , keluarga maupun petugas	unit	47	47			
					1.05.03. 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
						Output: tersedianya bantuan bahan logistik bencana	tahun	1	1			
					1.05.03. 2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
						Output: jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	700	700			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
10. Kecamatan Sei Bamban					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	85	85	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	82	84.80	103.41
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	B	0
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	82	84.80	103.41
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	100	100	100
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	100	100	100
5	Persentase Potensi Konflik Saran Yang Ditangani	%	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN SEI BAMBAN										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.13. 0000	KECAMATAN SEI BAMBAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Predikat	BB	B		
				7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Tersedianya dokumen perencanaan	Tahun	1	0		
				7.01.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Evaluasi	Tahun	1	0		
				7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Terpenuhinya Administrasi Umum	Tahun	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang tersedia	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah ATK yang tersedia	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
					Output: Jumlah alat kebersihan yang tersedia	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
					Output: Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
					Output: Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					
					Output: Jumlah surat kabar/ majalah tersedia	Tahun	1	0		
				7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
					Output: Jumlah rapat yang dilaksanakan	Tahun	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				7.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
					Output: Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah	Tahun	1	0		
				7.01.01.2 .07.05	Pengadaan Mebel					
					Output: Jumlah Mebel yang diadakan	Tahun	1	0		
				7.01.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
					Output: Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Tahun	1	0		
				7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Output: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
					Output: Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Output: Terpeliharanya barang milik daerah	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at					
					Output: Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Tahun	1	1		



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Output: Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Tahun	1	1	
				7.01.02.2 .04.01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
						Output: Terlaksananya kegiatan pemerintahan terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Tahun	1	1	
3	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.13. 0000	KECAMATAN SEI BAMBAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
						Outcome: PERSENTASE POTENSI KOMPLIK SARA YANG DITANGANI	%	100	100	
				7.01.05.2 .01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
						Output: Terselenggaranya kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	Tahun	1	1	
				7.01.05.2 .01.01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, P				
						Output: Jumlah kegiatan kebangsaan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	
				7.01.05.2 .01.04		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,				



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
						Output: Jumlah kegiatan kerukunan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2			
4	KECAMATAN	7.01.0.00.000.13.0000	KECAMATAN SEI BAMBAN		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
						Outcome: PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL YANG TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH DESA	%	0	0			
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
						Output: Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tahun	0	0			
					7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						
						Output: Terfasilitasinya kegiatan pemilihan kepala desa	Tahun	1	0			
					7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
						Output: Jumlah desa yang dilakukan pendampingan	Tahun	1	0			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
11. Kecamatan Bandar Khalifah					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	85	83	97.65
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	87.50	86.50	98.86
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	87.50	86.50	98.86
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	100	100	100
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	100	100	100
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN BANDAR KHALIFAH										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.07. 0000	KECAMATAN BANDAR KHALIFAH		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
						Outcome: nilai saki perangkat daerah	Predikat	BB	BB	
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						Output: tersedianya dokumen perencanaan	tahun	1	0	
					7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Output: jumlah dokmen perencanaan perangkat daerah	dokumen	12	12	
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Output: terpenuhinya administrasi keuangan	tahun	1	0	
					7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Output: jumlah orang yang	Orang/Perbulan	17	17	



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						menerima gaji dan tunjangan						
					7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2			
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Terpenuhinya Administrasi Umum	tahun	1	1			
					7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	4			
					7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	20	20			
					7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	12			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
					7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	4	4			
					7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	6			
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	90			
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tahun	1	0			
					7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				7.01.01.2.08.04						
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
						Output: Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor dan Perlengkapan Kantor	Laporan	4	4	
				7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
						Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tahun	1	0	
				7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN BANDAR KHALIFAH	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARANN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Outcome: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	tahun	1	1			
					7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
						Output: Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	tahun	1	1			
					7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
						Output: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1			
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN BANDAR KHALIFAH		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Outcome: Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	tahun	1	1			
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
						Output: Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	tahun	1	1			
					7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
						Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	tahun	1	1			
4	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN BANDAR KHALIFAH		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
						Outcome: Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	tahun	1	1			
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	tahun	1	1			
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, P						
						Output: Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	600	600			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
					7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
					Output: jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	orang	600	600			
5	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN BANDAR KHALIFAH		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
					Outcome: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintahan Desa	tahun	1	1			
					7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tahun	1	1			
					7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Laporan	12	12			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
12. Kecamatan Bintang Bayu					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	81	85	104.94
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	81	82	101.23
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	81	82	101.23
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	81	85	104.94
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	0	0	100
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN BINTANG BAYU										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00.00.00.16.00.00	KECAMATAN BINTANG BAYU	Pendelegasian Camat kepada Kepala Seksi dan Kasubbag dilakukan dengan tepat dan terarah untuk meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui nilai Sakip Kecamatan Bintang Bayu	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah Sarana dan Prasarana masih kurang guna memaksimalkan pelayanan	Dilakukan usulan untuk sarana dan prasarana kecamatan kecamatan tentunya melalui koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi terkait	Pemerintah Kecamatan Bintang Bayu telah melaksanakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan terus berupaya untuk melakukan pelayanan dengan prima
						Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan	Tahun	1	1	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Bintang Bayu	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Masih kurang koordinasi antar pihak yang terkait, serta fasilitas sarana dan prasarana kurang	Melakukan koordinasi antar pihak terkait untuk mencapai penyelesaian dokumen perencanaan	Pemerintah Kec. Bintang Bayu senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak dan instansi



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										mendukung	dengan efektif dan efisien	terkait agar dokumen perencanaan yang dihasilkan lebih baik dan tepat
						Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5			
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
						Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun	1	1			
				Melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kinerja ASN Kec. Bintang Bayu di masing-masing bidang/seksi	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Masih adanya kurang koordinasi antar ASN di Pemerintah Kec. Bintang Bayu	Dilakukan rapat internal di Pemerintah Kec. Bintang Bayu agar koordinasi antar ASN berjalan dengan baik	Pemerintah Kec. Bintang Bayu senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi antar seksi/sub bagian
						Output: Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1			
				Terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN Kecamatan Bintang Bayu	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Tidak ada permasalahan yang terjadi, koordinasi selama ini berjalan dengan baik	Diharapkan koordinasi dan sinergitas dengan pihak terkait tetap berjalan	Pemerintah Kec. Bintang Bayu senantiasa melakukan koordinasi dan memaksimalkan kinerja



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											dengan baik	
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2			
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun	1	1			
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec.Bintang Bayu	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Adanya refocusing anggaran menyebabkan sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor Kec. Bintang Bayu belum optimal	Pemerintah Kec. Bintang Bayu tetap berupaya untuk memaksimalkan kinerja	Pemerintah Kec. Bintang Bayu diharapkan tetap melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan baik
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Bintang Bayu	7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Adanya refocusing anggaran menyebabkan sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor Kec. Bintang Bayu belum optimal	Pemerintah Kec. Bintang Bayu tetap berupaya untuk memaksimalkan kinerja	Pemerintah Kec. Bintang Bayu diharapkan tetap melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan baik
						Output: Jumlah Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	15			
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kec. Bintang Bayu	7.01.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Adanya refocusing anggaran menyebabkan sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor Kec. Bintang Bayu belum optimal	Pemerintah Kec. Bintang Bayu tetap berupaya untuk memaksimalkan kinerja	Pemerintah Kec. Bintang Bayu diharapkan tetap melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan baik
						Output: Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6			
				Tersedianya penyediaan Bahan Logistik Kantor di	7.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Adanya refocusing anggaran menyebabkan	Pemerintah Kec. Bintang Bayu tetap berupaya	Pemerintah Kec. Bintang Bayu diharapkan tetap



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kecamatan Bintang Bayu						n sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor Kec. Bintang Bayu belum optimal	untuk memaksimalkan kinerja	melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan baik
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12			
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kec. Bintang Bayu	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Adanya refocusing anggaran menyebabkan sub kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan Kec. Bintang Bayu belum optimal	Pemerintah Kec. Bintang Bayu tetap berupaya untuk memaksimalkan kinerja	Pemerintah Kec. Bintang Bayu diharapkan tetap melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan baik
						Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	17			
				ASN Kecamatan Bintang Bayu melakukan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD guna	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyerapan anggaran untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD belum optimal	ASN Kec. Bintang Bayu tetap berupaya untuk mengoptimalkan kinerja	Pemerintah Kec. Bintang Bayu diharapkan tetap mengoptimalkan kinerjanya



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				mendukung peningkatan kinerja sesuai dengan tupoksinya serta untuk meningkatkan kompetensi ASN						dikarenakan adanya refocusing anggaran		
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12			
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk meningkatkan pelayanan publik Kec. Bintang Bayu	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Masih kurang optimalnya kinerja jasa pelayanan umum Kecamatan Bintang Bayu	Pemerintah Kec. Bintang Bayu akan melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan kinerja jasa pelayanan umum kantor	Pemerintah Kec. Bintang Bayu melakukan evaluasi atas kinerja jasa pelayanan umum terutama dalam hal kedisiplinan dan sadar akan tupoksi masing-masing
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12			
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Tahun	1	1			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kantor Kec. Bintang Bayu	7.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa				Terjadinya refocusing anggaran	Pemerintah Kec. Bintang Bayu tetap berupaya untuk memaksimalkan kinerja	Pemerintah Kec. Bintang Bayu diharapkan tetap melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan baik
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1			
				Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.01.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terjadinya refocusing anggaran menyebabkan sub kegiatan penyediaan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan	Pemerintah Kec. Bintang Bayu tetap berupaya untuk memaksimalkan kinerja	Pemerintah Kec. Bintang Bayu diharapkan tetap melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								bangunan lainnya belum terlaksana dengan optimal		dengan baik
				Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Unit	1	1			
2	KECAMATAN	7.01.0.00. 0.00.16.00 00	KECAMATAN BINTANG BAYU	Penyusunan rencana kerja yang sistematis untuk terlaksananya pelayanan publik yang prima serta terciptanya koordinasi dengan baik	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Masih ada masyarakat yang belum mengetahui prosedur dalam mengurus kepentingan yang ingin mereka ajukan	Bagian Pelayanan Umum Kecamatan Bintang Bayu telah memasang papan pemberitahu an secara detail mengenai prosedur dokumen apa yang ingin diajukan masyarakat, dan disertai dengan adanya jadwal piket Pegawai yang selalu siap untuk melayani dan mengarahka	Pemerintah Kecamatan Bintang Bayu telah melakukan berbagai upaya dalam pelayanan publik yang dilakukan agar lebih cepat dan ringkas



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											n masyarakat	
						Outcome: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	81	82			
					7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
						Output: Terkoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	81	82			
				Terlaksananya koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins				Koordinasi yang terlaksananya selama ini dapat dikatakan sudah cukup baik, namun tentu kedepan harus dapat ditingkatkan untuk terus bersinergi	Pemerintah Kec. Bintang Bayu senantiasa menjaga Hubungan dan komunikasi serta koordinasi yang baik	Pemerintah Kecamatan Bintang Bayu harus lebih instens menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya
						Output: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Laporan	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
					7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
						Output: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tahun	1	1			
				Melakukan sosialisasi dan monitoring ke desa untuk terwujudnya capaian realisasi Pajak PBB P2	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				Partisipasi masyarakat masih tergolong kurang, hal ini dapat terlihat dalam penagihan Pajak PBB P2 masih banyak wajib pajak yang enggan atau terlambat dalam pembayaran pajak	Pemerintah Kec. Bintang Bayu melakukan door to door untuk meningkatkan pencapaian target PBB P2	Pemerintah Kecamatan Bintang Bayu senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan Pajak PBB P2 tentunya dengan melakukan berbagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait
						Output: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen	19	19			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3	KECAMATAN	7.01.0.00.00.16.00.00	KECAMATAN BINTANG BAYU	Melaksanakan Forum Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih tergolong rendah karena masyarakat masih beranggapan bahwa pembangunan hanya berupa pembangunan fisik	Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pembangunan tidak hanya tentang pembangunan fisik tapi juga mengenai pembangunan manusia melalui pemberdayaan masyarakat didesa	Pemerintah Kecamatan Bintang Bayu senantiasa berkoordinasi dengan instansi/perangkat terkait agar usulan yang disampaikan dapat terealisasi
						Outcome: Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	%	81	85			
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
						Output: Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	81	85			
				Memfasilitasi forum untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan				Masih kurangnya partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam kegiatan	Pemerintah Kec. Bintang Bayu berupaya untuk memberikan penjelasan dan edukasi	Pemerintah Kec. Bintang Bayu diharapkan melakukan fasilitasi dan pendampingan ke desa



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				masyarakat						pemberdayaan masyarakat	bahwa pemberdayaan masyarakat tersebut sangat penting guna mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan desa	
						Output: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diwilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	4	4			
4	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.16.00.00	KECAMATAN BINTANG BAYU	Penyusunan rencana kegiatan-kegiatan di program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilakukan dengan sistematis dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Partisipasi dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut masih belum merata disetiap kegiatan.	Pemerintah Kecamatan Bintang Bayu akan lebih menyemarakkan setiap kegiatan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta mempersiapkan kegiatan sehingga masyarakat	Pemerintah Kecamatan Bintang Bayu agar meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan diharapkan para pegawai ASN Kecamatan Bintang Bayu melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksinya dan saling



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				matang.							lebih merasa memiliki andil dalam kegiatan yang dilakukann oleh Pemerintah Kecamatan Bintang Bayu	berkoordinasi antara satu dengan lainnya
						Outcome: Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100			
					7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
						Output: Terselenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100			
				Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Hari Besar Nasional di Kecamatan Bintang Bayu	7.01.05.2 .01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila				Masih kurangnya partisipasi dan koordinasi, baik dari masyarakat maupun pihak terkait	Pemerintah Kec. Bintang Bayu berusaha untuk melakukan inovasi melalui rangkaian acara yang lebih	Pemerintah Kec. Bintang Bayu senantiasa berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait sehingga kegiatan dapat berjalan dengan



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											menarik dalam menyambut, maupun dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan	baik
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemerliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	250	250			
				Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Hari - Hari Keagamaan di Kecamatan	7.01.05.2 .01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud				Masih kurangnya partisipasi dan koordinasi, baik dari masyarakat	Pemerintah Kec. Bintang Bayu berusaha untuk melakukan inovasi	Pemerintah Kec. Bintang Bayu senantiasa berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan pihak-



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Bintang Bayu						maupun pihak terkait	melalui rangkaian acara yang lebih menarik dalam menyambut, maupun dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan	pihak terkait sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	810	810			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
13. Kecamatan Dolok Masihul					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	84	84	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Poin	83	83.80	100.96
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	83	83	100
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	91	91	100
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	100	100	100
5	Persentase PotensiKonflik Sara Yang Ditangani	%	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN DOLOK MASIHL										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.03. 0000	KECAMATAN DOLOK MASIHL	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	B	B		
				7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	22	22		
				7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2		
				7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1		
				7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
					Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Paket	1	1		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						disediakan				
				7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi	Laporan	2	0	
				7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	6	6	
				7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
						Output: Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun	1	1	
				7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	1	1	
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN DOLOK MASHUL	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Outcome: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	80	80			
					7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
						Output: Terlaksananya Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan	Tahun	1	1			
					7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
						Output: Jumlah Dokumen Non Perizinan usaha yang dilaksanakan	Dokumen	1	1			
					7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
						Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan pemerintahan	Dokumen	1	1			
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN DOLOK MASIHL		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
						Outcome: Persentase Kehadiran masyarakat dalam Musrenbang	%	90	90			
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
						Output: Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tahun	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
					Output: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Lembaga	1	1		
				7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
					Output: Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tahun	1	2		
				7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
					Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1		
				7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
					Output: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	12	12		
4	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN DOLOK MASIHL	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
					Outcome: Persentase Potensi Trantiban yang di tangani	%	100	100		
				7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Output: Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan ketertiban Umum	Tahun	1	1			
					7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
						Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1			
5	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN DOLOK MASHUL		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
						Outcome: Persentase Potensi Konflik saran yang ditangani	%	100	100			
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
						Output: Terlaksananya Kegiatan Hari-Hari Besar	Tahun	1	1			
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, P						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia	Orang	1500	1500			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
					7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat Beragama, Ras dan golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Orang	3000	3000			
6	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN DOLOK MASIHL		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
						Outcome: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Desa	%	100	100			
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
						Output: Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Tahun	1	1			
					7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	1	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
14. Kecamatan Dolok Merawan					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	83	80	96.39
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	86.50	86.48	99.98
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	poin	86.50	86.48	99.98
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	100	100	100
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	100	100	100
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN DOLOK MERAWAN										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.08. 0000	KECAMATAN DOLOK MERAWAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	B	B		
				7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan	Tahun	1	0		
				7.01.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	4	0		
				7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bulan	23	23		
				7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	2	2			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Output: Terpenuhinya Administrasi Umum	Tahun	1	1			
				7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1			
				7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
				Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1			
				7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	1	0			
				7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
				Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan	Paket	1	1			
				7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	0			
					7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Dok	3	0			
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	117	16			
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1			
					7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Lap	5	5			
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Tahun	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
					Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	1			
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN DOLOK MERAWAN		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti musrenbang dikarenakan banyaknya usulan-usulan masyarakat atau desa yang tidak tertampung bahkan tidak ada di program kegiatan dinas-dinas terkait	Agar dinas-dinas pengampu memberitahukan program kegiatan pembangunan yang ada di dinas terkait kepada desa atau kecamatan sehingga desa dapat menyesuaikan usulan pembangunan desa dengan dinas terkait.	Pemerintahan Kecamatan Dolok Merawan selalu melakukan pendampingan ke desa-desa melalui program pembinaan dan pengawasan desa dan langsung memonitoring terkait pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dan berusaha memperbaiki administrasi desa agar lebih baik ke depannya



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Outcome: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	Tahun	1	1	
				7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
						Output: Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Tahun	2	1	
				7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
						Output: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Lap	1	1	
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN DOLOK MERAWAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
						Outcome: Persentase Kehadiran Masyarakat Dalam Musrenbang	Tahun	1	1	
				7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
						Output: Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tahun	2	1	



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tahun	1	1			
				7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert						
				Output: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara RI dan Instansi Vertikal Di wilayah Kecamatan	Lap	1	0			
				7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
				Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Lap	1	1			
5	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.08. 0000	KECAMATAN DOLOK MERAWAN	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
				Outcome: Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	Tahun	1	1			
				7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
				Output: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tahun	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					7.01.05.2 .01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
					Output: Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	200	200			
					7.01.05.2 .01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
					Output: Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat	orang	100	100			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional						
6	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN DOLOK MERAWAN		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
						Outcome: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintahan Desa	Tahun	1	1			
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
					7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Lap	1	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
15. Kecamatan Kotarih					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	82%	82%	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	80%	84.39%	105.49
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	80%	80%	100
3	Persentase Kehadiran Masyarakat Dalam Musrenbang	%	100%	100%	100
4	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100%	100
5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100%	100%	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11
KECAMATAN KOTARIH												
UNSUR KEWILAYAHAN												
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.02. 0000	KECAMATAN KOTARIH	Pendelegasian Camat kepada Kepala Seksi dan Kasubbag dilakukan dengan tepat dan terarah untuk meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui nilai Sakip Kecamatan Kotarih	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Jumlah Sarana dan Prasarana masih kurang, guna memaksimalka n pelayanan	Dilakukan usulan untuk sarana dan prasarana kecamatan tentunya melalui koordinasi dengan perangkat daerah/insta nsi terkait	Pemerintah Kecamatan Kotarih telah melaksanakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan terus berupaya untuk melakukan pelayanan dengan prima
						Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B			
					7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
						Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun	1	1			
					7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Output: Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	17	17			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1		
				7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Terpenuhinya Administrasi Umum	Tahun	1	1		
				7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		
				7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
					Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	Paket	1	1		
				7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
					Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Yang disediakan	Paket	2	2		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	Paket	1	1			
					7.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang disediakan	Dokumen	1	1			
					7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2			
					7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					7.01.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan	Laporan	1	1			
					7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Yang disediakan	Laporan	5	5			
					7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Tahun	1	1			
					7.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang dipelihara dan	Unit	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						dibayarkan pajak perizinannya						
					7.01.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabi litasi	Unit	1	1			
2	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.02. 0000	KECAMATAN KOTARIH	Melaksanakan Forum Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih tergolong rendah karena masyarakat masih beranggapan bahwa pembangunan hanya berupa pembangunan fisik	Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pembanguna n tidak hanya tentang pembanguna n fisik tapi juga mengenai pembanguna n manusia melalui pemberdaya an masyarakat didedesa	Pemerintah Kotarih senantiasa berkoordinasi dengan instansi/peran gkat terkait agar usulan yang disampaikan dapat terealisasi
						Outcome: Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	%	83	83			
					7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Terkordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	83	83			
					7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
						Output: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	1	1			
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN KOTARIH		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
						Outcome: Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	100	100			
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
						Output: Terkordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tahun	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	1	1			
4	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN KOTARIH	Penyusunan rencana kegiatan-kegiatan di program penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum dilakukan dengan sistematis dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Partisipasi dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut masih belum merata disetiap kegiatan.	Pemerintah Kecamatan Kotarih akan lebih menyemarakkan setiap kegiatan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta mempersiapkan kegiatan sehingga masyarakat lebih merasa memiliki andil dalam kegiatan yang dilakukann oleh Pemerintah Kecamatan Kotarih	Pemerintah Kecamatan Kotarih agar meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan diharapkan para pegawai ASN Kecamatan Kotarih melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksinya dan saling berkoordinasi antara satu dengan lainnya



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Outcome: Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100			
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
						Output: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100			
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100			
					7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
						Output: Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya	Orang	80	80			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional						
5	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN KOTARIH		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
						Outcome: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100			
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
						Output: Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100			
					7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	4			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
16. Kecamatan Pantai Cermin					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	90	90	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	90	90	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	90	100	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	90	90	100
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	90	90	100
4	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	90	90	100
5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	90	90	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN PANTAI CERMIN										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.06. 0000	KECAMATAN PANTAI CERMIN		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Masih rendahnya Tingkat Pengetahuan ASN Kecamatan Pantai Cermin Tentang Tehnologi, Kurangnya Jumlah ASN yang ada di Kecamatan Pantai Cermin	Pemerintah Kecamatan Terus Berupaya untuk meningkatkan Pengetahuan ASN tentang Tehnologi dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada
						Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun	1	1	
					7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun	1	1	
					7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kurangnya Gaji dan Tunjangan ASN	Penambahan dilakukan di P APBD
						Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1	
					7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Ada di Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan	Di geser kegiatan lain
						Output: Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tahun	1	1	



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						ASN						
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Paket	12	2			
					7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah ATK yang tersedia	Dokumen	12	12			
					7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Item	5	5			
					7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12			
					7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1			
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kurangnya Anggaran untuk Perjalanan Luar Daerah	Pergeseran dari kegiatan lain	
						Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	Tahun	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						koordinasi dan konsultasi SKPD						
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
						Output: Jumlah unit gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Paket	1	0			
					7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Output: Jumlah unit gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Paket	2	2			
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Nilai saki perangkat daerah	Laporan	12	0			
					7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah laporan penyediaan Jasa surat menyurat	Laporan	12	12			
					7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	Laporan	12	12			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	1	0			
					7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						
						Output: Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1			
					7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	29	29			
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN PANTAI CERMIN		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Masih rendahnya minat Masyarakat dalam Pembangunan dan Kurangnya Anggaran sehingga ada kegiatan yang	Memberikan Pandangan, saran dan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya Pembangunan untuk	



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								tidak terlaksana	meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
				Outcome: Terlaksananya koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	1	1			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
				Output: Koordinasi/perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	1	1			
				7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait				Kurangnya Minat Masyarakat terhadap Pembangunan masih rendah	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Masyarakat	
				Output: jumlah laporan koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	5	5			
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN PANTAI CERMIN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Outcome: Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	Kegiatan	1	0			
					7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
						Output: Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan Desa	Kegiatan	1	0			
					7.01.03.2 .01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan						
						Output: Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyaraakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan	Kegiatan	1	1			
4	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.06. 0000	KECAMATAN PANTAI CERMIN		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Masih kurangnya Anggaran sehingga masih sulit untuk menghadirkan Masyarakat dalam mengikuti Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa	Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menarik minat Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang diadakan di Desa maupun	Diminta kepada Pemerintaahan Kecamatan Pantai Cermin untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								maupun dikecamatan	di Kecamatan	
					Outcome: Persentase komplik sara yang di tangani	Kegiatan	1	0		
				7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
					Output: jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan	1	0		
				7.01.05.2 .01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, P					
					Output: Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan	Kegiatan	5	5		



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											administrasi Desa	ke Desa desa melalui Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa dan langsung monitoring pengelolaan keuangan desa dan memperbaiki administrasi desa
						Output: Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	keluarga	150	150			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
17. Kecamatan Pegajahan					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	83	83	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	86.5	89.9	103.93
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	86.5	89.9	103.93
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	100	100	100
4	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100	100
5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN PEGAJAHAN										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.14. 0000	KECAMATAN PEGAJAHAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Perdikat	B	B		
				7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun	1	1		
				7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	27	27		
				7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Admsinstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		
				7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Terpenuhinya Adminitrasi Umum	Tahun	1	1		
				7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Paket	1	1			
					7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	Paket	1	1			
					7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket bahan logistik yang disediakan	Paket	1	1			
					7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1			
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1			
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	1			
					7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	Tahun	1	1			
				7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	Laporan	12	12			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Tahun	1	1			
				7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						
				Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang dipeliharadan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1			
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN PEGAJAHAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
				Outcome: Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang	Tahun	1	1			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Tahun	1	1			
					7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins						
						Output: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1			
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN PEGAJAHAN		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
						Outcome: Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	Tahun	1	1			
					7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
						Output: Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tahun	1	1			
					7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
						Output: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Tahun	1	1			
4	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN PEGAJAHAN		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Outcome: persentase potensi konflik sara yang ditangani	Tahun	1	1			
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
						Output: Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Tahun	1	1			
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Pemerintah						
						Output: Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Pemerintah	Orang	500	500			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
						Output: Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Orang	200	200			
5	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN PEGAJAHAN		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
						Outcome: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang telah ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	Tahun	1	1			
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
						Output: Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Tahun	1	1			
					7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	13	13			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
18. Kecamatan Perbaungan					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin			
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat			
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%			
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%			
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%			
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%			
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN PERBAUNGAN										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PERBAUNGAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai saki perangkat Daerah	predikat	B	0		
				7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan	orang/bulan	55	55		
				7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	55	55		
				7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					Output: Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	1	1		
				7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Terpenuhinya Administrasi Umum	dokumen	1	0		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	1	0		
				7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	1		
				7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
					Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga	paket	1	0		
				7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
					Output: Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	paket	2	4		
				7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
					Output: Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	2	1		
				7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
					Output: Jumlah laporan penyelenggaraan	laporan	2	2		



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Output: terpeliharanya barang milik daerah	unit	11	0		
				7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at					
					Output: jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	1	1		
				7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
					Output: jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	10	0		
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PERBAUNGAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
					Outcome: Tingkat kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	100	0		
				7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
					Output: Terkoordinasinya penyelenggraan kegiatan pemerintahan dikecamatan	%	100	0		



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins					
					Output: jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	1	0		
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PERBAUNGAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
					Outcome: persentase potensi komplik sara yang ditangani	%	100	0		
				7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
					Output: terselenggaranya kegiatan urusan sesuai penugasan kepala Daerah	%	100	0		
				7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	200	500			
					7.01.05. 2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras,	orang	250	0			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					
4	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.05. 0000	KECAMATAN PERBAUNGAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
					Outcome: PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL YANG TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH DESA	%	100	0		
				7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
					Output: Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	laporan	28	0		
				7.01.06. 2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
					Output: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	28	0		



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
19. Kecamatan Sei Rampah					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	84	85	101.19
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	82.50	97.33	117.98
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	82	83	101.22
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	91	91.50	100.55
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	100	100	100
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN SEI RAMPAH										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.11. 0000	KECAMATAN SEI RAMPAH	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	B	B		
				7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	1		
				7.01.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1		
				7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12	12		
				7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1			
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Terpenuhinya Administrasi Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1			
					7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	2	2			
					7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1			
					7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2			
					7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1			
					7.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1			
					7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1			
					7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1			
					7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1			
					7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terpeliharanya barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Tahun	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				7.01.01.2.09.02						
				7.01.01.2.09.06						
				7.01.01.2.09.09						
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN SEI RAMPAH	7.01.02						
				7.01.02.2.01						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins					
					Output: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1		
				7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
					Output: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tahun	1	1		
				7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
					Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1		
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN SEI RAMPAH	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
					Outcome: Persentasee Potensi Konflik Sara yang Ditangani	%	100	1		
				7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Output: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tahun	1	1			
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	14	14			
					7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	34	34			
4	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN SEI RAMPAH		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
						Outcome: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100			
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
						Output: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100			
					7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	1	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
20. Kecamatan Serbajadi					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	84%	84%	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	83.20%	83%	99.76
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	83.20%	83%	99.76
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	100%	100%	100
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	100%	100%	100
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100%	100%	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN SERBAJADI										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00.00.00.15.0000	KECAMATAN SERBAJADI	Pendelegasian Camat kepada Kepala Seksi dan Kasubbag dilakukan dengan tepat dan terarah untuk meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui nilai Sakip Kecamatan Serba Jadi	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah Sarana dan Prasarana masih kurang guna memaksimalkan pelayanan	Dilakukan usulan untuk sarana dan prasarana tentunya melalui koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait	Pemerintah Kecamatan Serba Jadi telah melaksanakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan terus berupaya untuk melakukan pelayanan dengan prima
						Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	
				Penyusunan kebutuhan administrasi keuangan Kecamatan serba Jadi	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Kecamatan Serba Jadi terpenuhi dengan baik dan tepat	Pelaksanaan Sub Kegiatan Administrasi Keuangan sudah terpenuhi dengan baik dan tepat	Pemerintah Kecamatan Serba Jadi menyusun laporan Administrasi Keuangan dengan tepat dan terdokumentasi dengan baik
						Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	14	14	



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyusunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan tepat	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Serba Jadi terpenuhi dengan baik	Pelaksanaan Gaji dan Tunjangan ASN sudah terpenuhi	Pemerintah Kecamatan Serba Jadi menyusun laporan gaji dan tunjangan ASN dengan tepat dan baik
						Output: Jumlah Orang Yang Menerima Gaji	Orang/bulan	14	14			
				Terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN Kecamatan Serba Jadi	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Tidak ada permasalahan, koordinasi berjalan dengan baik	Saling berkoordinasi dengan pihak terkait	Pemerintah Kecamatan Serba Jadi senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan memaksimalkan kinerja
						Output: Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2			
				Penyusunan laporan kebutuhan administrasi umum kecamatan Serba Jadi	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Masih kurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan di kegiatan administrasi umum karena adanya refofusing anggaran	Tetap saling berkoordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan kegiatan administrasi umum dapat terpenuhi dengan baik	Pemerintah Kecamatan Serba Jadi senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah	Tahun	1	1			
					7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	Paket	10	10			
					7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	17	17			
					7.01.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	10	10			
					7.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12			
					7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	12			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2			
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	12			
					7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1			
					7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12			
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1			
					7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1			
					7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Unit	4	0			
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN SERBAJADI	Penyusunan rencana kerja yang sistematis untuk terlaksananya pelayanan publik yang prima	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Masih ada masyarakat yang belum mengetahui prosedur dalam mengurus kepentingan yang ingin mereka ajukan	Bagi Pelayanan Umum Kecamatan Serba Jadi telah memasang papan pemberitahuan secara detail mengenai prosedur dokumen dan adanya jadwal piket pegawai yang selalu siap melayani masyarakat	Pemerintah Kecamatan Serba Jadi telah melakukan berbagai upaya dalam pelayanan publik agar lebih prima



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Outcome: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	83.20	83.2			
					7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
						Output: Terselenggaranya koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1			
					7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins						
						Output: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1			
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN SERBAJADI	Penyusunan rencana kegiatan kegiatan di program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilakukan dengan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Partisipasi dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan kegiatan tersebut masih belum merata	Pemerintah Kecamatan Serba Jadi menyemarakkan setiap kegiatan dan mengajak masyarakat iktu serta mempersiapkan kegiatan	Pemerintah Kecamatan Serba Jadi agar meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan Pegawai ASN Kecamatan Serba Jadi



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				sistematis dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang						disetiap kegiatan	sehingga masyarakat lebih merasa memiliki andil dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Serba Jadi	melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan saling berkoordinasi
						Outcome: Persentase Potensi Konflik Sara yang Ditangani	%	100	96.55			
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
						Output: Terlaksananya Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Tahun	1	1			
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Negara Republik Indonesia						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	Orang	500	500			
					7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
						Output: Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	400	400			
4	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN SERBAJADI	Pemerintah Kecamatan Serba Jadi dalam	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Masyarakat masih sangat kurang mengetahui	Pemerintah kecamatan memberikan dorongan	Pemerintah Kecamatan Serba Jadi senantiasa



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melakukan pemetaan desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa						adanya peran camat dalam mengawasi dan membina pemerintah desa	motivasi serta apresiasi terhadap perangkat desa supaya meningkatkan semangat kerja dalam melayani masyarakat	berkoordinasi dengan instansi terkait agar pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik
						Outcome: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	0			
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
						Output: Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tahun	1	0			
					7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5	0			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Pendampingan Desa di Wilayahnya						

6



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
21. Kecamatan Silinda					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	83%	83%	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	86.24	86.24	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	80%	80%	100
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	80%	80%	100
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	100%	100%	100
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100%	100%	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11
KECAMATAN SILINDA												
UNSUR KEWILAYAHAN												
1	KECAMATAN	7.01.0.00.000.17.0000	KECAMATAN SILINDA	Pendelegasian Camat kepada Kepala Seksi dan Kasubbag dilakukan dengan tepat dan terarah untuk meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui nilai Sakip Kecamatan Silinda	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Jumlah Sarana dan Prasarana masih kurang, guna memaksimalkan pelayanan	Dilakukan usulan untuk sarana dan prasarana kecamatan tentunya melalui koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait	Pemerintah Kecamatan Silinda telah melaksanakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan terus berupaya untuk melakukan pelayanan dengan prima
						Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	B	B			
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
						Output: Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1			
					7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Output: Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	13			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
					7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12			
					7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
						Output: Terpenuhinya Adminstrasi umum	Tahun	1	1			
					7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	3	3			
					7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	4			
					7.01.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	5	5			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12			
					7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12			
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12			
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Tersedianya Gaji Tenaga Kontrak	Tahun	1	0			
					7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12			
					7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	7	7			
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Gedung Kantor	Tahun	1	0			
					7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at						
						Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Unit	1	1			
					7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Output: Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SILINDA		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
						Outcome: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	0	0			
					7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
						Output: Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Tahun	0	0			
					7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins						
						Output: Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Laporan	12	12			
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SILINDA		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Outcome: Presentase Kehadiran Masyarakat Dalam Musrembang	%	0	0			
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
						Output: Terlaksananya Musrembang tingkat Kecamatan, kegiatan TKPK Kecamatan, dan kegiatan Lomba Kecamatan	Tahun	0	0			
					7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
						Output: Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	3	3			
					7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan						
						Output: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	Dokumen	1	1			



LKPJ Bupati Serdang Bedagai Akhir Tahun Anggaran 2023



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert						
						Output: Jumlah Laporan hasil senergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12			
					7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
						Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	4			
5	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SILINDA		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
						Outcome: Presentase Potensi Konflik yang ditangani	%	0	0			
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
						Output: Telaksananya Kegiatan hari Besar Nasional (HUT RI) dan Kegiatan Hari Besar Keagamaan	kegiatan	0	0			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, P						
						Output: Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100			
					7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
						Output: Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,	Orang	1000	1000			



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional, dan Nasional						
6	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SILINDA		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
						Outcome: Presentas Rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang telah di tindak Lanjut Oleh Pemerintah Desa	%	0	0			
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
						Output: Terlaksananya Lomba Desa dan Pembinaan PKK Kecamatan	%	0	0			
					7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
						Output: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Adminstrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
22. Kecamatan Sipispis					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	55	55	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	82	82	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	55	55	100
3	Persentase Kehadiran Masyarakat Dalam Musrenbang	%	100	85	85
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN SIPISPIS										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.04. 0000	KECAMATAN SIPISPIS		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
						Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Persen	100	100	
					7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Output: Terpenuhiya Administrasi Keuangan	Persen	100	100	
					7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1	
					7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tahun	1	0	
					7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
						Output: Terpenuhiya Administrasi Umum	Persen	100	25	
					7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
						Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tahun	1	0	
					7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tahun	1	1			
				7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
				Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tahun	1	0			
				7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
				Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tahun	1	0			
				7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
				Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	1	0			
				7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	1			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
				Output: Jasa Tenaga Administrasi	Tahun	1	0			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persen	100	62.42			
				7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						
				Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1			
				7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	0			
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SIPISPIS	Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti Musrenbang dikarenakan banyaknya usulan-usulan masyarakat atau Desa yang tidak tertampung dan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Agar dinas-dinas pengampu memberitahukan program kegiatan pembangunan yang ada di dinas terkait kepada desa atau kecamatan sehingga desa dapat menyesuaikan usulan pemnagunan desa dengan dinas terkait	Pemerintahan Kecamatan Sipispis selalu melakukan pendampingan ke desa-desa melalui Program pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				juga tidak terealisasi di Program kegiatan dinas-dinas terkait						
						Outcome: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	Persen	100	100	
				7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
						Output: Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	
				7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins				
						Output: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SIPISPIS	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
						Outcome: Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	99.85	
				7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: Terkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	99,85			
				7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
				Output: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1			
4	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SIPISPIS	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
				Outcome: Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	Persen	100	75			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
				Output: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	75			
				7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan	1	1			
					7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kegiatan	1	1			
5	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SIPISPIS		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
						Outcome: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Desa	Persen	100	16.52			
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	16.52			
					7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
						Output: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	1	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
23. Kecamatan Tanjung Beringin					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	85	85	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	83	83	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	82	82	100
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	85	85	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN TANJUNG BERINGIN										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.10. 0000	KECAMATAN TANJUNG BERINGIN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	B	B		
				7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
					Output: Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
					Output: Penyediaan Gaji dan Tunjangan	orang	17	17		
				7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
					Output: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	10	10		
				7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				7.01.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
					Output: Jumlah PaketPeralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1		
				7.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
					Output: Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1		
				7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
					Output: Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1		
				7.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
					Output: Jumlah Bahan Bacaan	Dokumen	1	1		
				7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
					Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	1	1		
				7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Output: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun	1	1		
				7.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
					Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1		



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					7.01.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Laporan	1	1			
					7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun	1	1			
					7.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						
						Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1			
					7.01.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1			
2	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.10. 0000	KECAMATAN TANJUNG BERINGIN		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Outcome: Persentase Potensi Konflik Sara yang ditangani	Tahun	1	0			
					7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
						Output: Persentase Potensi Konflik Sara yang ditangani	Tahun	1	0			
					7.01.05.2 .01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang- undang dasar republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia						
						Output: Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang- undang dasar republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan	orang	300	300			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						negara kesatuan republik indonesia						
					7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional						
						Output: Jumlah orang yang mengikuti kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	orang	1250	1250			
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN TANJUNG BERINGIN		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
						Outcome: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	tahun	1	0			
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
						Output: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	Tahun	1	0			
					7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Dokumen	8	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
24. Kecamatan Tebing Syahbandar					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	83%	75%	90.36
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	86.5	82.56	95.45
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	poin	86.5	82.56	95.45
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	100	85%	85
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	100	100	100
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.12. 0000	KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
						Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tahun	B	B	
					7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Output: Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun	1	1	
					7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ Tahun	14	14	
					7.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	10	
					7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
						Output: Terpenuhinya Administrasi Umum	Tahun	1	1	
					7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	Paket	1	1			
					7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1			
					7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12			
					7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	1	1			
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12			
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12			
					7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Tahun	1	1			
				7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						
				Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1			
				7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
				Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	5			
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
				Outcome: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	Tahun	1	1			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Tahun	1	1			
					7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
						Output: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1			
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
						Outcome: Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	Tahun	1	1			
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
						Output: Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tahun	1	1			
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	300	300			
					7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
						Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	400	400			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
25. Kecamatan Tebing Tinggi					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	84	80	95.24
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	82	82	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	Poin	82	82	100
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	100	45.5	45.5
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	%	100	47.5	47.5
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	90	90
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	100	100	100



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN TEBING TINGGI										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.01. 0000	KECAMATAN TEBING TINGGI		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
						Outcome: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	B	B	
					7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						Output: Tersedianya dokumen perencanaan	Tahun	1	1	
					7.01.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						Output: Terlaksananya survey masyarakat	Tahun	1	1	
					7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Output: Terpenuhinya adminitrasi kegiatan	Tahun	1	1	
					7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	23	23	
					7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
						Output: Terpenuhinya Adminitrasi Umum	Tahun	1	1	
					7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Paket	1	1			
					7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	1	1			
					7.01.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga	Paket	1	1			
					7.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah paket bahan logistik kantor	Paket	1	1			
					7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Output: Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Tahun	1	1			
					7.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Output: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Dokumen	1	1			
					7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
						Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	1	1			
					7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Output: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tahun	1	2			
					7.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1			
					7.01.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1			
					7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	1	1			
					7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Tahun	1	0		
					Output: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					
				7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional					
					Output: Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	unit	1	1		
				7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
					Output: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Tahun	1	1		
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN TEBING TINGGI	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
					Outcome: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan	Tahun	1	1		
				7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Output: Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikecamatan	Tahun	1	1			
				7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
				Output: Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksana kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1			
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN TEBING TINGGI	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Outcome: Persentase potensi trantibun yang di tangani	Tahun	1	1			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
				Output: Terkondisinya upaya penyelenggaraan dan ketertiban umum	Tahun	1	1			
				7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert						



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Jumlah laporan hasil sinegritas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal terkait	keg	1	1			
4	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN TEBING TINGGI	Kecamatan Tebing Tinggi akan terus membuat kebijakan yang baik untuk ASN di Kantor Camat Tebing Tinggi dan Masyarakat di Kecamatan tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Sulitnya menghadirkan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan	Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi beserta jajaran terus berusaha menarik minat masyarakat	Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi telah melakukan koordinasi dengan Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait update data penduduk baik itu data kelahiran, data kematian dan juga data penduduk yang keluar dan masuk di Kabupaten Serdang Bedagai Khususnya Kecamatan Tebing Tinggi
						Outcome: Persentase potensi konflik sara yang ditangani	Tahun/Keg	5	0			



BAB III

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAK AN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
					7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
						Output: Persentase potensi konflik sara yang ditangani	Kegiatan	1	0			
					7.01.05.2 .01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,						
						Output: Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku , umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitasi keamanan lokal, regional dan nasional	Kegiatan	1	1			
					7.01.05.2 .01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
						Output: Jumlah kegiatan kerukunan yang dilaksanakan	kegiatan	4	1			



BAB III

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
26. Kecamatan Teluk Mengkudu					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	84	84	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	82	83.25	101.52
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	86	86	100
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	100	84	84
4	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	100	100	100



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN TELUK MENGKUDU										
UNSUR KEWILAYAHAN										
1	KECAMATAN	7.01.0.00 .0.00.09. 0000	KECAMATAN TELUK MENGKUDU		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja	mengoptimal kan sarana dan prasarana yang ada
						Outcome: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	
					7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Output: Terpenuhinya administrasi keuangan	Tahun	1	1	
					7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	18	18	
					7.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Output: Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	12	
					7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
						Output: Terpenuhinya Administrasi Umum	Tahun	1	1	
					7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
						Output: Jumlah paket komponen instalasi	Paket	7	7	



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						
					7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Output: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	15	15			
					7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	14	14			
					7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	4			
					7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	4			
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	20			
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Output: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tahun	1	1		
				7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
					Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12		
				7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Output: Terpeliharanya barang milik daerah	Tahun	1	1		
				7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					
					Output: Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1		
				7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
					Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	10		
2	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN TELUK MENGKUDU	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN					



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						PELAYANAN PUBLIK						
						Outcome: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan	%	86	86			
					7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
						Output: Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Tahun	1	1			
					7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins						
						Output: Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	1	1			
3	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN TELUK MENGKUDU		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
						Outcome: Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	100	84			
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Output: Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Tahun	1	1			
					7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
						Output: Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	12	12			
4	KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN TELUK MENGKUDU		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
						Outcome: Persentase potensi konflik sara yang ditangani	%	100	100			
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
						Output: Terselenggaranya kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	Tahun	1	1			
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara						



BAB III

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
						Output: Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	300	300			
					7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud						
						Output: Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Orang	1250	1250			

**3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan	OPD
1	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026	Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026	Perubahan RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Litbang
2	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033	Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033	Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional perlu disusun Rencana Tata Ruang Kabupaten, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 tidak sesuai lagi dengan kondisi faktual ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai serta sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Litbang
3	Pemberdayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)	Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Serdang Bedagai	Sejak tahun 2019, Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Litbang



BAB III

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan	OPD
			Perusahaan di Kabupaten Serdang Bedagai. Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar terjalin sinergitas antara penggunaan dana TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	
4	Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 01 Tahun 2023	Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Tim Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 84/18.33/Tahun 2023	Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Melaksanakan penunjukan langsung kepada penyedia yang mengerjakan pembangunan bronjong sesuai dengan regulasi yang ada	Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas mekanisme kontrak PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat, Perbup Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga	Pembangunan bronjong dapat diselesaikan sesuai dengan regulasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 331/18.20/TAHUN 2023 Tanggal 26 Juni 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Penyusunan Dokumen KLHS P.RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 - 2026.	Dinas Lingkungan Hidup



BAB III

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan	OPD
	Dalam Rangka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026			
8	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 337/18.20/TAHUN 2023 Tanggal 27 Juni 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	Dinas Lingkungan Hidup
9	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 343/18.20/TAHUN 2023 Tanggal 3 Juli 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	Dinas Lingkungan Hidup
10	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 621/18.20/TAHUN 2023 Tanggal 13 November 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2025-2045	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2025-2045	Dinas Lingkungan Hidup



BAB III

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan	OPD
11	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 312/18.20/TAHUN 2023 Tanggal 19 Juni 2023 Tentang Penetapan Sekolah Binaan Adiwiyata Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata	1. Pengembangan Program Adiwiyata di Kabupaten Serdang Bedagai Khususnya di Wilayah Dolok Masihul 2. Membuat Percontohan Program Adiwiyata untuk Satuan Pendidikan yang Berbeda (SD dan SMP)	Dinas Lingkungan Hidup
12	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 497/18.20/TAHUN 2023 Tanggal 15 September 2023 Tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata	Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2023	Dinas Lingkungan Hidup
13	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 106/18.20/TAHUN 2023 Tanggal 27 Februari 2023 Tentang Penetapan Tim Pembina Adiwiyata Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata	Penetapan Tim Pembina Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2023	Dinas Lingkungan Hidup
14	Pengendalian Penanaman Modal dengan melakukan Bimbingan dan Pengawasan serta penyelesaian masalah pada Pelaku Usaha	1. PP No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, 3 Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan	Untuk Mendukung Peningkatan Nilai Investasi di Kab. Serdang Bedagai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



BAB III

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan	OPD
		Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Serdang Bedagai		
15	Meningkatkan Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan SDM SPBE	Perpres 95 Tahun 2018	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 120 / 18.39 / Tahun 2023	Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai	Badan Pendapatan Daerah
17	Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 127 / 18.39 / Tahun 2023	dilaksanakan ETPD untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada belanja daerah	Badan Pendapatan Daerah
18	Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kearsipan	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan daerah 2. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah 3. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Penetapan Giro Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di lingkungan Pemerinaha Kabupaten Serdang Bedagai	SK Bupati No. 128 Tahun 2023	Untuk Keperluan Bantuan Operasional Kesehatan langsung salur ke Puskesmas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Dinas Kesehatan
20	Penguatan fungsi penyuluhan pertanian melalui pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian	Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai	Membentuk 6 (enam) Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai beserta wilayah kerjanya, dimana BPP merupakan unit kerja non struktural yang berkedudukan di bawah dan	Dinas Pertanian



BAB III

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan	OPD
			bertanggungjawab kepada kepala dinas yang bertujuan untuk meningkatkan layanan penyuluhan	
21	Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	SK Bupati Nomor 101/18.28/Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	Menetapkan nama-nama petugas/tim verifikasi dan validasi kecamatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dari kios ke petani sehingga penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran kepada petani yang berhak	Dinas Pertanian
22	Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar perusahaan perkebunan	Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 268/18.28/Tahun 2023 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Petani/ Calon Lokasi sebagai Peserta Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Perkebunan PT. Bandar Sumatra Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai.	Memenuhi amanah Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang mengatur kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan seluas 20% dari total areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan yang bertujuan untuk menjalin kemitraan antara kebun masyarakat dengan perusahaan	Dinas Pertanian
23	Pelimpahan sebagian kewenangan bupati dalam penandatanganan Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.	Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 620/18.28/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai.	Pelimpahan sebagian kewenangan bupati dalam penandatanganan Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyederhanakan birokrasi dan peningkatan layanan publik	Dinas Pertanian
24	Penetapan luas baku lahan perkebunan tanaman kelapa sawit dan tanaman karet di Kabupaten Serdang Bedagai.	Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 514//18,28/Tahun 2023 tentang Penetapan Luas Baku Lahan Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit dan Tanaman Karet di Kabupaten Serdang Bedagai	Menetapkan luas baku lahan perkebunan tanaman kelapa sawit dan tanaman karet di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu data statistik sektor pertanian	Dinas Pertanian



BAB III

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan	OPD
25	Penetapan Tim Pengamanan dan Pengendalian Transportasi Pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023 di Kabupaten Serdang Bedagai.	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 169/18.23/Tahun 2023 tanggal 17 April 2023.	Pengamanan dan Pengendalian Transportasi Pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023 di Kabupaten Serdang Bedagai.	Dinas Perhubungan
26	Penetapan Tim Pengamanan dan Pengendalian Transportasi Pada Hari Besar Tahun Baru 2023 di Kabupaten Serdang Bedagai.	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 31/18.23/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023.	Pengamanan dan Pengendalian Transportasi Pada Hari Besar Tahun Baru 2023 di Kabupaten Serdang Bedagai.	Dinas Perhubungan
27	Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Serdang Bedagai	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 616/18.14/TAHUN 2023 tanggal 13 Nopember 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Serdang Bedagai	Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Serdang Bedagai memudahkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban OPD sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Serdang Bedagai	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

**3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022**

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
Dinas Pendidikan			
1	Dinas Pendidikan untuk mendorong Kementerian Pendidikan dalam pelaksanaan kompetensi perolehan sertifikasi	Dinas Pendidikan mensosialisasikan kepada guru-guru untuk melakukan update data melalui Dapodik GTK. Guru/pendidik yang belum sertifikasi diminta untuk memperhatikan SIM PKB (Pengembangan Keprofesian Guru) masing-masing terkait dengan rekrutmen PLPG (Pendidikan Latihan dan Profesi Guru)	Meningkatnya kesempatan jumlah Guru yang mendapatkan Sertifikasi Profesi
2	Dinas Pendidikan melakukan pemerataan tenaga pendidik pada tingkat SD dan SMP	Dinas Pendidikan melakukan pemetaan dan verifikasi kebutuhan guru. Mengajukan usulan kebutuhan guru kepada Kementerian untuk mendapatkan kuota rekrutmen guru P3K	Pemerataan guru/pendidik sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan
3	Dalam peningkatan pemahaman/kompetensi peserta didik, agar Dinas Pendidikan memfasilitasi media pembelajaran digitalisasi elektronik disekolah untuk mewujudkan sekolah mantap	Dinas Pendidikan sudah menyediakan menganggarkan untuk pengadaan alat Teknologi Informatika Komputer untuk sekolah di Kabupaten Serdang Bedagai secara bertahap	Menyediakan peralatan komputer untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran digital di sekolah
4	Melakukan sosialisasi penerapan aplikasi dapodik, sebagai acuan pemerintah pusat dalam menyalurkan dana DAK bidang pendidikan, yang akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya	Dinas Pendidikan Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas Kepala Sekolah dan Operator Dapodik dalam melakukan up date dan validasi data di Dapodik	Semakin baiknya Data Dapodik di Lingkungan Dinas Pendidikan. Meningkatkan peluang satuan pendidikan untuk memperoleh anggaran DAK Fisik
5	Dinas Pendidikan untuk meninjau kembali program pelaksanaan grouping sekolah SD di Desa Belidaan, dalam rangka menciptakan sekolah berlingkungan kondusif	Sudah dilakukan peninjauan kembali terhadap SD 106208 Desa Belidaan, dan diverifikasi kembali untuk saat ini kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan selanjutnya akan diverifikasi perkembangan di masa datang.	Kegiatan Belajar Mengajar di SD 106208 Desa Belidaan masih diselenggarakan
Dinas Kesehatan			
1	Agar Dinas Kesehatan untuk melakukan validasi data tentang pendataan stunting sesuai by name by addres, karena program	Dinas Kesehatan sudah melakukan Validasi Data stunting by name by addres melalui aplikasi EPPBGM	Meningkatkan lagi sisem penginputan data stunting di aplikasi EPPBGM



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
	stunting merupakan kegiatan yang dilaksanakan serentak secara nasional		
2	Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara intens dalam pemberian surat rujukan dari puskesmas, karena berdasarkan aturan berlaku bahwa sejumlah 180 diagnosa tidak dibolehkan pemberian surat rujukan dari puskesmas	Dinas kesehatan akan melakukan sosialisasi ke puskesmas tentang aturan surat rujukan sesuai dengan aturan yang berlaku	Agar Puskesmas dalam mengeluarkan surat rujukan sesuai aturan berlaku
3	Dinas Kesehatan untuk melakukan penertiban dan kehadiran petugas pustu di setiap kecamatan	Dinas Kesehatan akan melakukan MONEV ke Puskesmas dan Pustu secara berkala	Utk meningkatkan kedisiplinan kinerja pegawai dan pelayanan kesehatan yang optimal
4	RSUD Sutan Sulaiman untuk menambah ruang rawat untuk balita dan anak-anak, sebagai persiapan dalam penanganan stunting ditingkat daerah	RSUD Sultan Sulaiman telah melakukan penambahan ruang rawat untuk bayi, balita dan anak yaitu ruang NICU (Neonatal Intensive Care Unit) dan PICU (Pediatrics Intensive Care Unit) dengan jumlah total tempat tidur sebanyak 8 (delapan) tempat tidur.	Penambahan ruang rawat untuk balita dan anak-anak sebagai persiapan dalam penanganan stunting ditingkat daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
1	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mencantumkan program kegiatan pada RKPD untuk kegiatan pemanfaatan tanah kosong, rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dan kegiatan pemeliharaan serta perawatan pipanisasi jaringan air minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran berikutnya akan mencantumkan program/kegiatan pemanfaatan tanah kosong dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten. Sedangkan untuk pemeliharaan dan perawatan pipanisasi jaringan air minum bukan merupakan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022.	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi korban bencana kabupaten.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	Setiap target indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan dijabarkan per tahun dalam RKPD wajib disusun program dan kegiatan yang disertai dengan kebutuhan anggaran dan program kegiatan tersebut menjadi prioritas untuk	Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menyusun program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan sudah melaksanakan program tersebut	Target indikator dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan melaksanakan program yang sudah diprioritaskan.



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
	dapat dilaksanakan		
2	Untuk pemberian bantuan bagi rumah yang rusak akibat bencana alam, jika anggaran yang tersedia tidak cukup agar dikeluarkannya kebijakan Kepala Daerah untuk dapat memakai dana darurat yang telah disediakan pada pos belanja tidak terduga karena hal tersebut adalah kebutuhan mendesak	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai telah membangun rumah yang rusak dengan menggunakan SK Darurat.	Sudah dibangun dan selesainya rumah sebanyak 137 rumah akibat rusak yang disebabkan bencana alam
Dinas Lingkungan Hidup			
1	Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk membuat langkah yang strategis guna mengantisipasi timbunan sampah di kedua TPA tersebut dan bisa bekerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga dalam rangka pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah membuat langkah-langkah strategis dalam upaya mengantisipasi timbunan sampah di TPA dengan melakukan penataan timbunan sampah agar tidak berserakan di TPA, sehingga daya tampung TPA akan lebih optimal.	Optimalisasi daya tampung TPA
2	Perlunya penataan terhadap seluruh objek retribusi persampahan serta menempatkan petugas PPNS untuk mengawasi para petugas dalam melakukan pengutipan retribusi persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan penataan terhadap objek retribusi persampahan dengan menempatkan Koordinator Pengumpul Retribusi ke setiap wilayah kecamatan yang sampahnya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Untuk PPNS di Dinas Lingkungan Hidup belum ada Pejabatnya.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengumpulan Retribusi Pengelolaan Persampahan.
3	Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai segera melakukan pengurusan akreditasi laboratorium sehingga perusahaan-perusahaan besar yang ada di Serdang Bedagai bisa melakukan pengujian limbahnya di Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya untuk meningkatkan kelas Laboratorium Lingkungan dari Klaster menjadi Laboratorium yang terakreditasi, dan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sudah mendaftarkannya ke Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan telah melakukan persiapan pemenuhan kelengkapan berkas persyaratan yang	Terakreditasinya Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pendukung sarana pemantauan kualitas lingkungan hidup.



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
		diperlukan.	
4	Perlunya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengujian limbah cair dan udara secara berkala disetiap perusahaan, dan menindak tegas para pengusaha/perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran air atau udara yang diakibatkan karena kelalaiannya dalam pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah dan amdal	Pada dasarnya suatu usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan Pengujian limbah cair dan kualitas udara wajib ke laboratorium yang terakreditasi. Sertifikat hasil pengujian dari laboratorium terakreditasi tersebut sebagai salah satu dasar apakah perusahaan patuh terhadap ketentuan terkait pembuangan limbah cair ke media lingkungan. Untuk saat ini laboratorium lingkungan kita belum memiliki legalitas untuk melakukan pengujian kualitas udara di pabrik / kawasan industri (udara ambient, emisi boiler, emisi genset) belum dapat dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai karena belum terakreditasi dan belum memiliki peralatan yang sesuai dengan SNI.	Meminimalisasi terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha/kegiatan yang menghasilkan beban pencemar terhadap media air, tanah dan udara.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk benar-benar menyusun program kegiatan berdasarkan target Indikator Kinerja Utama dan target Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, karena jika target tahun 2022 tidak tercapai akan mempengaruhi beban target di tahun ke depan. Target RPJMD harusnya tercapai, sehingga visi dan misi Bupati Dan Wakil Bupati dapat terlaksana	Pemkab Serdang Bedagai telah menyusun dan menetapkan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menindaklanjutinya dengan menyusun Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dengan menyesuaikan target Indikator Kinerja Utama dan target Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD	Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah selesai disusun



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
2	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan lebih memperhatikan Indikator Kinerja Utama terkait peningkatan penjualan produk IKM ke luar daerah dengan melakukan kerjasama antar daerah, maupun mempermudah akses izin penjualan ke luar daerah, baik luar provinsi atau bahkan luar negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan penjualan produk IKM ke luar daerah	Memperkenalkan produk unggulan daerah melalui pameran dagang lokal, nasional maupun internasional
3	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, untuk urusan perindustrian dengan indikator pertumbuhan sektor industri pengolahan agar dapat memperbanyak program dan kegiatan berupa bantuan sarana produksi kepada Industri Kecil Menengah (IKM) di tahun mendatang serta memberikan akses pinjaman modal dan mempermudah akses pemasaran baik dalam daerah maupun luar daerah, dengan melakukan promosi maupun kerja sama antar daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan melakukan survey ke lapangan untuk mendata pelaku IKM maupun kelompok yang layak menerima bantuan sarana produksi pada tahun mendatang serta meningkatkan promosi produk unggulan daerah dalam mempermudah akses pemasaran	Ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberian bantuan sarana produksi kepada IKM
Inspektorat			
1	Inspektorat untuk meningkatkan langkah-langkah dalam menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka meminimalisasi kerugian- keruagian yang akan diderita oleh daerah	1. melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Stakeholder lainnya; 2. melaksanakan workshop kepatuhan perundang - undangan dan petanggungjawaban pengelolaan keuangan Perangkat Daerah; 3. meningkatkan peran APIP yang efektif dalam pencegahan terjadinya penyimpangan dengan melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan.	1. Rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan dengan status selesai; 2. meningkat kompetensi dan pengetahuana perangkat daerah tentang peraturan perundang - undangan dan pertanggungjawaban keuangan; 3. meminimaliasir terjadi kesalahan dan penyimpangan.



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Litbang			
1	Bappedalitbang yang sebagai leading sektor dalam penyusunan perencanaan pembangunan agar lebih aktif berkoordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah antara hasil musrenbang dengan aspirasi hasil pelaksanaan kegiatan reses	Pelaksanaan serap aspirasi masyarakat (reses) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan tidak jauh waktunya dengan kegiatan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga hasil aspirasi yang diperoleh anggota dewan tidak mubadzir, karena penetapan usulan dalam Musrenbang sudah selesai dilakukan Eksekutif. Idealnya, harus ada sinkronisasi antara Eksekutif dengan Legislatif terkait dengan 2 kegiatan yang sebenarnya sama-sama menyerap aspirasi dan usulan masyarakat itu. Jadi, harus ada sinkronisasi program, sehingga aspirasi yang diterima melalui kegiatan reses juga bisa ter-cover dalam usulan Musrenbang hingga ketingkat berikutnya. Bahkan diakui, hasil Musrenbang juga masih banyak menjadi pertanyaan. Karena, tidak banyak usulan masyarakat yang bisa terserap melalui Musrenbang. Karena itu, dengan adanya sinkronisasi hasil reses dan Musrenbang, diharapkan lebih bisa menampung usulan dibawah (Bottom Up). Aspirasi yang banyak dikeluhkan, yakni terkait sarana infrastruktur jalan di Desa-desa serta peningkatan ekonomi masyarakat.	Hasil reses DPRD dengan Musrenbang, yang digelar mulai dari tingkat Desa/Kel. dan Kecamatan, harus disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih/overlap, dalam pelaksanaan program pembangunan. Kedua kegiatan tersebut sama-sama menyerap aspirasi masyarakat dengan tujuan yang sama sehingga perlu adanya kesamaan persepsi dan sinkronisasi, dimana apabila sudah diakomodir dalam reses melalui usulan DPRD, tidak perlu lagi dialokasikan dalam Musrenbang. Permasalahan keterbatasan anggaran menjadi permasalahan yang selalu dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam merealisasikan kebutuhan masyarakat.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah untuk memaksimalkan koordinasi antar OPD terutama dalam proses-proses pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah akan memaksimalkan koordinasi antar OPD agar tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2	Agar lebih optimal dalam menginvetarisir data aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah akan mengoptimal kan dalam menginvetarisir data aset daerah	Terwujudnya kesuaian data dalam menginvetarisir data Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
Badan Pendapatan Daerah			
1	Badan Pendapatan Daerah untuk memaksimalkan program-program pendapatan daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi. Menambah fasilitas-fasilitas pembayaran pajak maupun retribusi, serta melakukan digitalisasi dalam pembayaran pajak terutama retribusi daerah	Kami dari Badan Pendapatan Daerah saat ini telah bekerja sama dengan Bank Sumut selaku tempat pembayaran Pajak dan Retribusi. Adapun untuk pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah saat ini selain di Teller Bank Sumut juga dapat dibayarkan melalui kanal pembayaran digital seperti ATM Bank Sumut, Mobile Banking Bank Sumut, Indomaret dan Alfamart, aplikasi seperti Gopay, Oppo, Tokopedia, Buka Lapak dll	Dengan berlakunya kerja sama dengan Bank Sumut tersebut diharapkan kedepannya mempermudah Wajib Pajak dan Retribusi untuk membayar kewajibannya serta meminimalisir adanya kebocoran Pendapatan Daerah.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
1	Dalam rangka meningkatkan disiplin terhadap seluruh ASN di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dimintakan kepada BKPSDM dapat bekerjasama dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban ASN yang berkeliraran pada saat jam bekerja	BKPSDM telah bekerja sama dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, yang dapat dibuktikan dengan ikut sertanya Kasatpol PP sebagai anggota Tim Penegak Disiplin, dan telah melakukan sidak penertiban ASN yang berkeliraran pada saat jam bekerja	Disiplin ASN
2	Berkaitan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) meminta kepada BKPSDM untuk segera melakukan pembukaan penerimaan bagi formasi tenaga administrasi dan tenaga teknis	BKPSDM pada 2023 telah melakukan seleksi Penerimaan P3K untuk 2.379 formasi termasuk guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis	Rekrutmen P3K
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Dalam rangka menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat di mintakan kepada Badan Kesbangpol untuk melakukan pemberian edukasi tentang kerukunan antar masyarakat kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah membentuk Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan bangsa dan politik yang susunan keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat, agama dan pemuda yang bertugas dalam mendeteksi dini dan cegah dini dalam hal penanganan konflik sosial yang akan dan terjadi di wilayah masing-masing serta pemerintah juga telah membentuk dan melaksanakan	Melakukan Rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan instansi terkait serta pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
		kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA)	
2	Dalam rangka mendukung kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembaharuan kebangsaan bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, dimintakan kepada badan kesbangpol untuk memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah	Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai sudah melaksanakan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembaharuan kebangsaan bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan ke-sekolah-sekolah	Mewujudkan persatuan, rasa nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan bermasyarakat yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku serta memberi pemahaman dan dasar-dasar mengenai bangsa Indonesia.
3	Menyikapi bantuan hibah keuangan kepada partai politik dimintakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk segera menaikkan bantuan hibah keuangan kepada partai politik	Anggaran bantuan keuangan Partai Politik saat ini sudah dianggarkan kenaikannya untuk tahun 2024 yang sebelumnya 3.100/suara menjadi 4.500/suara Dan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik tersebut juga sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Meningkatkan fungsi partai politik di daerah dalam melaksanakan pendidikan politik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan keuangan partai politik di daerah, meningkatkan kualitas administrasi partai politik di daerah dan meningkatkan tata kelola partai politik di daerah.
Dinas Sosial			
1	Agar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai lebih serius lagi dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai, guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera sesuai dengan visi Kabupaten Serdang Bedagai Mandiri Sejahtera Dan Relijius	Penurunan angka kemiskinan tidak dapat hanya dilakukan oleh dinas sosial saja, namun oleh keterkaitan oleh dinas - dinas lainnya melalui sinergitas dengan OPD-OPD lainnya. langkah yang dilakukan dinas sosial yaitu melalui desa mengupayakan agar masyarakat yang berhak menerima bantuan agar dimasukkan ke dalam data calon penerima bantuan-bantuan dari kemensos RI	menambah kuota calon penerima bantuan sosial
2	Dalam menyusun perencanaan Dinas Sosial diminta untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam proses	Terima kasih atas saran yang diberikan, dikemudian hari kami akan lebih mengikuti aturan dalam proses perencanaan	penyusunan anggaran lebih baik



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
	penyusunan anggaran sehingga tidak ada lagi anggaran kegiatan yang bersifat gelondongan		
3	Dimintakan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial agar lebih aktif berkoordinasi dalam pengupdatean DTKS mulai dari Desa, Kabupaten, Provinsi hingga ke Pemerintah Pusat/ Kementerian Sosial	Tahun 2023 Dinas Sosial telah melakukan pelatihan kepada operator desa untuk memasukkan data ke aplikasi SIKS-NG	Operator desa lebih paham dalam menginput data masyarakat ke aplikasi SIKS-NG
Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro			
1	Bentuk pelatihan tidak hanya sebatas pelatihan untuk keterampilan pekerja mandiri tetapi lebih dikhususkan kepada pelatihan keterampilan berdasarkan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai	Berkoordinasi kepada dunia usaha dan dunia industri untuk memberikan informasi pelatihan, apa yang dibutuhkan agar masyarakat/pencari kerja bisa dapat langsung bekerja	Anggaran APBD dan APBN untuk kegiatan pelatihan berbasis kompetensi
2	Penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan yang tersedia baik itu di perusahaan maupun industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai kepada masyarakat sebab menurut BPS masih ada 15.363 orang lagi masyarakat Serdang Bedagai yang menyandang status sebagai pengangguran	Memberikan informasi lowongan kerja kepada masyarakat melalui media sosial, radio, dan media cetak berupa brosur dan banner	Penguatan anggaran baik APBD atau APBN untuk kegiatan sosialisasi kepada pencari kerja dan pemberi kerja
3	Data koperasi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai haruslah koperasi yang berbadan hukum dan mensinkronkan dengan data Badan Pusat Statistik sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pemberdayaan koperasi dapat dilakukan berdasarkan	Melakukan pendataan koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 3 tahun berturut-turut	Menyampaikan surat pemberitahuan kepada koperasi yang tidak aktif berupa surat teguran agar segera melaksanakan Rapat Anggota Tahunan



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
	data koperasi yang valid. Bagi koperasi yang tidak aktif kiranya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro dapat melakukan pengecekan apakah koperasi tersebut tutup atau dalam sengketa, jika koperasi dalam sengketa kiranya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro dapat melakukan pendampingan dalam hal musyawarah penyelesaian sengketa		
4	Untuk indikator kinerja jumlah wirausaha baru kiranya dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro tidak hanya melakukan pelatihan tata rias dan tata boga, agar dapat juga memberikan pelatihan keterampilan berbasis teknologi	Selanjutnya akan melakukan perencanaan dan kebutuhan wirausaha dalam pelatihan digitalisasi	Agar para wirausaha dapat berdaya saing dalam penjualan dan kemasan secara digital
Kecamatan Perbaungan			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	pengawasan pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan camat perbaungan dengan program monitoring evaluasi APBDES kedesa - desa	adapun tujuan monitoring evaluasi pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk keseragaman didalam administrasi berbentuk spj dan pelaksanaan keuangan desa secara peraturan yang berlaku
Kecamatan Sei Rampah			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
Kecamatan Teluk Mengkudu			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Dalam pengelolaan keuangan desa Camat mengacu pada Peraturan Bupati no.3 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan Bupati dalam evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kepada Camat.	Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat desa tentang penggunaan keuangan desa
Kecamatan Pantai Cermin			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja
Kecamatan Tebing Tinggi			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring penggunaan APBDes di seluruh desa di se kecamatan Tebing Tinggi melakukan pembinaan terhadap aparat desa tentang tufoksi perangkat desa	Anggaran desa sesuai dengan dokumen APBDes dan P APBDes Masalah : masih ada desa yang belum memahami pengelolaan APBDes dan P. APBDes dengan baik
Kecamatan Tebing Syahbandar			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Terlaksananya pengalokasian pagu anggaran sesuai dengan RKPD Laporan RKPD sebagai acuan untuk mengetahui sejauhmana program kegiatan yang telah dilaksanakan dan sebagai landasan penilaian kinerja setiap OPD	Anggaran desa sesuai dengan dokumen APBDes dan P APBDes Masalah : Masih ada desa yang belum memahami pengelolaan APBDes dan P-APBDes dengan baik



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
Kecamatan Kotarih			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Melalui Monitoring Penggunaan APBDes di seluruh desa di Kecamatan Kotarih dan Melakukan Pembinaan Terhadap Sparatur Desa Tentang Tufoksi Perangkat Daerah	Tujuan: Anggaran Desa sesuai dengan Dokumen APBDes dan P-APBDes Masalah: Masih ada Desa yang belum memahami APBDes dan P-APBDes dengan baik
Kecamatan Bandar Khalifah			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Melalui Monitoring Penggunaan APBDes di seluruh Desa di Se Kecamatan Bandar Khalifah dan melakukan pembinaan terhadap Aparatur Desa tentang tufoksi Perangkat Desa	tujuan : Anggaran Desa sesuai dengan Dokumen APBDes dan PAPBDes masalah : Masih ada Pemerintahan Desa yang belum memahami Penggunaan APBDes dan PAPBDes dengan baik
Kecamatan Dolok Masihul			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Pemerintah Kecamatan Tetap Melaksanakan Pengawasan Terhadap Desa Tentang Pegelolaan Keuangan desa dan sistem Tata administrasi Pemerintahan Desa ,Evaluasi dan verifikasi RAPBDesa Hingga Menjadi APBDesa .Kemudian Monitoring Administrasi dan Pelaksanaan pembangunan Tetap dilaksanakan Pemerintah Kecamatan.Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Setiap Bulan arahan dan Bimbingan Tentang tata Kelola Administrasi Desa Hingga Teguran juga sering kami lakikan Baik lisan Maupun Tertulis	Perlu nya Pengawasan yang Intens dari Camat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan sistem tata administrasi Pemerintah Desa



No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
Kecamatan Serbajadi			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Pemerintah Kecamatan tetap melaksanakan pengawasan terhadap desa tentang pengelolaan keuangan desa dan sistem tata administrasi pemerintahan desa ,evaluasi dan verifikasi RAPBDesa hingga menjadi APBDesa. Kemudian monitoring administrasi dan pelaksanaan pembangunan tetap dilaksanakan pemerintah kecamatan. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan arahan dan bimbingan tentang tata kelola Administrasi Desa hingga teguran juga sering kami lakukan baik lisan maupun tertulis	Perlunya pengawasan yang intens dari Camat terutama bagi desa yang belum memahami pengelolaan APBDesa dan P-APBDesa
Kecamatan Bintang Bayu			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Pemerintah Kecamatan tetap melaksanakan pengawasan terhadap desa tentang pengelolaan keuangan desa dan sistem tata administrasi Pemerintahan Desa, Evaluasi dan Verifikasi RAPBDesa hingga menjadi APBDesa kemudian monitoring administrasi dan pelaksanaan pembangunan tetap dilaksanakan pemerintah Kecamatan. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan, arahan dan bimbingan tentang tata kelola administrasi desa hingga teguran juga sering kami lakukan baik lisan ataupun tertulis.	Anggaran desa sesuai dengan Dokumen APBDes dan P-APBDes dikarenakan masih ada Desa yang belum memahami pengelolaan APBDes dan P-APBDes dengan baik, hal tersebut dilakukan agar tertib dalam pengelolaan keuangan desa dan sistem tata administrasi Pemerintahan Desa
Kecamatan Pegajahan			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan ,Melalui Monitoring Penggunaan APBDes di seluruh desa di se kecamatan pegajahan.dan melakukan pembinaan terhadap aparaturnya Desa tentang tufoksi perangkat Desa.	Masih ada Desa yang belum memahami pengelolaan APBDes dan P-APBdes dengan baik.



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
Kecamatan Sei Bambi			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.
Kecamatan Sipispis			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring penggunaan APBDes di seluruh Desa se Kecamatan Sipispis	Tujuan : Anggaran Desa sesuai dengan dokumen APBDes dan P APBDes Masalah: Masih ada Desa yang belum memahami pengelolaan APBDes dan P APBDes dengan baik
RSUD Sultan Sulaiman			
1	Agar Dinas Kesehatan untuk melakukan validasi data tentang pendataan stunting sesuai by name by addres, karena program stunting merupakan kegiatan yang dilaksanakan serentak secara nasional	Dinas Kesehatan sudah melakukan Validasi Data stunting by name by addres melalui aplikasi EPPBGM	Meningkatkan lagi sisem penginputan data stunting di aplikasi EPPBGM
2	Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara intens dalam pemberian surat rujukan dari puskesmas, karena berdasarkan aturan berlaku bahwa sejumlah 180 diagnosa tidak dibolehkan pemberian surat rujukan dari puskesmas	Dinas kesehatan akan melakukan sosialisasi ke puskesmas tentang aturan surat rujukan sesuai dengan aturan yang berlaku	Agar Puskesmas dalam mengeluarkan surat rujukan sesuai aturan berlaku
3	Dinas Kesehatan untuk melakukan penertiban dan kehadiran petugas pustu disetiap kecamatan	Dinas Kesehatan akan melakukan MONEV ke Puskesmas dan Pustu secara berkala	Utk meningkatkan kedisiplinan kinerja pegawai dan pelayanan kesehatan yang optimal



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
4	RSUD Sutan Sulaiman untuk menambah ruang rawat untuk balita dan anak-anak, sebagai persiapan dalam penanganan stunting ditingkat daerah	RSUD Sultan Sulaiman telah melakukan penambahan ruang rawat untuk bayi, balita dan anak yaitu ruang NICU (Neonatal Intensive Care Unit) dan PICU (Pediatrics Intensive Care Unit) dengan jumlah total tempat tidur sebanyak 8 (delapan) tempat tidur.	Penambahan ruang rawat untuk balita dan anak-anak sebagai persiapan dalam penanganan stunting ditingkat daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Dalam rangka menyikapi tentang pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa, diminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk lebih intens melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam penggantian/pemberhentian perangkat desa serta melakukan pelatihan penyusunan sistem keuangan desa	Bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menerbitkan Perbub Nomor 33 Tahun 2020 Tantang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan telah melakukan Fasilitasi, Pendampingan serta monitoring terhadap Permasalahan yang ada di Desa khususnya terkait permasalahan pergantian/pemberhentian perangkat desa dan pengelolaan keuangan desa	Dengan pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan serta monitoring pelaksanaan Perbub Nomor 33 Tahun 2020 Tantang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan seluruh stakeholder Desa memiliki pemahaman yang sama terhadap Peraturan-peraturan yang berlaku yang berlaku.
2	Meminta kepada kepala daerah agar memberikan sanksi tegas bagi kepala desa yang belum atau terlambat menyampaikan laporan penggunaan APBD Desa	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai setiap Tahunnya melalui peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang tata cara perhitungan dan pembagian dana desa dan alokasi dana desa di kabupaten serdang bedagai melaksanakan pembinaan atas penggunaan APBD Desa. Salah satu pembinaan yang dilakukan adalah pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Di tahun 2024, Dinas PMD sedang menyusun Perbub tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 dimana di dalamnya yaitu di BAB VI ada aturan terkait Sanksi Penggunaan Alokasi Dana Desa.
3	Dimintakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menghimbau kepada seluruh Kepala Desa untuk bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan update jumlah penduduk dengan sistem by name and by address	Dinas PMD akan melakukan pembinaan kepada kepala Desa dengan cara menyurati Kepala Desa agar bekerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam melakukan update jumlah penduduk dengan sistem by name by address	Hal ini bertujuan agar data kependudukan yg diperoleh oleh pemerintah Desa akurat dan sinkron dengan pemerintah pusat maupun daerah sehingga program pembangunan Desa dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah tepat sasaran dan efektif



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
Kecamatan Dolok Merawan			
1	Perlunya Camat menjalankan tugas pendelegasian dari Bupati kepada Camat terkait dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa	Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring penggunaan APBDes di seluruh desa di se kecamatan Dolok Merawan melakukan pembinaan terhadap aparat desa tentang tufoksi perangkat desa	Tujuan : Anggaran desa sesuai dengan dokumen APBDes dan P APBDes Masalah : Masih ada desa yang belum memahami pengelolaan APBDes dan P-APBDes dengan baik
Satuan Polisi Pamong Praja			
1	Dalam rangka meningkatkan kinerja satuan polisi pamong praja perlunya adanya penambahan anggaran di Sektor Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Usulan pengadaan sarana prasarana selalu diusulkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
2	Untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah perlunya organisasi perangkat daerah untuk melibatkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinasi dengan Bapenda, Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan dan dinas pengelola PAD akan terus diintensifkan	Peningkatan Pendapatan Daerah
3	Berkaitan dengan bidang pemadam kebakaran, dimintakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menambah armada truk damkar atau minimal menyediakan hidran di wilayah rawan kebakaran disetiap 17 Kecamatan	Armada Truk Damkar yang ada akan senantiasa diupayakan dalam kondisi prima dan akan terus diusulkan penambahannya untuk meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran	Penyediaan Sarana dan Prasarana Damkar
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah layak diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, untuk itu patutlah seluruh pejabat yang ada di dinas kependudukan dan pencatatan sipil diberikan reward (penghargaan) karena telah banyak melahirkan inovasi-inovasi	Inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk mempermudah masyarakat memperoleh administrasi kependudukannya dengan melakukan pelayanan keliling dengan Program Paket Cetak Ditempat Pelayanan Keliling (Pak Cepat Yanling), yaitu : 1.Pelayanan di Desa Disdukcapil mendatangi Desa, lalu memproses dan mencetak dokumen kependudukan masyarakat (siap	Hal ini dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukannya. Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan diharapkan masyarakat dapat memenuhi seluruh dokumen kependudukannya agar hak-hak



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
	sehingga pelayanan kependudukan bisa mempermudah masyarakat dalam hal mengurus dokumen kependudukan	ditempat) dan gratis. 2.Pelayanan kepada Lansia/Cacat/ Disabilitas/ Sakit/ ODGJ Disdukcapil mendatangi dimana Lansia/Cacat/ Disabilitas/ Sakit/ ODGJ berada (baik di Rumah maupun di Rumah Sakit), lalu memproses dan mencetak dokumen kependudukan masyarakat (siap ditempat) dan gratis. 3.Pelayanan di Pasar Dihari Minggu Disdukcapil mendatangi Pasar Rakyat Sei Rampah pada Hari Minggu, lalu memproses dan mencetak dokumen kependudukan masyarakat (siap ditempat) dan gratis. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya di hari kerja, masyarakat dapat mengurus dokumennya di Hari Minggu sambil berbelanja. 4.Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam memenuhi hak-hak anak yang dibawah umur 17 Tahun, Disdukcapil mendatangi Sekolah-Sekolah PAUD/TK, SD, SMP, SMA untuk memproses memproses dan mencetak KIA (siap ditempat) dan gratis. 5.Perekaman KTP bagi pemilih pemula Dalam mensukseskan Pemilu 2024, Disdukcapil melaksanakan perekaman bagi Pemilih Pemula baik untuk siswa/I maupun masyarakat dengan langsung turun ke Sekolah-Sekolah SMA/MA/Sederajat dan Ke Kecamatan-Kecamatan. 6.Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dengan IKD kita tidak perlu lagi membawa-bawa fisik KTP. Semua identitas kependudukan kita ada di dalam genggam (smart phone)	masayarakat dapat terpenuhi seperti tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan dan tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah dan lain sebagainya.
2	Agar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil bisa menjalin kerjasama dengan desa dan kepala rumah ibadah non muslim sehingga target pengurusan Akta Perkawinan bisa tercapai	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kab. Serdang Bedagai perihal menjalin Kerjasama dengan desa dan kepala rumah ibadah Non muslim, akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Dalam meningkatkan capaian pengurusan Akte Perkawinan Disdukcapil sudah melaksanakan beberapa upaya: 1.Sistem layanan sudah terintegrasi, dimana dalam pengurusan Kartu Keluarga Baru sekaligus menerbitkan Akte Perkawinan (Sistem layanan terintegrasi	Tercapainya target pengurusan Akta Perkawinan di Tahun 2024



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
		sudah dilaksanakan ditahun 2018 baik di Dinas maupun di kecamatan). 2.pelayanan keliling dengan Program Paket Cetak Ditempat Pelayanan Keliling (Pak Cepat Yanling) sebagaimana kami sampaikan diatas. 3.Pelayanan ke Gereja (jika ada yang mengundang). 4.Sosialisasi akan petingnya Akte Perkawinan ke desa maupun gereja. 5.Berdialog dengan Pemuka Agama Non muslim, diantaranya; Pemuka Agama Kristen dari Kec. Sei Rampah, Sei Bambi, Dolok Masihul, Bintang Bayu, dan Kec. Silinda. Pemuka Agama Katolik dari Kec. Sei Rampah	
3	Dalam rangka meningkatkan pelayanan UTPD di setiap kecamatan dimintakan kepada Pemerintah Daerah untuk menambah alokasi anggaran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk pengadaan server, pc yang baru	UTPD Disdukcapil sampai dengan saat ini belum terbentuk di Kabupaten Serdang Bedagai. Di Kecamatan hanya dibentuk Petugas Operator Adminduk Disdukcapil di Kecamatan untuk membantu memperlancar pengurusan dokumen kependudukan masyarakat. Disdukcapil selalu melakukan pengadaan peralatan penunjang pelaksanaan pelayanan adminduk sesuai dengan kondisi anggaran yang ada agar tidak terhambat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat baik untuk di Dinas maupun di Kecamatan. Hal ini dilakukan karena peralatan yang digunakan untuk pemberian pelayanan adminduk kepada masyarakat dengan menggunakan sistem digital/ elektronik yang sangat rentan dengan kondisi yang ada baik kelistrikan maupun aplikasi yang terus berkembang untuk disesuaikan. Setiap Tahun Disdukcapil menanyakan kepada Petugas Operator Adminduk Disdukcapil di Kecamatan tentang kondisi peralatan yang ada. Dengan begitu Disdukcapil dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan peralatan adminduk tersebut. Dan bila peralatan di Kecamatan mengalami kerusakan tetapi tidak ada dianggarkan untuk pemenuhannya, maka pihak Dinas akan menyikapinya agar tidak terganggu pelayanan kepada masyarakat	Pengadaan peralatan penunjang pelaksanaan pelayanan adminduk dilakukan agar memperlancar pemberian pelayanan adminduk di Dinas dan Kecamatan. Peralatan yang digunakan dalam pemberian pelayanan adminduk kepada masyarakat adalah menggunakan sistem digitalisasi/ elektronik. Sehingga Peralatan yang ada haruslah dalam kondisi prima. Agar tidak terjadi gangguan/ hambatan dalam pemberian pelayanan krn aplikasi yang ada terus berkembang.



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lebih aktif melakukan kegiatan sosialisasi dalam peningkatan partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan dan pentingnya ikut dalam program peserta kb untuk mencapai keluarga sejahtera	1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan kegiatan sosialisasi dalam peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berperan aktif dalam mendukung Program Bangga Kencana terutama dalam meningkatkan jumlah akseptor KB.	1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk mendorong kaum perempuan agar dapat lebih aktif berpartisipasi di Lembaga Pemerintahan guna memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah pembangunan. 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senantiasa mendukung program Bangga Kencana karena melalui program ini dapat membantu meningkatkan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran mengurangi risiko kematian bayi.
Dinas Pertanian			
1	Agar Dinas Pertanian dapat berupaya memenuhi pemenuhan kebutuhan para petani Serdang Bedagai baik itu kebutuhan pupuk, bibit/benih maupun pestisida melalui program kegiatan yang	Dinas Pertanian berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana pertanian sehingga produksi komoditas pertanian terus meningkat, dalam hal penyediaan pupuk di tingkat petani, Dinas Pertanian telah melaksanakan sosialisasi	Penyediaan kebutuhan sarana produksi mendukung peningkatan produksi pertanian



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
	menunjang tercapainya target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci	memupukan berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi, mendorong penggunaan pupuk alternatif non subsidi, mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui aplikasi e-RDKK serta pengusulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi ke Kementan, meningkatkan peranan fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Serdang Bedagai melalui kegiatan evaluasi dan supervisi agar pupuk bersubsidi tersalurkan ke petani yang berhak. Dinas Pertanian juga memberikan bantuan benih/bibit dan pestisida baik dari sumber dana APBD kab maupun sumber dana lainnya yang bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi sesuai kebutuhan maka pemenuhan sarana produksi diharapkan dari upaya swadaya petani	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
1	Dinas Perpustakaan Dan Arsip agar meningkatkan pembangunan literasi di Kabupaten Serdang Bedagai guna meningkatkan kecerdasan masyarakat, memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada agar lebih bermanfaat dan berdaya guna	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai berusaha untuk meningkatkan pembangunan literasi di Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengaktifkan penggunaan beberapa Layanan Umum terkait Perpustakaan dan Bacaan kepada pelajar dan masyarakat. Hal ini dibuktikan pada tahun 2023 Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai telah menerima banyak kunjungan dari pelajar dan masyarakat diluar dari layanan seperti Pojok Baca (Pocadi) dan Perpustakaan Kecamatan. Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Pengoperasionalan Perpustakaan Keliling serta Penyediaan e_Book untuk Konten Titikbaca bagi masyarakat. Tetap konsisten menjalankan inovasi yang sudah ada yaitu Laper Buk_e dan Waper (Wadah Aspirasi Penulis Remaja) untuk menjadi wadah bagi pelajar dan generasi muda untuk gemar membaca dan menulis.	1. Jumlah kunjungan / pemustaka Gedung Perpustakaan rata-rata per hari di tahun 2022 sebanyak 499 pengunjung meningkat menjadi 666 pada tahun 2023 (sumber ; Laporan Akhir Kajian IPLM Tahun 2023 Perpusnas) 2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Serdang Bedagai meningkat dari Tahun 2022 sebesar 40,03 menjadi 41,54 pada tahun 2023 yang lalu (sumber ; Laporan Akhir Kajian IPLM Tahun 2023 Perpusnas) 3. Bertambahnya Titikbaca di Kabupaten Serdang Bedagai dengan diberikannya Alat Bantuan Titikbaca dari Perpustakaan Nasional RI kepada Perpustakaan Desa Rambung Sialang



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
			Tengah (sumber ; Berita Acara Penerima Hibah Titikbaca Nomor B.6760/4/PPM.00.00/XI.2023 tanggal 16 November 2023) 4. Menurunnya Kekurangan Jumlah Koleksi Bacaan berdasarkan IFA/UNESCO di Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dari data di tahun 2022 sebanyak 1.235.134 koleksi menurun menjadi 761.289 (sumber ; Laporan Akhir Kajian IPLM Tahun 2023 Perpusnas)
Sekretariat Daerah			
1	Program penataan administrasi kewilayahan, rekomendasi perlunya kepada kepala daerah untuk menganggarkan pembuatan pilar batas wilayah kabupaten	Akan diusulkan anggaran untuk pemasangan batas wilayah kabupaten antara Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batubara, dan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi	Tercapainya penyelesaian batas daerah kabupaten serdang bedagai dengan kabupaten Simalungun, Batubara, Tebing Tinggi sesuai dengan terbitnya Permendagri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batubara, Permendagri Nomor 123 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Simalungun dan Permendagri 128 tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi
2	Berkaitan dengan masalah batas wilayah kecamatan, meminta agar bagian pemerintahan dapat menyelesaikan masalah batas wilayah desa dan kecamatan	Sudah dilaksanakan koordinasi dengan bidang pemerintahan desa , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk penyelesaian penegasan batas desa dengan tindaklanjut sudah dibentuk Tim penegasan batas desa, sesuai dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan	Tercapainya penyelesaian batas desa dan kecamatan di wilayah kabupaten serdang bedagai



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
		bahwa tim penegasan batas desa ditanganai oleh kepala bagian yang membidangi pemerintahan desa	
3	Kepada pada bagian pengadaan barang dan jasa dalam melakukan pengadaan barang dan jasa agar selektif dan disesuaikan dengan waktu, sehingga tidak terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan	Dalam melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selalu berupaya optimal agar proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kab. Serdang Bedagai dapat berjalan dengan baik. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selalu menghimbau kepada OPD untuk melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesegera mungkin agar terhindar dari keterlambatan pelaksanaan, hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah No : 18.5/027/7601/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian, sebelum proses pengadaan barang dan jasa berjalan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa akan selalu mereview seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tersebut termasuk dalam hal waktu pemilihan penyedia dan proses pelaksanaan. Hal tersebut dilakukan agar jadwal pelaksanaan yang dibuat sesuai dan tidak melewati batas yang ditentukan. Perlu kami sampaikan bahwasannya proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada Bag. Pengadaan Barang dan Jasa hanyalah sebatas proses pemilihan penyedia, apabila terjadi keterlambatan dalam hal pelaksanaan, tentunya sudah bukan menjadi wewenang dari Bag. Pengadaan Barang dan Jasa melainkan OPD yang melaksanakan kegiatan tersebut. Namun tentunya kami juga selalu menghimbau kepada seluruh OPD agar melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien.	Rekomendasi dari Komisi D mengenai perlakuan yang lebih Selektif dalam melakukan proses pengadaan tentunya akan kami laksanakan sebaik mungkin. Kami akan berupaya lebih optimal dan lebih selektif lagi dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu			
1	Peningkatan investasi di Serdang Bedagai dapat menjadi motor dalam menurunkan angka kemiskinan, dengan melakukan	Menyusun perencanaan promosi potensi daerah untuk mengikuti promosi-promosi penanaman modal ditingkat nasional dan Internasional	promosi dilakukan untuk menarik minat investor dengan tujuan meningkatkan investasi untuk membuka lapangan



No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
	promosi€“promosi mengenai potensi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai		kerja yang menyerap tenaga kerja dan diharapkan mendukung penurunan angka kemiskinan
Dinas Komunikasi dan Informatika			
1	Agar Dinas Kominfo meningkatkan jumlah desa yang mendapatkan fasilitas jaringan internet yang dikelola oleh pemerintah guna terwujud nya Serdang Bedagai sebagai Smart City	Terkait peningkatan jumlah desa untuk mendapatkan fasilitas jaringan internet membutuhkan anggaran yang besar. Untuk saat ini karena keterbatasan anggaran di Dinas Kominfo sehingga penambahan jumlah desa untuk mendapat fasilitas jaringan internet belum dapat dilakukan. Selain itu Desa juga ada mengelola APBDes sehingga memungkinkan kiranya Desa untuk menganggarkan untuk pengadaan internet di Desa.	Fasilitas Internet Desa dapat menggunakan dana APBDes
Dinas Perhubungan			
1	Untuk retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan khususnya retribusi pengujian kendaraan bermotor dari persentase capaian kendaraan yang melakukan pengujian sebesar 218,5% berbanding terbalik dengan capaian retribusinya hanya tercapai 86,85%, DPRD merekomendasikan agar dinas perhubungan melakukan inovasi dengan membuat metode pembayaran retribusi secara elektronik, serta melakukan renovasi tempat pengujian serta peningkatan pelayanan pengujian yang memudahkan masyarakat sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan pengujian di Kabupaten Serdang Bedagai agar pendapatan asli daerah bisa meningkat	Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 adalah Rp.200.000.000,- dengan Realisasi Keuangan mencapai Rp.185.455.000,- atau 92,7% atau 2.649 kendaraan (sumber : Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kab. Serdang Bedagai). Inovasi pembayaran parkir secara elektronik merupakan salah satu pembayaran non tunai yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, Dinas Perhubungan Kab. Serdang Bedagai sedang melakukan kajian ke arah pembayaran non tunai (secara elektronik) dengan melakukan studi banding ke Kota Medan. Renovasi gedung pengujian akan dilakukan pada tahun selanjutnya sebatas pada kemampuan anggaran perbaikan gedung di Dinas Perhubungan Kab. Serdang Bedagai.	Adapun tujuan/masalah yang diselesaikan adalah sebagai berikut: 1. Sistem pembayaran secara elektronik (non-tunai); 2. Perbaikan gedung pengujian.



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
2	Dinas Perhubungan agar melakukan update data yang diminta oleh Badan Pusat Statistik agar Buku Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik adalah data teupdate, karena data ini dikonsumsi oleh masyarakat luas	Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai akan melakukan update data secara kontinu sebagaimana diminta oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya.	Update (pembaharuan) data di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai.
Dinas Perikanan			
1	Dinas Perikanan dapat melakukan verifikasi dan validasi data objek retribusi daerah yang baru setelah perda pajak dan retribusi daerah yang terbaru diundangkan	Perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 belum diundangkan sehingga Dinas Perikanan belum bisa melakukan verifikasi dan validasi data objek retribusi daerah	Jika Perda Pajak Retribusi Daerah sudah diundangkan maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perikanan dapat ditingkatkan
Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan			
1	DPRD merekomendasikan agar ke depan untuk urusan kepemudaan agar dibuat program kegiatan yang lebih banyak untuk mengarahkan pemuda ke dalam kegiatan ekonomi mandiri maupun organisasi kemasyarakatan sesuai dengan target indikator yang sudah ditetapkan	walaupun dengan keterbatasan anggaran, namun melalui program peningkatan kapasitas SDM Kepariwisata, Pemuda Kabupaten Serdang Bedagai diikuti sertakan untuk mengikuti pelatihan yang sumber dananya melalui DAK Kemenparekraf	Kolaborasi Pelatihan SDM Kepariwisata dengan mengikutsertakan Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri melalui sumber dana DAK Kemenparekraf
2	DPRD merekomendasikan agar pembinaan atlet berprestasi yang diberikan dalam bentuk hibah yang dikelola oleh KONI dan NPC (National Paralympic Commite) dapat dilakukan pengawasan agar pembinaan terhadap atlet yang berprestasi	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan telah menetapkan Surat Keputusan Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah yang melakukan pengawasan terhadap KONI dan NPC	Pengawasan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Poraparbud dengan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati
3	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dengan target 3 cagar budaya adalah target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, untuk target tahun depan 1 cagar budaya yang dilestarikan. DPRD merekomendasikan agar target tahun	Tahun 2023 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dengan kerjasama Provinsi Sumatera Utara akhirnya menetapkan 2 (Dua) Cagar Budaya Kabupaten Serdang Bedagai, yang tahun sebelumnya realisasi kinerja belum tercapai.	Setiap Cagar Budaya yang ditetapkan akan dilestarikan dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
	depan cagar budaya yang dilestarikan diakumulasikan dengan target tahun 2022 yang tidak tercapai sehingga menjadi 4 cagar budaya yang dilestarikan		
4	Dalam menyusun program dan kegiatan dengan output/keluaran kegiatan yang harus mengacu kepada target indikator yang harus dipenuhi baik itu Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci	Pemantapan formulasi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci telah dilakukan dengan bekerjasama dengan tim pendamping/ konsultan Smart ID, sehingga menciptakan Indikator Kinerja yang SMART	Pemantapan formulasi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang lebih fokus melakukan kegiatan pembangunan jalan pada tahun berikutnya, sehingga program pembangunan jalan dalam kondisi mantap sesuai target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 72% dapat dicapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan memprioritaskan program pembangunan jalan untuk tahun 2023	Agar pembangunan jalan dalam kondisi mantap dapat tercapai sesuai target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 72 %
2	Dengan adanya Perpres No 120 Tahun 2022 tentang percepatan pembangunan nasional diminta kepada dinas PUTR untuk melakukan pembangunan jalan desa menuju kecamatan dan jalan kecamatan menuju jalan propinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sudah melaksanakannya pada program di Dana Alokasi Khusus dan IJD (Inpres Jalan Daerah)	Untuk meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan
3	Dinas PUTR untuk melakukan pendalaman di areal muara sungai bedagai dengan tujuan untuk penanggulangan banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sudah mengirim surat usulan ke Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) untuk dilakukan normalisasi	Untuk penanggulangan banjir di areal muara sungai bedagai
Dinas Ketahanan Pangan			
1	Program kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator dalam urusan pangan tidak dilaksanakan dalam bentuk seremonial saja tetapi lebih mengedepankan program kegiatan	Untuk kegiatan seremonial sudah tidak ada dilaksanakan lagi di tahun 2023. Kegiatan penilaian desa dilaksanakan bagi desa yang telah berhasil menjadi desa terbaik dalam membentuk halaman asri, teratur, indah dan nyaman	Tujuan pemanfaatan pekarangan ini adalah untuk menambah penghasilan dan pendapatan keluarga dan kelompok wanita tani yang berdaya guna.



BAB III

No	Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
	yang bersifat bermanfaat langsung ke masyarakat	serta bermanfaat bagi desanya. Pada tahun 2023 sudah ada terbentuk pengembangan desa B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yaitu Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin. Desa B2SA tersebut telah terbina dan memiliki kelompok wanita tani yang bernama KWT Maju Jaya. Dalam desa B2SA tersebut memiliki teras pangan, rumah pangan dan gerai pangan. Dengan adanya desa B2SA tersebut dapat menambah penghasilan keluarga dan desa dan kecukupan gizi balita dapat terpenuhi	Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah dinas ketahanan pangan belum mampu untuk menjalankan program B2SA hingga meluas sampai 1 desa, karena saat ini dinas ketahanan pangan masih membina beberapa dusun dalam 1 desa yang disebabkan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia
2	Pemerintah daerah dapat melakukan pendataan kawasan rawan atau rentan pangan di 237 desa dan 7 kelurahan dan mengupdate data ke peta ketahanan dan kerentanan pangan (food security and vulnerability atlas) milik badan pangan nasional, sehingga penanganan daerah rawan atau rentan pangan di serdang bedagai dapat maksimal	Penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Serdang Bedagai seyogyanya dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bentuk intervensi atas kondisi masyarakat rawan pangan. Pada tahun 2022, penanganan Desa rawan pangan difokuskan pada 1 salah satu Desa rawan pangan di Kecamatan Perbaungan, yakni Desa Lubuk Rotan, dengan jumlah bantuan bahan makanan pokok berupa beras, minyak kemasan dan gula pasir kemasan sebanyak 100 paket untuk 100 seratus orang masyarakat rawan pangan. Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun 2022 telah di update dan telah digunakan sebagai rekomendasi kegiatan pada pengkordinasian Kerawanan Pangan dan Gizi	Tujuan penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/ Kota dilaksanakan adalah untuk menurunkan jumlah Desa rawan pangan
3	Data yang dituangkan dalam buku LKPJ bupati dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melibatkan BPS, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tahun-tahun sebelumnya, agar tidak terjadi ketidaksinkronan data penting urusan Pemerintahan Daerah sebab data yang disampaikan oleh BPS juga bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Koordinasi dengan BPS Serdang Bedagai terkait dengan data-data penting urusan Pemerintah Daerah untuk memudahkan penyusunan perencanaan program Daerah dengan menerapkan program pembiakan sapi berbasis data	Semua data yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan khususnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dipertanggungjawaban dan menjadi dasar penyusunan perencanaan program kerja Daerah



BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

a. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak ada menerima tugas pembantuan dari Pemerintah tingkat atasnya.

b. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak memberikan dan tugas pembantuan kepada pemerintah dibawahnya.

4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN



BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Serdang Bedagai Tahun 2023 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan (*progress report*) dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan belum semua permasalahan dapat diatasi serta memuaskan semua pihak namun apa yang telah dicapai merupakan modal dasar bagi perbaikan maupun penajaman program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Melalui LKPJ ini kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Amin.